



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

**DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat nikmat kesehatan dan kekuatan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dapat disusun dan diselesaikan. Penyusunan laporan kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan dan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat selama tahun 2024. Disamping itu LKjIP ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LKjIP ini belum memenuhi semua kriteria penyusunan yang sempurna. Oleh sebab itu, sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja Instansi dan tata cara Reviw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah akan senantiasa melakukan penyempurnaan di masa-masa yang akan datang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga merupakan hasil dari laporan kinerja seluruh program yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Secara garis besar laporan ini memuat data/informasi mengenai perencanaan kinerja sebagai target rencana kerja dan realisasi/ capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

Dalam rangka memenuhi fungsi LKjIP sebagai sumber informasi untuk perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Informasi yang disajikan dalam LKjIP ini dapat dijadikan bahan analisis untuk mengidentifikasi peluang dan mengatasi tantangan sebagai masukan guna perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat khususnya sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya bidang kesehatan.

Palu, Februari 2024
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Tengah

dr. I Komang Adi Sujendra, Sp.PD
NIP. 19650325 199003 1 014

Daftar Isi

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1. Cascading Kinerja
- 1.2. Tugas Fungsi dan struktur Organisasi
- 1.3. Isu- Isu Strategis
- 1.4. Dukungan SDM, Sarana Prasarana
- 1.5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah
- 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan
- 2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024
- 2.4. Indikator Kinerja Utama
- 2.5. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka panjang menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
- d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

3.2 Realisasi Anggaran

3.3 Inovasi

3.4 Penghargaan

AB IV PENUTUP

LAMPIRAN

- PERJANJIAN KINERJA 2024
- IKU DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
- RENCANA KERJA TAHUNAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Cascading Provinsi Sulawesi Tengah

Cascading Dinas Kesehatan bisa dilihat pada Link berikut :

https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/1mAji3ov_Rc1tNqh1rc5a-3lcPQyy3utp/1sNHHCcMsuGiVZbxduRU1vgFyCG3FsYFV?hl=id&sort=13&direction=a

1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas Dinas Kesehatan

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi

Fungsi Dinas Kesehatan

Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit , Peladangan Kesehatan, dan Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit , Pelayanan Kesehatan, dan Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit , Pelayanan Kesehatan, dan Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit , Pelayanan Kesehatan, dan Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia;

Uraian Tugas Organisasi Kesehatan

Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- c. penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- d. pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- e. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait sesuai dengan pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- b. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Rincian tugas pokok Subbagian Perencanaan Program:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Program;
- b. melaksanakan penghimpunan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;

- c. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta petunjuk operasional penyusunan program dan kegiatan;
- d. melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan pengembangan program dengan pihak terkait;
- e. melaksanakan pengumpulan data, analisis data, pengolahan dan penyajian informasi, identifikasi masalah, penentuan prioritas masalah dan perumusan kegiatan prioritas;
- f. menyusun rencana strategis, rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja di lingkungan Dinas;
- g. melaksanakan analisis usulan kegiatan program;
- h. melaksanakan penyusunan anggaran (RKA, RKAKL, Emusrebang, ERenggar, EPlanning);
- i. melaksanakan penyusunan RENJA, LKjIP, LKPJ, LPPD, RPJMD dan Renstra di lingkungan Dinas;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- k. melaksanakan penyusunan laporan kinerja dan anggaran baik bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
- l. melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Program serta Dinas; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi, pengelolaan keuangan dan aset.

Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;

- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset dengan pihak lain dan unit kerja terkait;
- d. melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- e. melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
- f. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- g. melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak Daerah;
- h. melaksanakan pemeliharaan barang milik Daerah;
- i. melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- j. melaksanakan peyiapan bahan monitoring, evaluasi dan menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Dinas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, kehumasan, hukum, organisasi, pengaduan masyarakat dan surat menyurat.

Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud diatas meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, kehumasan, hukum, organisasi, pengaduan masyarakat dan Korpri;
- c. melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
- d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
- e. melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai,

Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, SKP, persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;

- f. melaksanakan/ mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional tertentu;
- g. melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta
- 6.mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
- h. melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bidang Kepegawaian dan Umum;
- j. melaksanakan peyiapan bahan monitoring, evaluasi dan menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Dinas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Pimpinan.

Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi kesehatan masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Kesehatan Masyarakat;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kesehatan Masyarakat;
- c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Kesehatan Masyarakat;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Kesehatan Masyarakat;
- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- f. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Masyarakat.

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi,

serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi.

Uraian tugas Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi sebagaimana maksud diatas meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
- b. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- c. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi;
- d. menyelenggarakan program kegiatan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
- f. menyelenggarakan pemantauan dan penanggulangan gizi masyarakat;
- g. melaksanakan bimbingan dan pengendalian masalah gizi pada Daerah terpencil, kepulauan dan perbatasan;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- i. melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat.

Uraian tugas Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana maksud diatas meliputi:

- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat;
- c. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat;

- d. melaksanakan kegiatan teknis seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. melaksanakan kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- g. melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, kesehatan olahraga dan kesehatan haji.

Uraian tugas Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga meliputi:

- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga;
- b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, kesehatan olahraga dan kesehatan haji;
- c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan kegiatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, kesehatan olahraga dan kesehatan haji;
- d. melaksanakan kebijakan pada kegiatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, kesehatan olahraga dan kesehatan haji;
- e. melakukan bimbingan teknis kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, kesehatan olahraga dan kesehatan haji;
- f. melaksanakan kegiatan teknis Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan

- i. melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana maksud diatas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- f. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Seksi Surveilans dan Imunisasi

Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengendalian penyakit menular dan imunisasi

Uraian tugas.Surveilans dan Imunisasi sebagaimana maksud diatas meliputi:

- a. mengelola adminstrasi dan menyusun program kerja Seksi Surveilans dan Imunisasi;

- b. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan teknis kegiatan Seksi Surveilans dan Imunisasi;
- c. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan surveilans dan imunisasi;
- d. melaksanakan kebijakan pada kegiatan surveilans dan imunisasi;
- e. melakukan Kegiatan surveilans dan imunisasi;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Surveilans dan Imunisasi;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- h. melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Surveilans dan Imunisasi

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

Uraian tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sebagaimana maksud diatas meliputi:

- a. mengelola adminstrasi dan menyusun program kerja Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- b. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- c. melaksanakan kebijakan pada kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- d. pembinaan dan bimbingan teknis Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular;
- e. melakukan pemantauan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- g. melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Napza

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Napza mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan napza.

Uraian tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Napza sebagaimana maksud diatas meliputi:

- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Napza;
- b. melakukan dan menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Napza;
- c. melaksanakan kebijakan pada kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Napza;
- d. melaksanakan kebijakan pada kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Napza;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Napza;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- g. melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Napza.

Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan serta kesehatan tradisional dan pelayanan transfusi darah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana maksud diatas Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, dan kesehatan tradisional dan pelayanan transfusi darah;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, dan kesehatan tradisional dan pelayanan transfusi darah;
- c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, dan kesehatan tradisional dan pelayanan transfusi darah;
- d. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, dan kesehatan tradisional dan pelayanan transfusi darah;
- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- f. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Kesehatan.

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan primer.

Uraian tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Primer meliputi:

- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
- b. melakukan dan menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dengan unit kerja terkait;
- c. melakukan pembinaan kegiatan pelayanan kesehatan primer;
- d. melakukan pemantauan dan pembinaan mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer;
- e. melaksanakan kebijakan pada kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;

- f. melaksanakan bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan pada Daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala Provinsi;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis di lingkungan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- i. melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Primer.

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan pada situasi tertentu serta penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat dan pembiayaan kesehatan.

Uraian tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan meliputi:

- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan;
- b. melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan pembinaan pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan pada situasi tertentu, jaminan kesehatan dan pembiayaan kesehatan dengan unit kerja terkait;
- c. melaksanakan pembinaan mutu pelayanan kesehatan rujukan;
- d. memfasilitasi mutu layanan kesehatan rujukan;
- e. melaksanakan sistem informasi kesehatan rujukan;
- f. mengelola/menyelenggarakan bimbingan, pengendalian jaminan pemeliharaan kesehatan skala Provinsi;
- g. melaksanakan pembimbingan dan pengendalian jaminan pemeliharaan kesehatan Nasional (tugas pembantuan);
- h. melakukan pembinaan teknis pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan dan pengembangan sistem pembiayaan kesehatan di Kabupaten/Kota;
- i. mengevaluasi kegiatan pelayanan kesehatan rujukan;

- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- k. melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan.

Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Pelayanan Transfusi Darah

Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Pelayanan Transfusi Darah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional dan pelayanan transfusi darah.

Uraian tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Pelayanan Transfusi Darah meliputi:

- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Pelayanan Transfusi Darah;
- b. melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional dan pelayanan transfusi darah;
- c. melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional dan pelayanan transfusi darah;
- d. melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional dan pelayanan transfusi darah;
- e. mengevaluasi hasil kegiatan pelayanan kesehatan tradisional dan pelayanan transfusi darah;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- g. melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Pelayanan Transfusi Darah.

Bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggara

fungsi kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan sumber daya manusia kesehatan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana maksud diatas, Bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, dan sumber daya manusia kesehatan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, dan sumber daya manusia kesehatan;
- c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, dan sumber daya manusia kesehatan;
- d. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, dan sumber daya manusia kesehatan;
- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- f. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Seksi Kefarmasian

Seksi Kefarmasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan kefarmasian.

Uraian tugas Seksi Kefarmasian meliputi:

- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Kefarmasian;
- b. melakukan analisis koordinasi penyusunan perencanaan kebutuhan obat publik, reagensia dan vaksin lainnya serta analisis kebutuhan buffer stock obat Provinsi, reagensia dan vaksin lainnya skala Provinsi;
- c. melakukan monitoring, evaluasi, bimbingan teknis, dan pelaporan kebutuhan obat publik, reagenisa dan vaksin skala Provinsi;

- d. melakukan sertifikasi sarana produksi dan distribusi alat kesehatan;
- e. memfasilitasi pemberian rekomendasi izin industri komoditi kesehatan, Pedagang Besar Farmasi, Pedagang Besar Farmasi Cabang, Industri Obat Tradisional, Industri Ekstrak Bahan Alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Penyalur Alat Kesehatan dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan;
- f. melaksanakan sistem informasi kefarmasian;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- h. melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kefarmasian.

Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan bidang alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

Uraian tugas Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga meliputi:

- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
- b. melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dengan unit kerja terkait;
- c. melaksanakan rencana kegiatan teknis operasional Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
- d. mengevaluasi hasil kegiatan Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- f. melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan sumber daya manusia kesehatan yaitu perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan, pengembangan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan berkelanjutan.

Uraian tugas Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan meliputi:

- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- b. melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan pembinaan sumber daya manusia kesehatan dengan unit kerja terkait;
- c. melaksanakan rencana kegiatan teknis operasional Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- f. melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menurut jenis dan jenjang jabatan fungsional

1.3. Isu Strategi 2021 dan Permasalahan Utama

- 1) Peningkatan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak

Pembangunan kesehatan harus mampu menjamin tersedianya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat, yang didukung dengan kemudahan akses (baik dari aspek ketersediaan/jarak maupun pembiayaan).

Jaminan akses terutama difokuskan pada upaya pengembangan dan penguatan sarana pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan

dan kepulauan (DTPK), sehingga disparitas status kesehatan antar kabupaten/kota dapat dikurangi.

Upaya kesehatan harus lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi angka kesakitan sebagai penerapan Paradigma Sehat. Upaya promotif dan preventif dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan memaksimalkan pemanfaatan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) serta merevitalisasi peran dan fungsi puskesmas. Selain fungsi puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan strata pertama, maka fungsi puskesmas sebagai pusat pembangunan berwawasan kesehatan dan pusat pemberdayaan masyarakat harus lebih ditingkatkan.

2) Peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata

Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas harus didukung dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan yang kompeten dan terdistribusi secara adil dan merata. Dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu : (1) Pemenuhan ketersediaan tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi, (2) Pemerataan tenaga kesehatan melalui pendistribusian tenaga-tenaga setrategis sesuai kebutuhan, serta (3) Pemenuhan dan pemanfaatan tenaga kesehatan di sarana kesehatan sesuai dengan kompetensi

3) Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan

Tersedianya pembiayaan kesehatan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan dimanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya program-program pembangunan kesehatan. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya advocacy dan sosialisasi kepada pemerintah

-ah daerah agar dapat mengalokasikan dukungan APBD kesehatan sebesar 10% diluar gaji yang diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik.

Pembiayaan kesehatan diupayakan untuk memenuhi target pencapaian Standard Pelayanan Minimal (SPM). Perencanaan

pembiayaan kesehatan harus mampu menjamin tersedianya data PHA & DHA, sehingga mampu mensinkronisasikan dan menghimpun sumber-sumber pembiayaan dari APBN dan APBD baik dilingkungan SKPD Kesehatan maupun dukungan pembiayaan kesehatan dari SKPD lainnya. Disamping itu pembiayaan kesehatan juga diupayakan dari peran serta masyarakat termasuk swasta.

Disamping itu pembiayaan kesehatan harus lebih ditingkatkan untuk menjamin tercapainya Jaminan Kesehatan Sosial menuju Universal Health Coverage

- 4) Peningkatan ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/dan mutu obat dan makanan.

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas harus didukung dengan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Upaya peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan perlu didukung dengan perencanaan dan pengadaan yang baik, optimalisasi pemanfaatan dana, efektifitas penggunaan serta pengendalian persediaan dan pendistribusian.

Untuk menjamin pemerataan obat dan perbekalan kesehatan diperlukan harmonisasi dan integrasi pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, obat program, obat bencana, obat pelayanan kesehatan khusus dan vaksin, oleh karena itu pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan harus dilakukan melalui satu pintu (one gate policy).

6. Mengurangi resiko terjadinya penyakit, kecelakaan dan dampak bencana Pengendalian masalah kesehatan merupakan penjabaran pembangunan nasional yang harus dilakukan secara berkesinambungan.

Terlindunginya masyarakat dari penyakit, kecelakaan, kecacatan dan dampak bencana yang merupakan tujuan dari pengendalian masalah kesehatan, berbagai upaya yang telah dilakukan dengan memutus rantai penularan pada populasi rawan tertular dan menularkan untuk mengurangi resiko terjadinya penyakit dilakukan secara komprehensif dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi dampak sosial ekonomi serta meningkatkan jangkauan dan kualitas pengendalian secara bertahap berdasarkan epidemiologi dengan

menggunakan setiap sumber daya mengikut sertakan seluruh komponen masyarakat.

Masalah kesehatan adalah sesuatu yang kompleks, multidimensial, lintas sektor, lintas program dan lintas disiplin ilmu, determinan utama kesehatan atau variabel-variabel yang mempengaruhi derajat kesehatan dan menunjukkan derajat kesehatan suatu wilayah.

7. Meningkatkan Kebijakan dan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasil guna

Faktor manajemen kesehatan mempunyai peranan yang sangat besar dalam menentukan keberhasilan program pembangunan kesehatan. Beberapa faktor yang berperan adalah ketersediaan data dan informasi kesehatan, dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem perencanaan serta faktor regulasi. Mengingat kondisi geografis daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang cukup sulit dan berdampak pada ketersediaan data yang valid dan tepat waktu, maka perlu dikembangkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dan on line pada semua level fasilitas pelayanan kesehatan baik di Puskesmas, Kabupaten sampai ke tingkat Provinsi. Keberhasilan tersebut perlu didukung penyiapan fasilitas dan tenaga yang berkaitan dengan pengelolaan data.

Dalam upaya memecahkan permasalahan kesehatan yang sangat kompleks perlu didukung dengan pengembangan ilmu pengetahuan melalui upaya operasional riset dan penelitian dibidang kesehatan. Sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan merupakan hal yang sangat menentukan dalam pencapaian target program pembangunan kesehatan, untuk itu perlu dikembangkan sistem perencanaan terpadu yang berbasis pada masalah kesehatan wilayah. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu diupayakan penyiapan fasilitas dan sumberdaya tenaga dibidang perencanaan maupun tenaga pengelola keuangan yang cermat dan akuntabel.

Pelaksanaan pembangunan kesehatan diperlukan dukungan system kesehatan termasuk beberapa peraturan atau regulasi. Upaya tersebut akan diarahkan pada penyusunan beberapa peraturan daerah ataupun bentuk peraturan lainnya seperti dalam bentuk komitmen dan politis dari berbagai pelaku kesehatan baik pemerintah, swasta maupun

masyarakat yang bersifat mengikat untuk berperan aktif dalam upaya pembangunan kesehatan baik dalam fungsi pelaksanaan maupun fungsi pengawasan.

1.3 Isu – Isu Strategis

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, tidak dapat terlepas dari berbagai isu penting dan strategis yang berkembang baik pada tatanan pemerintah Pusat maupun tatanan Daerah.

Isu - isu pokok dan atau strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi.
2. Penurunan angka *Stunting*.
3. Masih tingginya angka penyakit menular dan prevalensi tidak menular
4. Penguatan layanan kesehatan

Selanjutnya Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah memandang perlu untuk melakukan langkah - langkah responsif terhadap isu - isu tersebut, selain memperhatikan arah kebijakan pembangunan secara umum. Implementasi dari responsif tersebut selanjutnya dituangkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah periode 2021 - 2026.

1.4 Dukungan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Pasarana

Sumber daya tenaga kesehatan yang bekerja pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah termasuk UPT Laboratorium kesehatan, BAPELKES dan UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (P2KT) sebanyak 287 orang terdiri dari laki-laki 107 orang dan perempuan 180 orang. Tenaga tersebut berasal dari berbagai disiplin ilmu dan tingkat pendidikan serta ditempatkan sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

Tabel 1.1 Distribusi Kepegawaian Berdasarkan Golongan/Ruang Dinas Kesehatan Tahun 2024

NO.	GOLONGAN/ RUANG	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		PRIA	WANITA	
1	I/b	1		1
2	II/a	2		2
3	II/b	5	2	7
4	II/c	10	10	20
5	II/d	8	10	18
6	III/a	9	20	29

7	III/b	19	25	44
8	III/c	12	38	50
9	III/d	30	46	76
10	IV/a	7	24	31
11	IV/b	3	3	6
12	IV/c	1	1	2
13	IV/d		1	1
TOTAL		107	180	287

Dari jumlah pegawai yang ada bila dilihat dari jenjang pendidikan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1.2 Distribusi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan Dinas Kesehatan Tahun 2024

NO.	PDDKN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		PRIA	WANITA	
1	SD	1		1
2	SMA/SMK	28	21	49
3	D.I	4	4	8
4	D.III	12	31	43
5	S1/D.IV	47	82	129
6	S2	15	42	57
TOTAL		107	180	287

Selanjutnya diskripsi pegawai menurut jabatannya dibagi menjadi beberapa kategori. Dari jumlah pegawai yang ada maka jumlah pegawai menurut jabatan adalah jabatan struktural sebanyak 31 orang, jabatan fungsional umum sebanyak 320 orang dan jabatan fungsional tertentu sebanyak 127 orang. Distribusi pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan menurut jabatan dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 1.3 Distribusi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Dinas Kesehatan Tahun 2024

NO.	ESELON	FORMASI	TERISI	LOWONG
1	II.a	1	1	0
2	III.a	5	5	0
3	III.b	4	4	0
4	IV.a	23	21	2
TOTAL		33	31	2

**Tabel 1.4 Distribusi Kepegawaian Berdasarkan Jabatan Fungsional
Dinas Kesehatan Tahun 2024**

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG JABATAN & JENIS KELAMIN						TOTAL
		AHLI		JUMLAH AHLI	TERAMPIL		JUMLAH TERAMPIL	
		P	W		P	W		
1	Administrator Kesehatan	5	13	18			0	18
2	Epidemiologi Kesehatan	3	9	12			0	12
3	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	4	6	10			0	10
4	Sanitarian	1	2	3	2	1	3	6
5	Pranata Laboratorium Kesehatan		3	3	1	7	8	11
6	Pranata Komputer		1	1		1	1	2
7	Widyaiswara		5	5			0	5
8	Dokter	1	2	3			0	3
9	Perawat	2		2			0	2
10	Nutrisionis		1	1			0	1
11	Apoteker	1		1			0	1
	TOTAL	17	42	59	3	9	12	71

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

Berdasarkan rekomendasi yang diberikan dalam evaluasi SAKIP 2023, berikut adalah tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
1.	Semua dokumen perencanaan harus dipublikasikan tepat waktu dan dapat diakses	Seluruh dokumen perencanaan kinerja telah dipublikasikan tepat waktu melalui situs resmi Dinas Kesehatan dan portal SAKIP.	Bukti terlampir
2.	Melakukan perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya	Dokumen perencanaan telah disesuaikan berdasarkan hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.	Bukti terlampir
3.	Laporan kinerja direviu APIP	Seluruh laporan kinerja telah melalui reviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Bukti terlampir
4	Pengumpulan data kinerja dan Pengukuran capaian kinerja agar Memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)	Pengumpulan data kinerja dan Pengukuran capaian kinerja telah Memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)	Bukti terlampir

5.	Evaluasi Kinerja Internal agar menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).	Evaluasi Kinerja Internal telah menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).	Bukti terlampir
----	--	---	-----------------

Palu, 01 Juli 2024

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Tengah,



dr. I Komang Adi Sujendra, Sp.PD
NIP 196503251990031014

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
				(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Kualitas Manusia melalui Pelayanan Kesehatan yang Merata	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	76,92	80,00	82,00	84,15	85,08	86,15
			Usia Harapan Hidup	68.02	68.8	69.01	69.1	70.01	70.8
			Angka Kematian Bayi	7.26	6.29	5.34	4.41	3.49	2.59
			Angka Kelangsungan Hidup Bayi	992.74	993.71	994.66	995.59	996.51	997.41
			Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	7.72	7.28	7.01	6.52	6.28	5.87
			Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup	5.7	5.3	4.9	4.5	4.1	3.7
			Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	128.94	109.68	90.79	72.27	54.1	36.29
			Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin	80	80	81	82	83	84
		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	72.71	78.09	83.51	88.98	94.48	100
			Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	83.13	83.92	84.72	85.52	86.32	87.14
			Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani	53.95	53.95	61.59	69.26	76.96	84.69
			Rasio Dokter per Satuan Penduduk	0.43	0.46	0.49	0.51	0.54	0.57
			Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk	3.89	4.17	4.44	4.71	4.97	5.23

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-						
				(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			Presentase Hasil Kajian DHA	0	10	25	35	65	100	
		Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan	Cakupan Kunjungan Bayi	84.06	85.14	86.22	87.31	88.41	89.52	
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	81.82	83.52	85.24	86.96	88.69	90.44	
			Cakupan Pelayanan Nifas	80.42	82.2	83.99	85.79	87.61	89.43	
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	68	72.51	77.06	81.66	86.29	90.96	
			Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	61.81	68.43	74.91	81.26	87.48	93.56	
			Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapatkan Perawatan	100	100	100	100	100	100	
			Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Kesehatan	Rasio Posyandu per Satuan Balita	14.12	14.04	13.97	13.89	13.81	13.73
		Cakupan Puskesmas		122.86	125.71	128.57	131.43	134.29	137.14	
		Cakupan pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin		10	30	40	50	60	75	
		Cakupan Puskesmas Pembantu		15.04	20.47	25.9	31.32	36.75	42.18	
		Presentase Puskesmas yang Terakreditasi		98	98	99	100	100	100	
		Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk		0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
		Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)		100	100	100	100	100	100	
		Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk		0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	
		Meningkatnya Upaya Pencegahan Penyakit Menular, Tidak Menular serta Surveilans Penyakit di Masyarakat		Cakupan Penemuan Pneumonia Balita	65	70	75	80	85	90
				Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	60	70	70	80	80	80
			Tingkat Prevalensi	340	340	329	329	320	315	

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
				(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	tercapainya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan Perizinan Farmasi, Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat		Indeks Pelayanan Publik	2,65	3,01	3,52	4,00	4,30	4,51
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana	Penanganan Krisis Kesehatan akibat bencana	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya pelayanan perizinan farmasi dan obat tradisional	Persentase UKOT (Usaha Kecil Obat Tradisional) yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha	10	20	30	40	50	60
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan bersumber daya masyarakat	Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15 -24 Tahun yang memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS	0	0	0	0	0	0
			Pengguna Kondom pada Hubungan Seks Beresiko Tinggi Terakhir	0	0	0	0	0	0

2.2 Strategi dan arah kebijakan

Dalam mengimplementasikan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan strategi yang merupakan langkah langkah untuk merumuskan program indikatif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya disusun arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun 2021 - 2026.

Perumusan Strategi

Rumusan strategi bidang kesehatan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Tabel 5.1 (T-C.26)

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI	:	Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju		
MISI I	:	Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas manusia melalui pelayanan kesehatan dasar yang merata		Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata	Pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau
				Pelayanan kesehatan yang bermutu
				Pemenuhan kebutuhan, Distribusi dan pemerataan SDM kesehatan
				Tahun I, II,III,IV,V
				1. Peningkatan mutu yang berorientasi pada patient safety (akreditasi paripurna)
				2. Pengintegrasian program nasional (SDGs, TB MDR, VCT, Geriatri dan Pengarusutamaan gender (PUG)
3. Penguatan kerjasama, kelembagaan dan pendidikan				

		<p>4. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan penelitian yang berbasis pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan yang bersinergi dengan mutu pelayanan</p> <p>5. Peningkatan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan lembaga lainnya dalam proses pendidikan, penelitian dan pengembangan bidang pelayanan kesehatan</p>
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan	Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas
		Pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan guna menunjang pelayanan yang optimal
		Tahun I, II,III,IV,V
		1. Pengembangan dan pemenuhan pelayanan jantung
		2. Pengembangan pelayanan onkologi
		3. Pengembangan dan pemenuhan Instalasi Bedah Sentral
		4. Pengembangan dan pemenuhan Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPRS), Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)
		5. Pengembangan dan pemenuhan Instalasi Central Sterile Supply Department (CSSD)

	Meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat	Meningkatkan jaminan kesehatan bagi ibu hamil, bayi, balita dan status gizi masyarakat	Meningkatkan pelayanan Kesehatan bagi ibu dan bayi secara komprehensif pada saat mulai, remaja, hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir
			Meningkatkan peran serta lintas program dan lintas sektor terkait sehubungan penanganan kasus komplikasi pada maternal dan neonatal
			Melaksanakan <i>Ante Natal Care</i> terintegrasi, Program Perencanaan Persalinan dan Penanganan Komplikasi (P4K), Pemanfaatan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) melalui pemberdayaan masyarakat dengan pelibatan kader kesehatan
			Mengembangkan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak
			Percepatan penurunan stunting melalui intervensi spesifik dan sensitif terintegrasi
			Penanganan gizi kurang dan gizi buruk khususnya bagi bayi dan balita
Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan	Meningkatkan kapasitas SDM Kesehatan	Pemenuhan kebutuhan, distribusi mutu dan pemerataan SDM Kesehatan	
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana alat kesehatan	Meningkatkan penyediaan dan mutu alat kesehatan	Pemenuhan alat kesehatan serta kalibrasi berkala	
Meningkatnya upaya	Meningkatkan penemuan	Pelacakan kasus baru penyakit menular dan	

	<p>pengecahan penyakit menular, penyakit tidak menular, serta surveilans penyakit di masyarakat</p>	<p>kasus penyakit menular, penyakit tidak menular, serta upaya surveilans yang kuat</p>	<p>deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular</p> <p>Penyediaan layanan pengobatan bagi penduduk tertular maupun berisiko penyakit menular dan tidak menular</p> <p>Peningkatan surveilans penyakit</p>
			<p>Meningkatkan konsistensi perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah</p>
		<p>Meningkatkan Kualitas Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan</p>	<p>Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan</p> <p>Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan</p> <p>Meningkatnya Kapasitas Sumber daya Manusia dalam pelayanan rumah sakit</p> <p>Tercapainya Akreditasi paripurna</p>
<p>MISI 2 : Mewujudkan reformasi birokrasi, supermasi hukum, dan penegakkan nilai - nilai kemanusiaan HAM</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Inovatif dan Kolaboratif</p>	<p>Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Efisien</p>	<p>Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p>	<p>Meningkatkan pengawasan Pelaksanaan pembangunan secara konsisten dan Komprehensif</p>
		<p>Meningkatkan Penataan Organisasi dan Tatalaksana</p>	<p>Melaksanakan penataan organisasi perangkat daerah (SOTK) yang tepat Fungsi</p>
		<p>Meningkatkan Kapasitas dan</p>	<p>Meningkatkan kapasitas SDM aparatur melalui</p>

		Kompetensi Aparatur Pemerintah	pengembangan kompetensi ASN
			Pembinaan disiplin dan evaluasi kinerja ASN
			Menyelenggarakan pengembangan dan sertifikasi kompetensi teknis
MISI 8 : Meningkatkan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan dan Kesehatan Berbasis pada Teknologi Informasi yang Integrasi dan Dijalankan secara Sistematis dan Digital			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tercapainya pemenuhan standar pelayanan minimal bidang kesehatan dan perizinan farmasi, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat	Meningkatnya pelayanan kesehatan penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana	Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana	Penyediaan pelayanan gratis bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana
			Penyediaan pelayanan kesehatan kegawatdaruratan (PSC119)
	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Penyediaan pemetaan dan faktor risiko Kejadian Luar Biasa (KLB) berbasis elektronik
			Peningkatan pelayanan pencegahan penyakit/imunisasi
	Meningkatnya pelayanan perizinan farmasi dan obat tradisional	Meningkatkan kualitas pelayanan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Pedagang Besar Farmasi (PBF)	Penyediaan dan pengelolaan data perizinan berbasis elektronik
			Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF)
	Meningkatnya peran serta masyarakat	Meningkatkan upaya kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan berdasarkan siklus kehidupan

	<p>dalam upaya kesehatan bersumber daya masyarakat</p>	<p>bersumber daya masyarakat</p>	<p>Penyediaan pelayanan kesehatan bagi lansia, dan penyakit tidak menular</p> <hr/> <p>Membudayakan PHBS dan melaksanakan kampanye GERMAS</p> <hr/> <p>Meningkatkan upaya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)</p> <p>Meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakit</p> <p>Meningkatnya kualitas pelayanan dan manajemen rumah sakit</p>
--	--	----------------------------------	---

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU APBD 2024 (SEBELUM PERUBAHAN)	PAGU APBD 2024 (SETELAH PERUBAHAN)
1	2	3	4
	DINAS KESEHATAN	230,640,182,029	236,066,971,430
1	SEKRETARIAT	176,398,283,965	177,437,460,301
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	175,488,284,287	176,522,460,773
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	724,390,000	1,163,442,000
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	604,390,000	1,043,442,000
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	120,000,000	120,000,000
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	169,610,554,133	168,655,768,101
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	164,233,663,233	163,172,564,401
	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4,957,680,000	4,986,804,800
	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	210,639,750	287,827,750
	4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKP	111,795,500	111,795,500
	5 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	96,775,650	96,775,650
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	230,788,800	265,744,800
	1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	76,544,800	76,544,800
	2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	154,244,000	189,200,000
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	241,604,000	624,146,000
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		222,330,000
	2 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	121,461,000	121,461,000

	3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	120,143,000	280,355,000
	5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	710,515,445	1,086,490,995
	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	710,515,445	1,086,490,995
	6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	655,031,344	1,395,968,312
	1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	345,038,000	899,390,499
	2 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
	3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	309,993,344	496,577,813
	7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,959,256,850	1,969,756,850
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	794,656,850	794,656,850
	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,164,600,000	1,175,100,000
	8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,356,143,715	1,361,143,715
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	436,000,000	441,000,000
	2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	639,920,236	639,920,236
	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	280,223,479	280,223,479
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	909,999,678	914,999,528
	1 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	200,000,000	200,000,000
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	200,000,000	200,000,000
	2 Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	709,999,678	714,999,528
	1 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	709,999,678	714,999,528

2	BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	2,762,610,230	3,282,656,555
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2,162,609,880	2,362,610,000
	1 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2,162,609,880	2,362,610,000
	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	395,671,490	395,671,700
	2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	239,999,790	239,999,800
	3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	159,999,850	159,999,850
	4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	686,939,150	686,939,150
	5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	160,000,000	160,000,000
	6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	240,000,000	240,000,000
	7 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	159,999,900	359,999,800
	8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	119,999,700	119,999,700
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	600,000,350	920,046,555
	1 Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	280,000,150	384,878,300
	1 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	280,000,150	384,878,300
	2 Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	160,000,200	160,000,205
	1 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	160,000,200	160,000,205
	3 Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	160,000,000	375,168,050
	1 Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	160,000,000	375,168,050
3	BIDANG PELAYANAN KESEHATAN	42,627,354,218	44,724,119,002

	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	42,627,354,218	44,724,119,002
	1 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	42,467,354,468	44,514,119,452
	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	123,483,700	190,632,900
	2 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	40,159,999,950	41,519,336,400
	3 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1,864,529,850	2,344,228,750
	4 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	160,000,000	300,580,350
	5 Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	159,340,968	159,341,052
	2 Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	159,999,750	209,999,550
	1 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	159,999,750	209,999,550
4	BIDANG KEFARMASIAN, SARANA ALAT KESEHATAN DAN SDM KESEHATAN	4,530,520,550	5,321,520,950
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3,360,522,000	3,660,562,000
	1 Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	3,360,522,000	3,660,562,000
	1 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	450,009,650	450,009,650
	2 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	2,910,512,350	3,210,552,350
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	609,999,850	954,909,850
	1 Kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	609,999,850	954,909,850
	1 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang Pak	609,999,850	954,909,850

	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	559,998,700	706,049,100
1	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	279,999,500	426,049,500
	1 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	159,999,700	306,049,700
	2 Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	119,999,800	119,999,800
2	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	279,999,200	279,999,600
	1 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	159,999,300	159,999,700
	2 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	119,999,900	119,999,900
5	BIDANG PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT, SURVEILANS DAN IMUNISASI	4,321,413,066	5,301,214,622
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4,321,413,066	5,301,214,622
1	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	4,321,413,066	5,301,214,622
	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1,504,875,000	1,504,875,000
	2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2,108,777,416	2,818,638,972
	3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	110,514,000	241,383,650
	4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	100,000,150	219,130,500
	5 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	297,385,000	317,325,000
	6 Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	199,861,500	199,861,500
	UPT LABORATORIUM KESEHATAN	2,900,600,000	3,678,600,000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2,419,915,750	2,434,760,250

	1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	42,600,000	42,600,000
	1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42,600,000	42,600,000
	2 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	42,440,000	48,339,750
	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42,440,000	48,339,750
	3 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,919,318,400	1,908,418,400
	2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,919,318,400	1,908,418,400
	4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	313,581,850	316,582,100
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	313,581,850	316,582,100
	5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101,975,500	118,820,000
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48,320,000	52,320,000
	2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10,000,000	15,000,000
	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43,655,500	51,500,000
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	480,684,250	1,243,839,750
	1 Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	480,684,250	1,243,839,750
	1 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	480,684,250	1,243,839,750
	UPT BADAN PENDIDIKAN PELATIHAN KESEHATAN	578,125,145	2,511,084,939
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	578,125,145	1,820,980,124
	1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	55,560,000	155,555,000
	1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	55,560,000	155,555,000
	2 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	74,234,812	648,618,536

	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74,234,812	648,618,536
3	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	413,567,300
	1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		413,567,300
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	394,650,333	278,559,288
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	394,650,333	278,559,288
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53,680,000	324,680,000
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		91,000,000
	2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		33,600,000
	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53,680,000	200,080,000
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	690,104,815
1	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	690,104,815
	1 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		690,104,815
	UPT PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU	607,029,749	836,551,749
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	272,633,899	220,593,899
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	52,560,000	33,160,000
	1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52,560,000	33,160,000
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	99,212,400	70,122,000
	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99,212,400	70,122,000
3	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24,993,999	24,804,399

	1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24,993,999	24,804,399
	4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6,917,500	3,557,500
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6,917,500	3,557,500
	5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88,950,000	88,950,000
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53,950,000	53,950,000
	2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35,000,000	35,000,000
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	334,395,850	615,957,850
	1 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	334,395,850	615,957,850
	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Berpotensi Bencana	115,828,950	139,538,950
	2 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	121,717,250	379,569,250
	3 Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	96,849,650	96,849,650
	JUMLAH ANGGARAN DINAS KESEHATAN	234,725,936,923	243,093,208,118
	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA	196,949,904,068	245,181,337,295
	1 APBD	32,990,174,617	45,578,945,177
	2 BLUD	163,959,729,451	199,602,392,118
	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MADANI	113,576,800,000	130,581,110,270
	1 APBD	13,576,800,000	16,500,800,000
	2 BLUD	100,000,000,000	114,080,310,270
	TOTAL ANGGARAN KESEHATAN	545,252,640,991	618,855,655,683

2.4 Indikator Kinerja Utama

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan komitmen pimpinan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dilaksanakan merujuk pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Salah satu tujuan Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dengan penerima amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai evaluasi kinerja aparatur. Perjanjian kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah dengan Pjs. Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 11 November 2024. Adapun Perjanjian Kinerja dimaksud terdapat pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUN GJAWAB
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Rata-rata jumlah tahun kehidupan yang masih dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu	BPS	<ul style="list-style-type: none">• Bidang Kesehatan Masyarakat• Bidang Pelayanan Kesehatan• Bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit

2.5 Peranjanjian Kinerja



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. I KOMANG ADI SUJENDRA,Sp.PD
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tengah
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dra. NOVALINA, MM
Jabatan : Pjs. Gubernur Sulawesi Tengah
Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 11 NOVEMBER 2024

PIHAK KEDUA
Pjs. GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Dra. NOVALINA, MM

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

dr. I KOMANG ADI SUJENDRA,Sp.PD
NIP. 19650325 199003 1 014



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. I KOMANG ADI SUJENDRA,Sp.PD
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tengah
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dra. NOVALINA, MM
Jabatan : Pjs. Gubernur Sulawesi Tengah
Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 11 NOVEMBER 2024

PIHAK KEDUA
Pjs. GUBERNUR SULAWESI TENGAH



Dra. NOVALINA, MM

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



dr. I KOMANG ADI SUJENDRA,Sp.PD
NIP. 19650325 199003 1 014

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	71

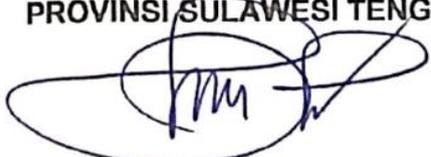
No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	176,522,460,773	APBD.P
2	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	56,963,505,152	APBD.P
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	706,049,100	APBD.P
4	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	954,909,850	APBD.P
5	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	920,046,555	APBD.P
	JUMLAH	236,066,971,430	

Palu, 11 NOVEMBER 2024

**PIHAK KEDUA
Pjs. GUBERNUR SULAWESI TENGAH**


Dra. NOVALINA, MM

**PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


dr. I KOMANG ADI SUJENDRA, Sp.PD
 NIP. 19650325 199003 1 014

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah menuju upaya pencapaian visi dan misi yaitu Menjadikan Provinsi Sulawesi Tengah Seajar Dengan Provinsi Maju di Kawasan Timur Indonesia, maka peranan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pembuat kebijakan dan penanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan kesehatan wajib memberikan dukungan, pembinaan dan pengawasan di Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dapat menguraikan secara singkat muatan/substansi dari Perjanjian Kinerja tahun anggaran 2024 serta kaitannya dengan dokumen Renstra/RPJMD.

Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026. Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.

Kinerja birokrasi pelayanan publik instansi pemerintah seperti halnya Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, menjadi isu kebijakan yang makin strategis karena perbaikan kinerja birokrasi memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan masyarakat, baik dari sisi ekonomi, politik dan sosial. Perbaikan kinerja birokrasi pelayanan di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan akan meningkatkan *image* Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai SKPD yang mempunyai kualitas yang tinggi dalam bidang pelayanan Kesehatan dan pelayanan di bidang lainnya. Dengan demikian, masyarakatpun tidak akan segan untuk menyerahkan kepercayaan mereka kepada Dinas Kesehatan dalam meningkatkan mutu kesehatan.

Dalam rangka mewujudkan perbaikan kinerja birokrasi, sebuah lembaga pemerintah dituntut untuk mempunyai arah dan tujuan yang jelas untuk dicapai. Hal ini akan mempermudah lembaga tersebut untuk

menentukan apa saja yang harus dipersiapkan, langkah apa yang harus ditempuh, bagaimana cara melakukannya dan sampai berapa tahun semua itu dapat diwujudkan. Demikian juga halnya dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, dalam upaya memberikan kejelasan arah dan tujuan yang ingin diraih, telah ditetapkan Rencana Strategi selama 5 tahun ke depan periode 2021-2026.

Renstra yang telah disusun tidak hanya sekedar menjadi koleksi, atau menambah perbendaharaan dokumen yang wajib dimiliki, akan tetapi memiliki tanggungjawab yang besar untuk dapat diimplementasikan serta dievaluasi sejauh mana pencapaian yang telah diraih. Artinya ketika tekad untuk mencapai kemajuan dituangkan dalam sebuah dokumen, mau tidak mau harus dilakukan evaluasi dan tinjauan ulang sejauh mana semua tekad tersebut telah dicapai. Jika tercapai seberapa besar persentasenya, begitu sebaliknya apabila tidak tercapai mengapa belum tercapai, rintangan dan hambatan apa yang terjadi. Untuk mengukur pencapaian renstra tersebut pemerintah telah menyusun sebuah standar baku pengukuran bagi lembaga pemerintah yang disebut dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, disebutkan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang:

- a. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
- b. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi
- c. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan
- d. Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Sesuai dengan Peraturan Men PAN dan RB di atas dan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai perkembangan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dalam memperoleh dan mencapai kinerja selama tahun 2024, di bawah ini akan diuraikan secara rinci pencapaian sasaran kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Diharapkan uraian berikut dapat

memberikan informasi dan gambaran yang akurat bagi pihak yang berkepentingan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan untuk pengembangan bidang kesehatan di masa yang akan datang.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1.	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat - Meningkatkan akses serta kuantitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	69.1	70.08	101.41	Sangat Tinggi	BPS

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan capaian indikator kinerja Usia Harapan Hidup sebesar 70.08 telah mencapai target 69.1 dengan persentase capaian 101.41%. Berdasarkan rilis Desember 2023 Usia Harapan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 69.42 telah mencapai target 69.01.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat - Meningkatkan akses serta kuantitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	68.8	69.42	100.90	69.01	69.42	100.59	69.1	78.08	101.41

Tabel diatas menunjukkan realisasi kinerja tujuan dan sasaran selama 3 tahun berturut-turut sejak tahun 2022 sampai dengan 2024.

Pada tahun 2024, Dinas Kesehatan telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Daerah, ada 2 (dua) tujuan Dinas Kesehatan yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator Usia Harapan Hidup (UHH). Tren Usia arapan hidup selama 3 tahun berturut-turut selalu meningkat. Dan apabila dibandingkan dengan target, Usia Harapan Hidup (UHH) tahun 2024 telah mencapai target dengan persentase capaian 78.08%. Upaya yang telah dilakukan adalah peningkatan akses serta kuantitas kesehatan masyarakat dengan pemberian jaminan kesehatan untuk orang miskin, akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, peningkatan kepatuhan petugas terhadap SOP, pemenuhan sarana prasarana dan peningkatan kompetensi SDM, implementasi PHBS dan Germas di semua sektor dan akselerasipencapaian kabupaten kota sehat.

c. Membandingkan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka panjang menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6 = 4/5*100
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat - Meningkatkan akses serta kuantitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	78.08	80.01	97.58

Tabel diatas menunjukkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra. Dari indikator kinerja tujuan telah tercapai namun belum mencapai target akhir tahun 2026 yaitu capaian di tahun 2024 sebesar 70.08%, sedangkan target akhir renstra 2026 sebesar 80.01%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan strandar Nasional

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realiasi Tahun 2024	Standar Nasional	Capaian %
1	2	3	4	5	6 = 4/5*100
1.	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat - Meningkatkan akses serta kuantitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	70.08	72.50	96.66

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Usia Harapan Hidup, capaian tahun 2024 sebesar 70.08% jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 72.50% Belum mencapai target nasional dengan persentase capaian 96.66%. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tetap berupaya agar kedepannya dapat mencapai target nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Umur Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Jika dibandingkan target usia harapan hidup/angka harapan hidup pada tahun 2024 sudah mencapai target yaitu 70.08. Interpretasi dari angka kelahiran hidup ini adalah seorang bayi yang di lahirkan di provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 20224 mempunyai harapan untuk hidup selama 70.08 tahun kedepan.

Indikator Usia Harapan Hidup Ini merupakan kerberhasilan program bidang kesehatan. Yang mana bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan dalam pencapaiannya melainkan menjadi tanggung jawab kita bersama antara unsur pemerintah, swasta, akademisi serta masyarakat secara keseluruhannya.

Keberhasilan Umur Harapan Hidup (UHH) di Sulawesi Tengah dapat disebabkan oleh beberapa faktor utama yang berkontribusi pada peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut beberapa penyebab keberhasilannya:

- a. Peningkatan Akses Layanan Kesehatan
 - Pemerintah daerah meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, Rumah Sakit, dan Posyandu.
 - Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang memperluas cakupan layanan kesehatan bagi masyarakat.
 - Penyediaan tenaga medis di daerah terpencil melalui program penempatan dokter dan bidan.
- b. Program Gizi dan Kesehatan Ibu-Anak
 - Upaya mengurangi angka stunting dan gizi buruk melalui program pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan balita.
 - Meningkatnya kesadaran akan ASI eksklusif, yang berdampak baik pada kesehatan bayi dan anak-anak.
 - layanan persalinan dengan bantuan tenaga medis yang lebih baik.
- c. Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
 - Program vaksinasi yang semakin luas untuk mencegah penyakit menular seperti campak, TBC, dan malaria.
 - Edukasi mengenai pola hidup sehat untuk mencegah penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi.
 - Kampanye anti-rokok dan gaya hidup sehat untuk mengurangi risiko penyakit kronis.
- d. Perbaikan Sanitasi dan Akses Air Bersih
 - Meningkatnya pembangunan infrastruktur sanitasi dan akses air bersih di berbagai daerah.
 - Kampanye pola hidup bersih untuk mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan.
- e. Penanganan Cepat dalam Situasi Darurat
 - Setelah bencana gempa dan tsunami 2018, banyak program rehabilitasi dan bantuan kesehatan yang mempercepat pemulihan kesehatan masyarakat.
Keberhasilan peningkatan UHH di Sulawesi Tengah merupakan hasil dari kombinasi intervensi kesehatan, peningkatan kesejahteraan ekonomi, serta kesadaran masyarakat yang lebih baik terhadap kesehatan.
Sulawesi Tengah telah menerapkan berbagai alternatif solusi untuk

meningkatkan Umur Harapan Hidup (UHH). Berikut beberapa solusi yang telah dilakukan:

- a. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan
 - Pembangunan dan revitalisasi fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, Puskesmas, dan Posyandu di daerah terpencil.
 - Penyediaan tenaga medis melalui program penempatan dokter, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya.
 - Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memperluas cakupan layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
- b. Pencegahan dan Penanganan Penyakit
 - Vaksinasi dan imunisasi untuk menekan angka penyakit menular seperti campak, TBC, dan malaria.
 - Kampanye pola hidup sehat untuk mengurangi kasus penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes.
 - Penyuluhan tentang kesehatan reproduksi untuk menekan angka kematian ibu dan bayi.
- c. Perbaikan Gizi dan Kesehatan Ibu-Anak
 - Program pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita dan ibu hamil guna mengatasi stunting dan gizi buruk.
 - Edukasi ASI eksklusif untuk meningkatkan kesehatan bayi.
 - Layanan persalinan yang lebih baik, termasuk pelatihan bidan desa dan penyediaan fasilitas bersalin yang memadai.
- d. Peningkatan Sanitasi dan Akses Air Bersih
 - Pembangunan sistem sanitasi yang lebih baik di desa-desa untuk mencegah penyakit berbasis lingkungan.
 - Program air bersih untuk memastikan masyarakat memiliki akses ke sumber air yang sehat.
- e. Peningkatan Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat
 - Penyuluhan kesehatan melalui sekolah, komunitas, dan media sosial untuk meningkatkan pemahaman tentang pola hidup sehat.
 - Program pendidikan gizi dan kebersihan diri sejak dini.
- f. Penanganan Pasca Bencana untuk Pemulihan Kesehatan
 - Setelah gempa dan tsunami 2018, pemerintah dan organisasi kemanusiaan

menyediakan layanan kesehatan gratis, bantuan psikososial, serta program rehabilitasi untuk masyarakat terdampak.

- Pembangunan kembali fasilitas kesehatan dan perumahan yang lebih tahan bencana untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap optimal.

Berbagai langkah ini menunjukkan bahwa Sulawesi Tengah tidak hanya fokus pada pengobatan, tetapi juga pada pencegahan, edukasi, dan peningkatan kesejahteraan, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH).

Dokumentasi kegiatan yang mendukung tercapainya Usia Harapan Hidup Pemberian Makanan Tambahan pada Ibu Hamil



Pemberian Makanan Tambahan Balita



Kegiatan Konseling Menyusui



Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA) Ibu Hamil



Dokumentasi Kunjungan Rumah Bagi ODGJ Pasca Pasung di Kabupaten Banggai Laut



Rapat Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program masalah Kesehatan Jiwa Di Provinsi Sulawesi Tengah



Kegiatan Ketuk Pintu



Kegiatan Deteksi Dini (Skrining TBC)



Penyisiran Kasus TBC di RS



Kegiatan Penanganan Gizi Buruk di Community Feeding Centre (CFC)



Praktek Pembuatan Formula untuk balita gizi buruk



f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat - Meningkatkan akses serta kuantitas kesehatan masyarakat	69.1	78.08	101.41	Rp. 21.409.693.622	Rp. 17.894.753.784	83.58	17.83

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan alokasi anggaran APBD sebesar Rp. 21.409.693.622 realisasi Rp. 17.894.753.784 (83.58%). Alokasi tersebut digunakan untuk pencapaian target indikator Usia Harapan Hidup, anggaran untuk pencapaian target Usia Harapan Hidup sebesar Rp. 21.409.693.622 realisasi Rp17.894.753.784 (83.58%).

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
					Kinerja	Kinerja	Kinerja	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatkan akses serta kuantitas kesehatan masyarakat	Angka Kematian Bayi	Angka	4.41	7.46	169.16	Sangat Tinggi
	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	Angka	6.52	7.57	116.10	Sangat Tinggi
			Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	Angka	4.5	6.8	151.11	Sangat Tinggi
			Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Angka	106.49	183	171.85	Sangat Tinggi
			Angka keberhasilan pengobatan TBC (<i>Success Rate</i>)	%	90	81	90.00	Tinggi
			Insiden Rate DBD	%	8	10	125.00	Sangat Tinggi
			Persentase Orang dengan HIV (ODHIV)	%	90	91	101.11	Sangat Tinggi
			Persentase Puskesmas yang terakreditasi	%	100	100	100.00	Sangat Tinggi
			Persentase Anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	93.07	80.7	86.71	Tinggi
			Persentase bayi usia 0 - 11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	%	94.6	80.5	85.10	Sedang

			Persentase anak usia 18 - 24 bulan yang mendapatkan imunisasi lanjutan campak rubela	%	90.3	32.7	36.21	Sangat Rendah
--	--	--	--	---	------	------	-------	---------------

Angka Kematian Bayi

Trend angka kematian bayi di Provinsi Sulawesi Tengah selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa AKB selama 3 tahun terakhir tidak jauh berbeda, tahun 2022 dan 2023 sebesar 7,5 per 1000 KH mengalami penurunan meskipun hanya sedikit menjadi 7,46 per 1000 KH pada tahun 2024.

Permasalahan:

- Kondisi sosial, ekonomi dan pendidikan keluarga yang mempengaruhi tingkat kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir
- Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang belum memadai dalam penanganan kasus komplikasi yang ada pada bayi baru lahir
- Belum semua tenaga kesehatan di tingkat pelayanan dasar terpapar dengan kompetensi dalam penanganan kegawatdaruratan neonatal
- Pelaksanaan pelayanan antenatal care yang didapatkan oleh ibu hamil dan keluarga belum sesuai standar

Upaya Pemecahan Masalah:

- Pelaksanaan Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pada ibu hamil dan keluarga akan pentingnya pemeriksaan Kesehatan selama

kehamilan

- b) Pemenuhan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan penanganan kegawatdaruratan neonatal
- c) Peningkatan kapasitas petugas dalam memberikan pelayanan kebidanan
- d) Peningkatan kualitas pelayanan antenatal care sesuai standar minimal 6 kali selama kehamilannya (10 T + USG 2 kali yang dilakukan oleh dokter umum /obygn pada kunjungan pertama dan kelima)

Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup

Trend angka kematian balita di Provinsi Sulawesi Tengah selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa AKABA selama 3 tahun terakhir mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 7,9 per 1000 KH, menjadi 7,8 per 1000 KH tahun 2023 dan 7,57 per 1000 KH tahun 2024.

Permasalahan:

- a) Penanganan komplikasi kegawatdaruratan pada balita yang belum maksimal
- b) Kunjungan balita yang tidak dilaksanakan secara rutin oleh keluarga ibu balita khususnya pelayanan Kesehatan diposyandu
- c) Kegiatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan Gizi Buruk belum dilakukan sesuai standar

Upaya Pemecahan Masalah:

- a) Peningkatan kompetensi dan pengawasan kegawatdaruratan oleh petugas Kesehatan dalam pelayanan kebidanan
- b) Edukasi pada keluarga balita tentang pentingnya pemantauan Kesehatan balita]]
- c) Kalakarya Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan Gizi Buruk pada petugas kesehatan pada fasilitas pelayanan Kesehatan

Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup

Trend angka kematian balita di Provinsi Sulawesi Tengah selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa Angka Kematian Neonatal (AKN) selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun 2022 dan 2023 sebesar 5,9 per 1000 KH menjadi 6,77 (6,8) per 1000 KH pada tahun 2022 dan 2023.

Permasalahan:

- a) Kondisi sosial, ekonomi dan pendidikan keluarga yang mempengaruhi tingkat kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir
- b) Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang belum memadai dalam penanganan kasus komplikasi yang ada pada bayi baru lahir
- c) Belum semua tenaga kesehatan di tingkat pelayanan dasar terpapar dengan kompetensi dalam penanganan kegawatdaruratan neonatal
- d) Pelaksanaan pelayanan antenatal care yang didapatkan oleh ibu

hamil dan keluarga belum sesuai standar

Upaya Pemecahan Masalah:

- a) Pelaksanaan Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pada ibu hamil dan keluarga akan pentingnya pemeriksaan Kesehatan selama kehamilan
- b) Pemenuhan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan penanganan kegawatdaruratan neonatal
- c) Peningkatan kapasitas petugas dalam memberikan pelayanan kebidanan
- d) Peningkatan kualitas pelayanan antenatal care sesuai standar minimal 6 kali selama kehamilannya (10 T + USG 2 kali yang dilakukan oleh dokter umum /obygn pada kunjungan pertama dan kelima)

Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Realisasi Angka Kematian Ibu di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2024 sebesar 123,57 per 100000 KH dengan jumlah kasus kematian ibu sebanyak 68 kasus dengan 3 kabupaten terbanyak jumlah kasusnya yaitu di kabupaten Parigi Moutong sebanyak 13 kasus, di Sigi sebanyak 10 kasus dan kabupaten Donggala dan Kabupaten Banggai masing-masing sebanyak 8 kasus. Angka Kematian Ibu tahun 2024 ini mengalami fluktuasi, yaitu pada tahun 2022 sebesar 127,94 per 100000 KH, mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 108,12 . Jika dibandingkan dengan target AKI Nasional di tahun 2024 sebesar 183 per 100.000 KH itu berarti bahwa AKI Provinsi Sulawesi Tengah sudah berada di bawah target nasional.

Indikator angka dan jumlah kematian ibu merupakan indikator negatif dimana bila semakin banyak kasus yang terjadi berarti masih diperlukan penguatan dalam penurunan angka kematian ibu.



Permasalahan:

- a) Masih tingginya 3 terlambat dalam penanganan komplikasi ibu hamil yaitu adanya terlambat mencari pertolongan di tingkat keluarga, adanya terlambat mendapatkan fasilitas kesehatan rujukan di tingkat FKTP, dan adanya terlambat mendapatkan penanganan sesuai standar di tingkat FKTL.
- b) Kepesertaan BPJS yang masih menjadi kendala dalam proses rujukan
- c) Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon belum dilaksanakan secara optimal khususnya pada penggunaan aplikasi MPDN dalam pencatatan dan pelaporan kematian ibu
- d) Pemantauan terhadap tindak lanjut dari hasil kajian kematian ibu belum dilaksanakan secara menyeluruh oleh pihak terkait
- e) Pemanfaatan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) tidak maksimal
- f) Pelaksanaan skrining layak hamil belum maksimal

Upaya Pemecahan Masalah:

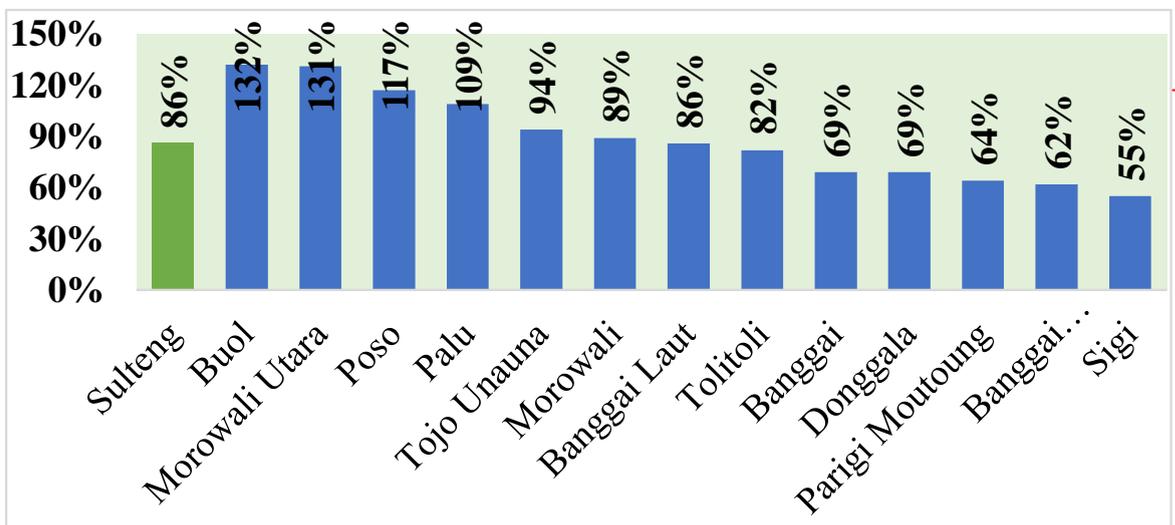
- a) Menerapkan strategi persalinan di fasilitas kesehatan yang berkualitas,
- b) Memaksimalkan Kerjasama dengan pihak BPJS dalam rangka proses rujukan komplikasi kebidanan
- c) Kordinasi dan integrasi dengan pihak terkait dalam hal pelaksanaan MPDN
- d) Penyusunan perencanaan program didasarkan pada hasil kajian audit kematian ibu untuk mencapai intervensi yang komperhensif

- e) peningkatan kualitas rumah tunggu dan peningkatan kualitas pelayanan antenatal care, nifas dan kunjungan neonatal, serta emergency respon, penguatan unit transfusi darah,
- f) kolaborasi antara lintas program dan lintas sektor terkait dalam upaya pelaksanaan skrining layak hamil

Cakupan penemuan kasus TBC (*Treatment Coverage*)

Cakupan penemuan kasus TBC adalah jumlah semua kasus TB yang ditemukan dan dilaporkan diantara perkiraan kasus TBC

Cakupan Penemuan Kasus TBC (*Treatment Coverage*) Kab/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024



Sumber Data : SITB (Sistem Informasi Tuberkulosis) tahun 2024

Grafik diatas menunjukkan capaian penemuan kasus TBC kab/kota tahun 2024. Terlihat Lima kabupaten telah mencapai target penemuan, yaitu Kab. Buol, Morowali Utara, Poso, Kota Palu dan Kab. Tojo Unauna. Kabupaten mencapai target penemuan kasus dengan didukung kegiatan penemuan aktif TBC berupa Deteksi Dini ditempat berisiko dan kegiatan Investigasi Kontak dan serta adanya kebijakan layanan BPJS di Rumah Sakit yaitu pasien TBC dapat dilakukan klaim BPJS jika pasien TBC tersebut telah memiliki nomor registrasi di SITB. Cakupan penemuan kasus TBC di Sulawesi Tengah tahun 2024 meningkat 19% dibandingkan tahun 2023 yaitu dari 67% menjadi 86% namun belum mencapai target 90%, beberapa kendala yang ditemukan sebagai berikut :

- a) Masih terdapatnya kasus TBC *under reporting* di layanan swasta DPM/klinik.
- b) Kegiatan penemuan aktif (investigasi kontak, skrining ditempat berisiko) belum dilakukan optimal disemua dilayanan puskesmas
- c) Masih terdapatnya kabupaten yang belum tersedia layanan TBC RO, yaitu kabupaten Sigi, Kab. Banggai Laut dan Kabupaten Tojo Unauna
- d) Masih terdapatnya layanan yang belum melaporkan kasus TBC (*delay reporting*)
- e) Jejaring internal fasyankes belum terkoordinasi baik antara petugas TBC dan program/unit lain disebagian besar fasyankes.

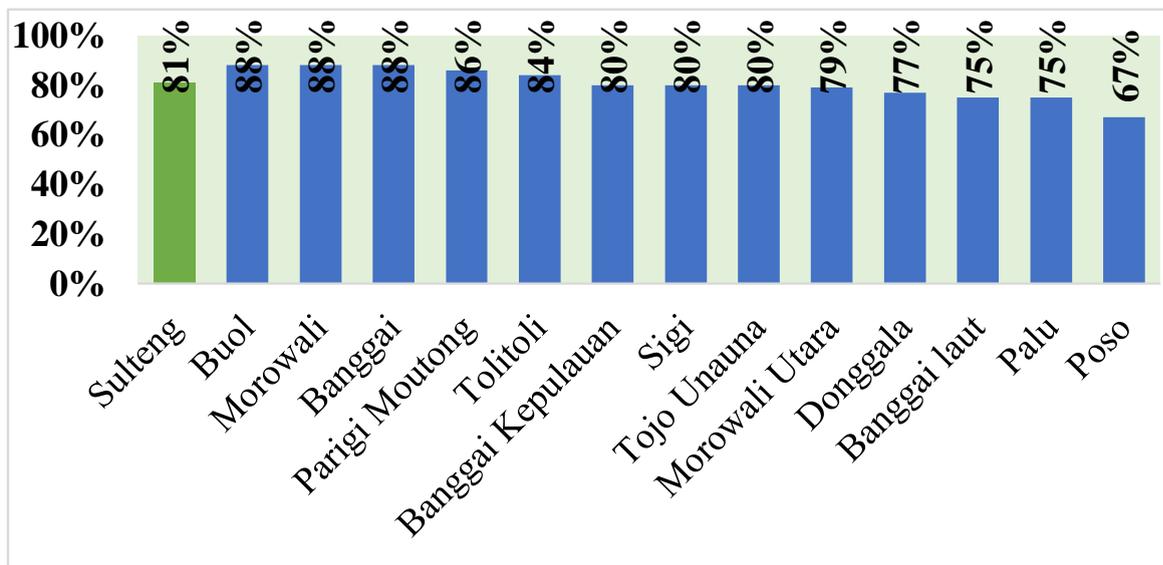
Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian Treatment Coverage TBC, yaitu sebagai berikut :

- a) Validasi Data TBC Fasyankes di Kab/Kota yang prioritas untuk pendampingan (kota Palu, Sigi, Parigi, Poso, Touna, Morowali, Morowali Utara, Tolitoli, dan Buol)
- b) Evaluasi capaian secara rutin setiap bulan (per tgl 5-10 diawal bulan) yang diumpun balik ke kab/kota
- c) Kegiatan penemuan aktif berupa pemeriksaan kontak pasien TB (Investigasi Kontak) yang didukung pembiayaan BOK PKM
- d) OJT klinik, DPM, RS Swasta dalam pelaporan SITB
- e) Pelatihan petugas TB FKTP yang terakreditasi (Sigi, Donggala, Parigi, Touna, Morut, Banggai, Balut, Bangkep dan Tolitoli)
- f) Pelatihan petugas TB FKTRL yang terakreditasi (1 Angkatan)
- g) Koordinasi tim logistik pusat untuk pemenuhan logistik P2TB
- h) Penambahan alat diagnostik TBC yaitu TCM BDMax (Banggai) dan Trunet (Donggala dan Tolitoli)
- i) Tersedianya cartridge XDR sebagai pengganti LPA Lini 2 di 7 RS (Undata, Anutapura, Anuntaloko, Poso, Luwuk, Bungku, dan Mokopido)

Angka keberhasilan pengobatan TBC (*Success Rate*)

Angka keberhasilan pengobatan TBC adalah jumlah semua kasus TB yang sembuh dan pengobatan lengkap diantara semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan.

Angka Keberhasilan Pengobatan TBC SO (*Treatment Success Rate*)
Kab/Kota Sulawesi Tengah tahun 2024*



Sumber Data : SITB (Sistem Informasi Tuberkulosis) tahun 2024

Capaian keberhasilan pengobatan pasien TBC di Provinsi Sulawesi Tengah tidak mencapai target 90%, sebagian besar disebabkan oleh tingginya angka *lost to follow up* pasien TBC yaitu 9%.

Angka Keberhasilan Pengobatan TBC belum memenuhi target 90%, beberapa kendala yang dihadapi dalam tatalaksana pengobatan pasien TBC diantaranya:

- Pasien yang telah menyelesaikan pengobatan belum dilaporkan di SITB (4,4%)
- Follow up kemajuan pengobatan pasien sebagian besar tidak dilakukan pemeriksaan mikroskopis. Pasien dengan hasil

pengobatan lengkap (66%)

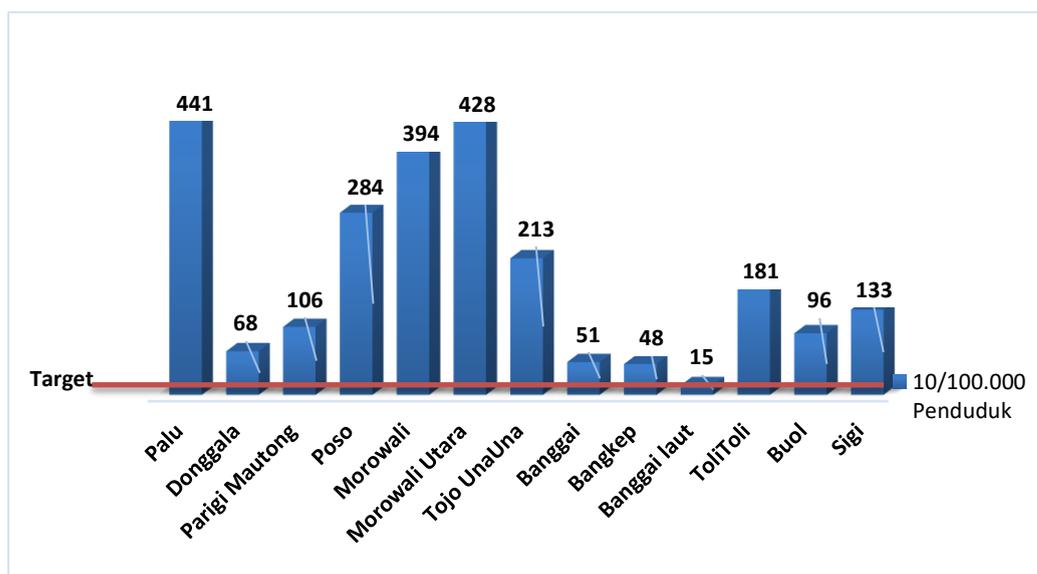
- c) Beberapa fasyankes keterbatasan tidak tersedia mikroskop sebagai alat pemeriksaan follow up pengobatan pasien
- d) Cukup tingginya pengobatan pasien TBC di RS yang tidak dirujuk balik ke FKTP meyebabkan petugas TBC RS sulit untuk memantau pengobatan pasien.
- e) Masa pengobatan yang lama membuat pasien jenuh, adanya efek samping obat, membuat pasien menghentikan pengobatan secara sepihak. Angka putus berobat 9%

Beberapa upaya yang dilakukan agar pasien TBC berhasil menyelesaikan pengobatannya, antara lain:

- a) Validasi data pengobatan pasien secara rutin dari Tingkat prov dan ditindak lanjuti oleh kab dan fasyankes
- b) Pembinaan laboratium mikroskopis oleh Labkesda Sulteng
- c) Pembinaan petugas TBC RS untuk merujuk pasien TBC ke FKTP, dan berkoordinasi dengan petugas TB FKTP sebelum pasien dirujuk
- d) Pelacakan kontak dan kasus mangkir pasien TBC
- e) Pemberian edukasi kepada pasien dan PMO tentang kepatuhan pasien minum obat

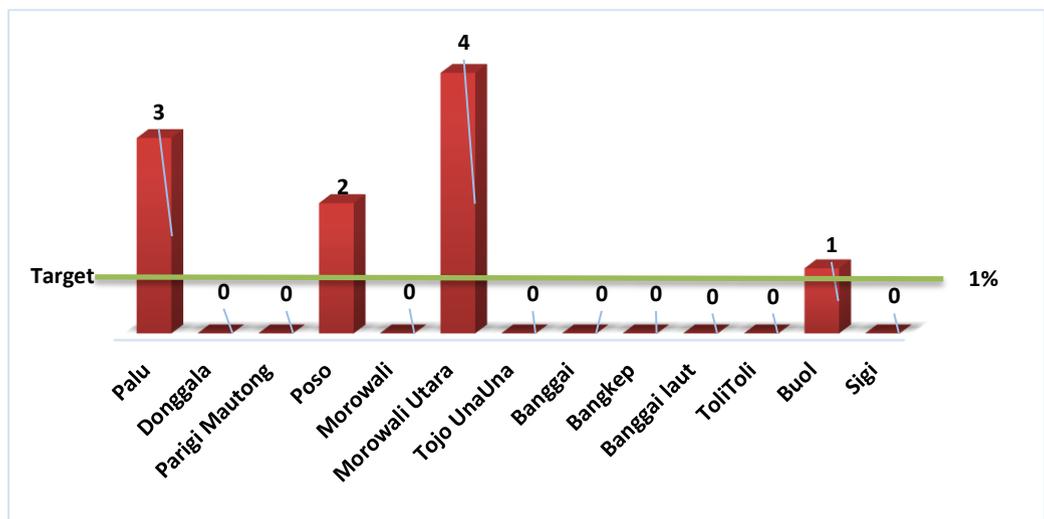
Insiden Rate DBD

Insiden Rate DBD Per Kabupaten/Kota Per 100.000 Penduduk di Sulawesi Tengah Tahun 2024



Berdasarkan grafik diatas dari 13 Kabupaten/Kota menunjukkan angka kesakitan Insident Rate (IR) yang paling tinggi dan melebihi dari target Renstra IR Sulawesi Tengah Tahun 2024 yaitu 10 per 100.000 penduduk adalah Kota Palu (441) dengan IR adalah 112,35 per 100.000 penduduk dan Morowali Utara (428) dengan IR 334,73 per 100.000 penduduk, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan kejadian penyakit Demam Berdarah Dengue yaitu kurangnya peran serta masyarakat dalam pengendalian DBD, terutama pada kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3 M Plus dan PHBS masih kurang dimana masih terlihat sampah-sampah dan barang-barang bekas yang menjadi tempat perindukkan nyamuk DBD, dan perubahan iklim yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu dimana terjadi pola musim hujan yang tidak beraturan yaitu terlihat bahwa disela musim panas sering terjadi hujan lokal dan hujan sesaat yang memberi peluang besar bagi berkembangnya vector penyebab DBD, dan ditambah kepadatan penduduk yang terus meningkat, sejalan dengan pembangunan kawasan pemukiman, urbanisasi yang tidak terkendali, lancarnya transportasi baik darat maupun laut. Walaupun dari dua Kabupaten/Kota yaitu Kota Palu, dan Kabupaten Morowali Utara kasus DBD masih diatas target Renstra Sulawesi Tengah (IR 10 per 100.000 penduduk) ditahun 2024.

Case Fatality Rate (CFR) per Kabupaten/Kota
Di provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024



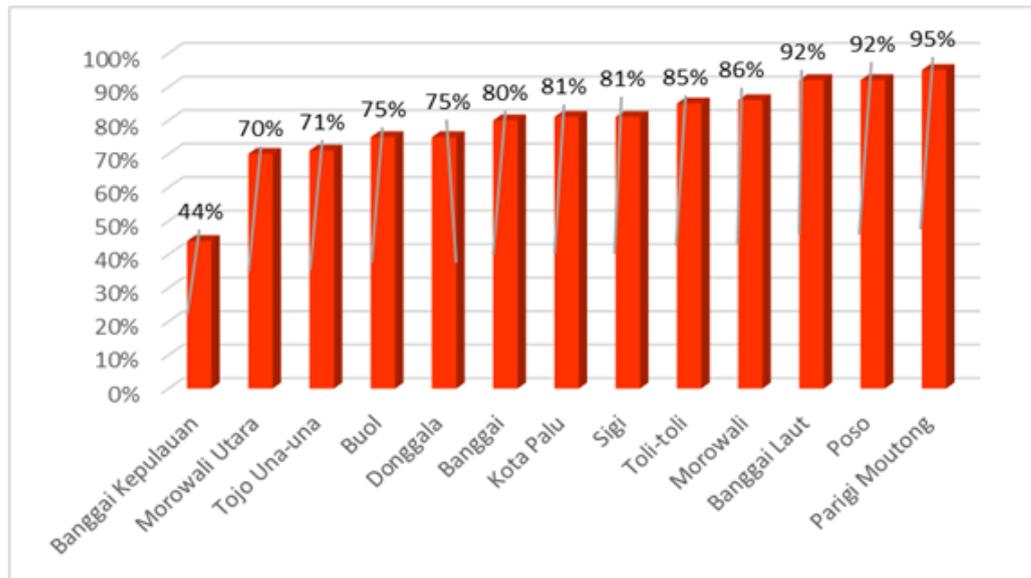
f)

Berdasarkan grafik diatas dari 13 Kabupaten/Kota menunjukkan angka kematian Case Fatality Rate (CFR) yang paling tinggi dan melebihi dari target CFR Sulawesi Tengah Tahun 2024 yaitu $\leq 1\%$ adalah Morowali Utara (4) dengan CFR adalah 0,93 %, Kota Palu (3) dengan CFR 0,68 % dan Kabupaten Poso (2) dengan CFR 0,70% , hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan kejadian penyakit Demam Berdarah Dengue yaitu kurangnya peran serta masyarakat dalam pengendalian DBD, terutama pada kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3 M Plus dan PHBS masih kurang dimana masih terlihat sampah-sampah dan barang-barang bekas yang menjadi tempat perindukkan nyamuk DBD dan perubahan iklim yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah.

Persentase Orang dengan HIV (ODHIV)

Realisasi Indikator Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART adalah 91%, realisasi tahun ini sdh mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 90%. Data dihitung berdasarkan SIHA yang di input oleh Laporan layanan perawatan, dukungan dan pengobatan (PDP) atau Care Support Treatment (CST) Adapun jumlah layanan perawatan dukungan dan pengobatan (PDP) di Provinsi Sulawesi Tengah adalah 29 layanan yang tersebar di 13 Kab/kota. Dari hasil rekapitulasi laporan layanan perawatan dukungan dan pengobatan pengobatan (PDP) pada tahun 2024, adalah 571 ODHIV baru yang mendapatkan pengobatan ARV.

Grafik Persentase ODHIV baru ditemukan mendapatkan pengobatan ARV berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2024



Grafik di atas menunjukkan bahwa dari 13 kabupaten kota di Sulawesi Tengah ada satu kabupaten yang Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART di bawah 70%. Adapun kabupaten dengan tingkat Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART terendah kabupaten Banggai kepulauan 44%.

Presentase Puskesmas yang terakreditasi

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dari pembangunan nasional, tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Keberhasilan pembangunan kesehatan berperan penting dalam meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan nasional diselenggarakan berbagai upaya kesehatan secara menyeluruh, berjenjang dan terpadu dan pelayanan kesehatan baik yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta.

Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan aman baik pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Puskesmas dan

Klinik yang merupakan gate keeper dalam memberikan pelayanan klinis kepada masyarakat harus dapat menyediakan pelayanan klinis tingkat pertama yang aman dan bermutu. Untuk dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu, perlu dibakukan dan dikembangkan sistem pelayanan klinis yang minimal dari variasi proses yang terjadi akibat kurang optimalnya pengukuran, monitoring, pengendalian, pemeliharaan, serta pendokumentasian terhadap proses pelayanan klinis maupun manajemen pelayanan, dan tidak berjalannya perbaikan sistem pelayanan yang berkesinambungan.

Untuk menilai apakah sistem pelayanan klinis dan sistem manajemen mutu di Puskesmas dan Klinik berjalan dengan baik, aman dan minimal dari risiko, serta selalu dilakukan upaya perbaikan proses pelayanan secara berkesinambungan dan konsisten, maka perlu dilakukan penilaian akreditasi terhadap Puskesmas.

Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu fasilitas pelayanan kesehatan setelah dilakukan penilaian bahwa fasilitas pelayanan kesehatan telah memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Akreditasi di Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG menggunakan Standar Akreditasi dan dilaksanakan Lembaga Penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri.

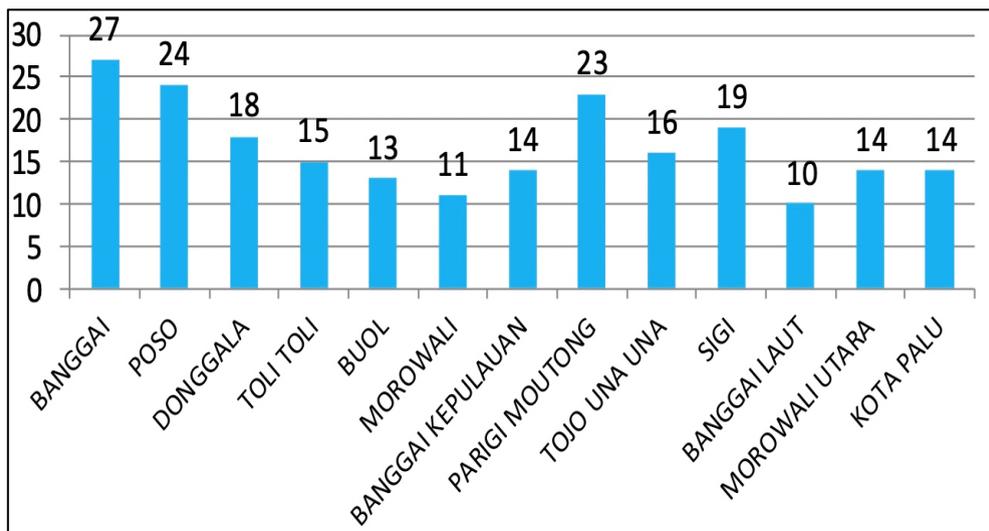
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi, bahwa dalam upaya peningkatan mutu secara eksternal melalui akreditasi diselenggara secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali.

Tujuan utama akreditasi adalah untuk pembinaan peningkatan mutu, kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan klinis, serta penerapan manajemen risiko, dan bukan sekedar penilaian untuk mendapatkan sertifikat akreditasi. Pendekatan yang dipakai dalam akreditasi adalah keselamatan dan hak pasien dan keluarga, dengan tetap memperhatikan hak petugas.

Penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas, dilakukan melalui survei Akreditasi. Survei Akreditasi merupakan kegiatan penilaian untuk mengukur tingkat kesesuaian terhadap standar Akreditasi, dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri.

Realisasi Indikator Persentase Puskesmas Yang Terakreditasi adalah 100%, realisasi ini sudah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 100%. 218 Puskesmas di Provinsi Sulawesi Tengah sudah terakreditasi. Adapun pencapaian akreditasi puskesmas sampai dengan tahun 2024 dapat di lihat pada grafik di bawah ini :

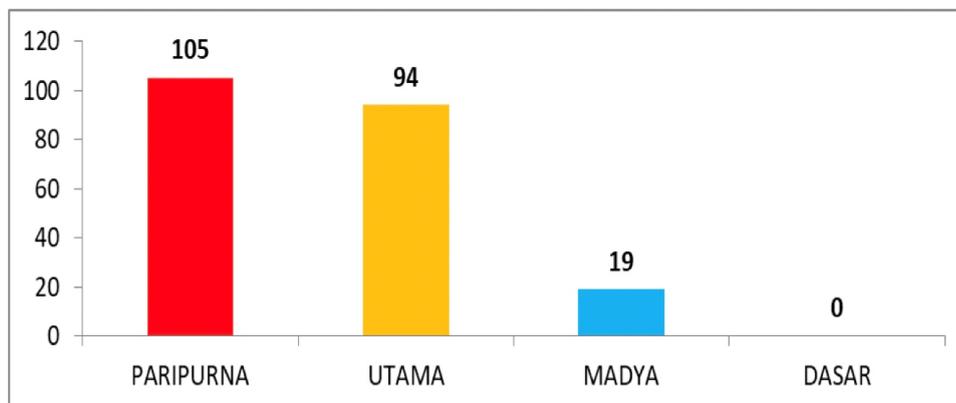
Grafik 8
JUMLAH PUSKESMAS TERAKREDITASI BELUM TERAKREDITASI DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024



Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa semua puskesmas di Provinsi Sulawesi Tengah berjumlah 218 sudah di akreditasi. Sumber Pembiayaan Survey Akreditasi Puskesmas di Kabupaten/Kota berasal dari Dana APBD adalah 109 Puskesmas, dan APBN (DAK Non Fisik) adalah 109 Puskesmas. Hasil Penetapan Status akreditasi puskesmas yang sudah di survey tahun 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

**STATUS AKREDITASI PUSKESMAS DI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**



Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Berdasarkan grafik diatas jumlah puskesmas yang sudah terakreditasi adalah 218 puskesmas dengan status akreditasi puskesmas terdiri dari Status akreditasi Dasar 0 Puskesmas, Status Akreditasi Madya 19 Puskesmas, Status Akreditasi Utama 94 Puskesmas, Status Akreditasi Paripurna 105 Puskesmas,. Untuk pencapaian Status Akreditasi Paripurna terbanyak di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 adalah Kabupaten Morowali dimana seluruh puskesmas atau 11 Puskesmas yang berada di wilayah Kabupaten Morowali dengan status Akreditasi Paripurna.

Sesudah Survey Akreditasi, Puskesmas wajib melaksanakan kegiatan Pasca Survey Akreditasi yaitu :

1. Membuat Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS)
2. Melaksanakan Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS) yang telah di susun dan melaporkan Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS) di dalam Aplikasi Data Fasyankes Online (DFO) setiap triwulan berdasarkan hasil rekomendasi Surveyor.
3. Melaporkan Indikator Nasional Mutu (INM) dan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) di Aplikasi Mutu Fasyankes setiap bulan.

Persentase Anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak

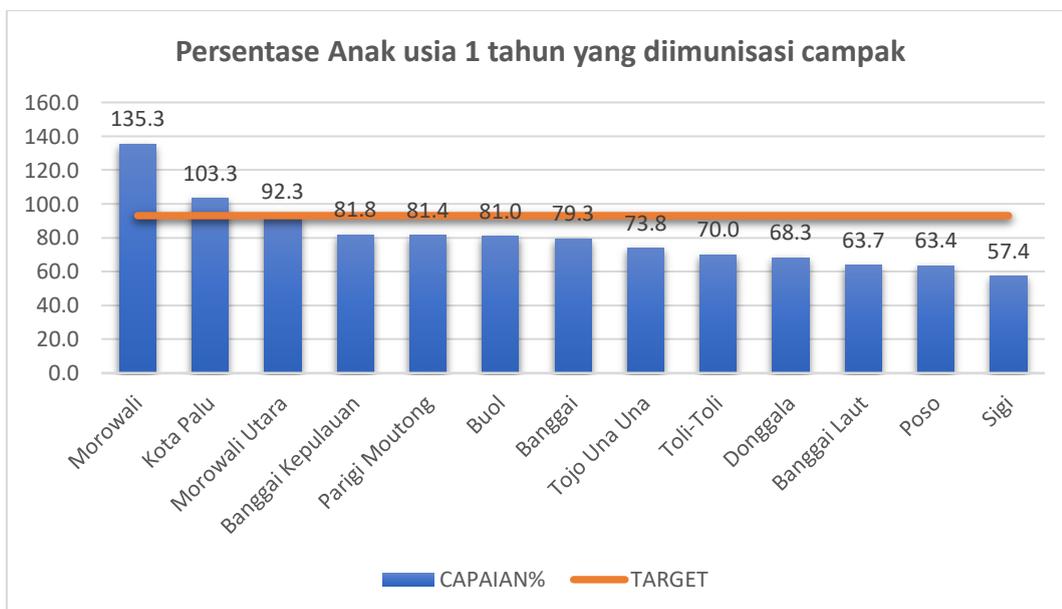
Imunisasi MR adalah imunisasi yang diberikan untuk mencegah penyakit campak dan rubella. Campak adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus Morbillivirus. Penyakit ini ditandai dengan demam, batuk, pilek, dan ruam merah pada kulit. Rubella adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus Rubella.

Penyakit ini ditandai dengan demam, ruam merah pada kulit, dan pembengkakan kelenjar getah bening.

Vaksin MR (Measles) Rubella merupakan vaksin hidup yang dilemahkan (live attenuated) berupa suatu serbuk kering dengan pelarut. Melalui vaksin MR, tubuh dapat terbantu untuk mengenal dan membentuk kekebalan (antibodi) untuk melawan virus penyebab campak dan rubella. Vaksin ini diberikan dengan cara disuntikkan di bawah kulit (subkutan), Vaksin ini wajib diberikan pada anak, mulai dari usia 9 bulan hingga kurang dari 15 tahun. Imunisasi MR diberikan dalam dua dosis, yaitu, dosis pertama diberikan pada usia 9 bulan dan dosis kedua diberikan pada usia 18 bulan atau saat anak masuk sekolah dasar (usia 6-7 tahun).

Imunisasi MR sangat penting untuk mencegah penularan penyakit campak dan rubella. Penyakit campak dan rubella dapat menyebabkan komplikasi yang serius, seperti pneumonia, ensefalitis, dan kematian. Efek samping imunisasi MR biasanya ringan dan bersifat sementara, seperti demam, ruam, dan nyeri otot. Efek samping yang lebih serius sangat jarang terjadi.

Capaian Persentase Anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 adalah 80,7% capaian ini masih belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 93,07%. Data dihitung berdasarkan data PWS yang dilaporkan oleh Puskesmas dan Kab/Kota pada tahun 2024, berikut adalah grafik rekapitulasi capaian persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi Campak :



Dari grafik diatas menunjukkan bahwa Capaian Imunisasi Campak anak usia 1 tahun di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 yang mencapai target 93,07% ada 2 Kab/Kota yaitu Kab. Morowali (135,3%) dan Kota Palu (103,3%) dan 11 Kabupaten/Kota yang belum mencapai target yaitu Kab. Morowali Utara (92,3%), kab. Banggai Kepulauan (81,8), Kab. Parigi Moutong (81,4%), Kab. Buol (81%), Kab. Banggai (79,3%), Kab. Tojo UnaUna (73,8%), Kab. Tolitoli (70%), Kab. Donggala (68,3%), Banggai Laut (63,7%), Kab. Poso (63,4%), Kab. Sigi (57,4%), berdasarkan data tersebut masih banyak Kab/Kota yang masih rendah capaiannya dan belum mencapai target yang ditentukan, hal ini karena masih terdapat permasalahan dari pelaksanaan imunisasi di Puskesmas dan Kab/Kota, adapun permasalahan tersebut adalah :

❖ **Permasalahan :**

1. Masih terdapat suatu kelompok tertentu di Kab/Kota dan beberapa orangtua yang masih menolak dilakukan Imunisasi MR karena rumor negative tentang imunisasi (Isu Negative Halal/Haram), adanya hoaks mengenai efek samping vaksin dan penolakan karena merasa vaksin tidak diperlukan.
2. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya imunisasi dan ketidakpercayaan terhadap vaksin, yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi Masyarakat terhadap pelayanan vaksinasi terutama di daerah-daerah tertentu.
3. Beberapa daerah di Kabupaten masih memiliki infrastruktur yang kurang memadai, seperti daerah pedesaan atau daerah yang jauh dari pusat kecamatan. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi petugas kesehatan untuk menjangkau anak-anak yang membutuhkan imunisasi, serta menghambat distribusi vaksin secara tepat waktu.

❖ **Upaya Pemecahan Masalah :**

1. Melakukan pendekatan keluarga sebagai upaya untuk meningkatkan jangkauan sasaran serta mendekatkan akses pelayanan imunisasi di wilayah kerja puskesmas.
2. Meningkatkan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya imunisasi. Penyuluhan ini bisa dilakukan melalui berbagai media, seperti penyuluhan langsung oleh tenaga medis di Puskesmas, media sosial, dan kampanye kesehatan di tingkat lokal. Pemahaman yang lebih baik akan mengurangi ketakutan terhadap vaksin dan meningkatkan partisipasi

masyarakat.

3. Memperbaiki Infrastruktur dan Logistik Vaksin, Pemerintah Kabupaten/Kota harus memastikan bahwa Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya memiliki sarana dan prasarana yang memadai, termasuk fasilitas penyimpanan vaksin dengan suhu yang sesuai (cold chain). Selain itu, distribusi vaksin harus ditingkatkan dengan memperbaiki akses transportasi ke daerah-daerah terpencil dan memastikan ketersediaan vaksin di setiap wilayah.

Persentase bayi usia 0 - 11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap

Imunisasi dasar adalah salah satu upaya untuk membentuk kekebalan tubuh anak, sehingga mencegah penularan penyakit berbahaya, wabah, serta membantu anak tidak mudah sakit. Imunisasi dasar lengkap terdiri dari beberapa jenis vaksin, mulai dari polio, BCG, DPT, dan lainnya. Imunisasi tersebut pun harus diberikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Kemenkes dan IDAI.

Tujuan imunisasi dasar adalah mencegah terjadinya penyakit, kecacatan, atau kematian. Dengan begitu, anak tidak rentan terkena berbagai penyakit selama pertumbuhannya dan dapat melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya yang dapat menyebabkan kecacatan atau kematian. Imunisasi juga menjadi salah satu upaya untuk membentuk herd immunity (kekebalan kelompok). Herd immunity penting untuk dicapai guna mencegah penyebaran penyakit berbahaya pada orang yang tidak bisa mendapatkan imunisasi, misalnya karena kondisi kesehatan tertentu. Jadi, semakin banyak orang yang mendapatkan vaksin, maka semakin sedikit orang yang terinfeksi penyakit.

Berdasarkan rekomendasi IDAI, berikut adalah jadwal imunisasi dasar lengkap untuk bayi dan anak:

1. Imunisasi anak usia 0-6 bulan

Setidaknya, ada 7 vaksin yang perlu diberikan saat anak baru lahir hingga berusia 6 bulan. Berikut ini adalah jadwalnya:

- Vaksin hepatitis B: diberikan pada 24 jam pertama setelah anak lahir. Vaksin hepatitis B akan diberikan dalam 4 dosis dengan jadwal pemberiannya pada saat bayi baru lahir, bayi berusia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan.

- Vaksin polio: diberikan pada minggu pertama bayi baru lahir, biasanya saat hendak pulang dari rumah sakit. Vaksin polio terdiri atas 4 dosis yang akan diberikan setiap bulan, yakni saat anak berusia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan.
- Vaksin BCG: diberikan saat bayi baru lahir atau sebelum berumur 1 bulan.
- Vaksin DTP: dapat diberikan saat bayi berusia 6 minggu. Vaksin ini diberikan dalam 3 dosis yang akan diulang pemberiannya sebelum anak berusia 5 bulan.
- Vaksin Hib: vaksin influenza tipe B yang diberikan dalam 3 dosis, yaitu saat anak usia 2, 3, dan 4 bulan.
- Vaksin PCV: terdiri atas 3 dosis yang diberikan saat anak berusia 2, 4, dan 6 bulan.
- Vaksin rotavirus (RV): terdiri atas 3 dosis yang pemberiannya dimulai saat anak berusia 2 bulan dan diulang pada bulan keempat dan keenam.

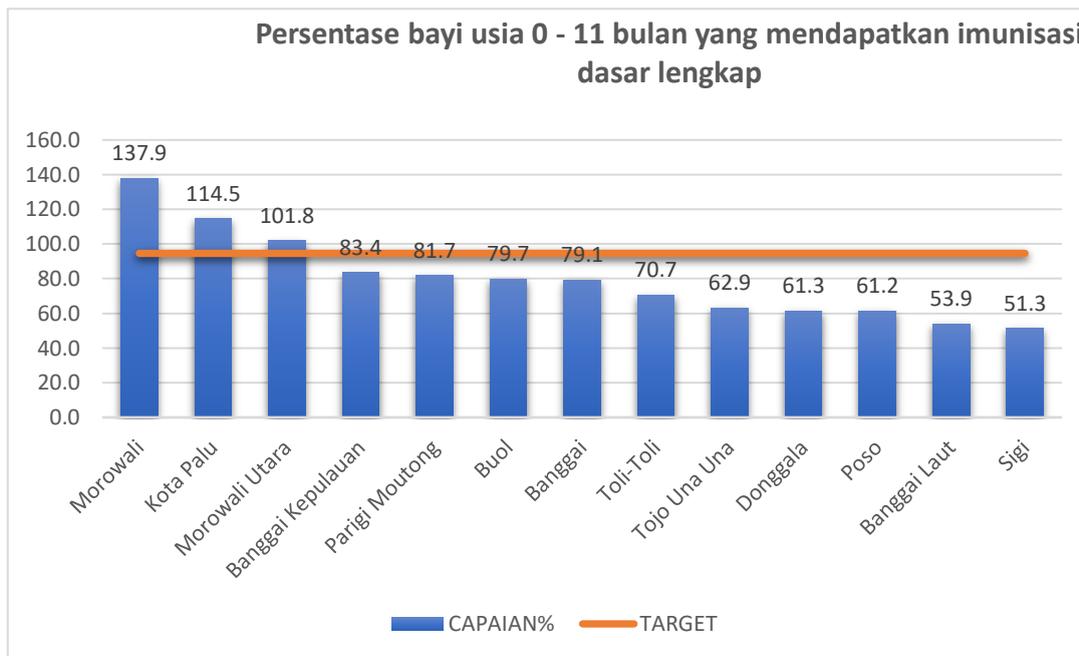
2. Imunisasi anak usia 6-12 bulan

Beberapa vaksin yang diberikan pada usia 6 bulan biasanya merupakan dosis terakhir, melanjutkan yang anak dapat pada usia 0-6 bulan. Berikut adalah jadwal imunisasi dasar anak usia 6-12 bulan:

- Vaksin PCV: pemberian dosis terakhir (dosis ketiga vaksin PCV) pada saat anak berusia 6 bulan. Selanjutnya pemberian booster di usia 12-15 bulan.
- Vaksin rotavirus (RV): pemberian dosis ketiga (terakhir) saat anak berusia 6 bulan.
- Vaksin influenza: bisa diberikan saat anak menginjak usia 6 bulan - 8 tahun dalam 2 dosis, dengan jarak 4 minggu. Setelah anak berusia 9 tahun, vaksin influenza dapat diulang setiap tahun.
- Vaksin MR (campak): diberikan saat anak berusia 9 bulan.
- Vaksin hepatitis A: dapat mulai diberikan saat anak berusia 12 bulan dalam 2 dosis dengan jarak 6-18 bulan antar-dosisnya.
- Vaksin varicella (cacar): diberikan saat anak mulai berusia 12 bulan dalam 2 dosis dengan interval 6 minggu sampai 3 bulan.
- Vaksin Japanese encephalitis (JE): diberikan pada anak yang berada di daerah endemis pada usia 9 bulan, dan dosis kedua saat anak berusia 24 bulan untuk perlindungan jangka panjang.

Capaian Persentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 adalah 80,5%

capaian ini masih belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 94,6%. Data dihitung berdasarkan data PWS yang dilaporkan oleh Puskesmas dan Kab/Kota pada tahun 2024, berikut adalah grafik rekapitulasi capaian persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) :



Dari Grafik diatas menunjukkan bahwa Capaian Imunisasi Dasar Lengkap Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 yang mencapai target 94,6 % ada 3 Kab/Kota yaitu Kab. Morowali (137,9%), Kota Palu (114,5%), Morowali Utara (101,8%), dan 10 Kabupaten/Kota yang belum mencapai target yaitu Kab. Banggai Kepulauan (83,4%), Kab. Parigi Moutong (81,7%), Kab. Buol (79,7%), Kab. Banggai (79,9%), Kab. Tolitoli (70,7%), Kab. Tojo UnaUna (62,9%), Kab. Donggala (61,3%), Kab. Poso (61,2%), Kab. Banggai Laut (53,9%), Kab. Sigi (51,3%), berdasarkan data tersebut masih banyak Kab/Kota yang masih rendah capaiannya dan belum mencapai target yang ditentukan, hal ini karena masih terdapat permasalahan dari pelaksanaan imunisasi di Puskesmas dan Kab/Kota, adapun permasalahan tersebut adalah :

❖ **Permasalahan :**

1. Penolakan terhadap Imunisasi sering terjadi di beberapa komunitas tertentu. Penolakan ini seringkali disebabkan oleh faktor kepercayaan budaya atau agama, serta adanya informasi yang salah mengenai

vaksin, seperti isu tentang efek samping vaksin atau klaim tentang bahaya vaksin.

2. Belum semua orangtua memahami tentang pentingnya imunisasi dasar lengkap pada bayi/anak
3. Sumber Daya Manusia yang terbatas, Puskesmas sering kali kekurangan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang terlatih untuk melakukan imunisasi, terutama di daerah terpencil. Selain itu, jumlah tenaga kesehatan yang ada sering kali terbatas, menyebabkan proses imunisasi menjadi tidak efisien.
4. Kurangnya Sosialisasi dan Koordinasi, tidak semua Puskesmas dan kabupaten melakukan sosialisasi yang memadai terkait pentingnya Imunisasi Dasar Lengkap, selain itu, koordinasi antara Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Pemerintah Kabupaten sering kali kurang efektif dalam mengimplementasikan program imunisasi dengan baik. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mencapai cakupan imunisasi yang optimal.
5. Penundaan jadwal imunisasi terkadang karena masalah logistik atau administrasi, jadwal imunisasi tidak dipatuhi dengan tepat. Banyak anak yang melewatkan jadwal vaksinasi karena kesibukan orang tua dan juga karena masih banyak orangtua imunisasi ganda
6. Penjangkauan sasaran yang belum lengkap melalui sweping/imunisasi kejar belum berjalan optimal sehingga menghambat capaian IDL

❖ **Upaya Pemecahan Masalah :**

1. Mengatasi Penolakan terhadap Imunisasi dengan melakukan pendekatan yang lebih sensitif terhadap budaya dan kepercayaan lokal. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:
 - Bekerja sama dengan tokoh agama dan pemuka masyarakat untuk memberikan penjelasan tentang pentingnya imunisasi dari perspektif agama dan kesehatan.
 - Menyediakan informasi yang jelas dan berbasis bukti tentang keamanan vaksin dan manfaatnya bagi kesehatan individu dan masyarakat.

- Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program imunisasi agar mereka merasa memiliki dan terlibat.
2. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada orangtua yang belum mau anaknya diimunisasi ganda dan yang belum lengkap imunisasinya dengan melibatkan kader dan kelompok masyarakat lainnya
 3. Pembentukan POKJA KIPI di masing-masing Kabupaten/Kota
 4. Pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, untuk mengatasi masalah terbatasnya sumber daya manusia, Dinas Kesehatan Kab/Kota dapat membuat pelatihan dan pendidikan lebih lanjut kepada tenaga kesehatan mengenai imunisasi dan penanganan vaksin. Selain itu, dengan peningkatan insentif bagi tenaga medis, mereka dapat bekerja dengan lebih semangat dan optimal dalam menjalankan tugas mereka.
 5. Melakukan koordinasi secara intensif dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, organisasi masyarakat, swasta, toga, toma, kader sehingga masyarakat mau dan mampu menjangkau pelayanan imunisasi untuk mendukung pencapaian target cakupan imunisasi dan untuk meningkatkan kuantitas serta kualitas pelayanan imunisasi
 6. Monitoring dan Evaluasi Program Imunisasi Pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus terhadap program imunisasi sangat penting untuk mengetahui sejauh mana pencapaian target imunisasi dan mengidentifikasi masalah yang ada di lapangan. Pemerintah harus memastikan bahwa data terkait imunisasi dapat diakses dan dianalisis untuk perbaikan lebih lanjut.
 7. Pelacakan sasaran yang belum atau tidak lengkap mendapatkan pelayanan imunisasi (Defaulter Tracking) diikuti dengan upaya Drop Out Follow Up (DOFU) dan sweeping

Persentase anak usia 18 - 24 bulan yang mendapatkan imunisasi lanjutan campak rubela

Imunisasi Baduta (Bayi dan Balita) adalah serangkaian vaksinasi yang diberikan kepada bayi dan anak-anak untuk melindungi mereka dari penyakit yang berpotensi serius dan bahkan dapat mengancam nyawa, seperti polio, difteri, tetanus, hepatitis B, pertusis (batuk rejan), campak, dan

lain-lain. Imunisasi Baduta termasuk dalam kategori imunisasi dasar yang harus diberikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin kesehatan anak.

Imunisasi lanjutan merupakan ulangan Imunisasi dasar untuk mempertahankan tingkat kekebalan dan untuk memperpanjang masa perlindungan anak yang sudah mendapatkan Imunisasi dasar. Imunisasi lanjutan diberikan pada:

a. Anak usia bawah dua tahun (Baduta)

Imunisasi lanjutan yang diberikan pada Baduta adalah Imunisasi terhadap penyakit difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, pneumonia dan meningitis yang disebabkan oleh *Hemophilus Influenza* tipe b (Hib), serta campak.

b. Anak usia sekolah dasar

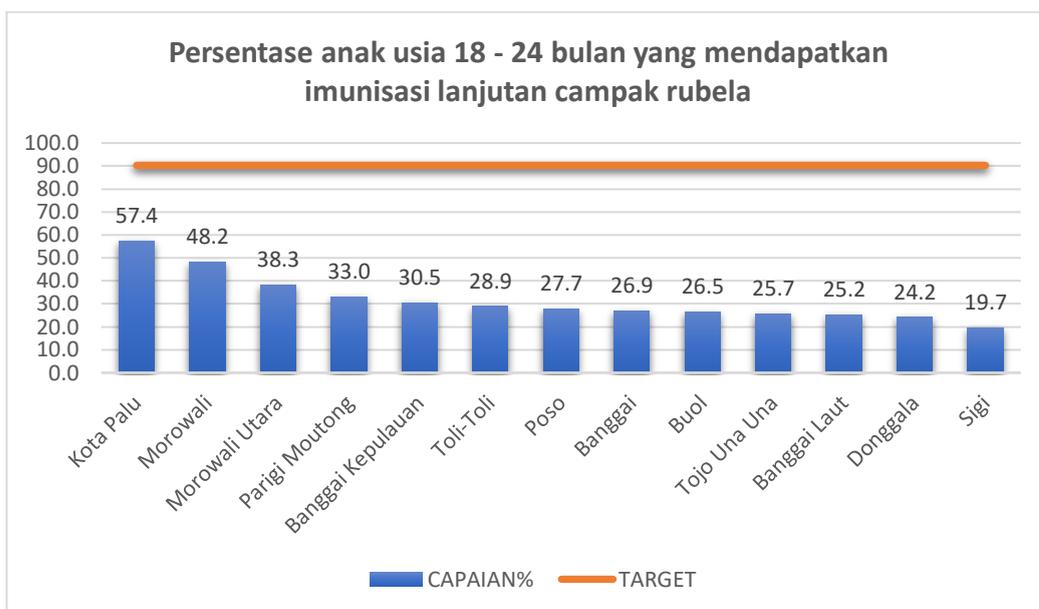
Imunisasi lanjutan yang diberikan pada anak usia sekolah dasar terdiri atas Imunisasi terhadap penyakit campak, tetanus, dan difteri.

c. Wanita Usia Subur (WUS)

Imunisasi lanjutan yang diberikan pada terdiri atas Imunisasi terhadap penyakit tetanus dan difteri

Pemberian imunisasi berulang dapat membangkitkan respon imun yang lebih baik. Selain itu, imunisasi lanjutan bertujuan untuk memberikan perlindungan tambahan. Beberapa vaksin imunisasi memberi tingkat perlindungan yang rendah setelah satu kali pemberian. Ini yang membuat pemberian imunisasi yang harus diulang selanjutnya dapat memberikan perlindungan yang lebih besar.

Capaian Persentase Anak usia 18 - 24 bulan yang mendapatkan Imunisasi Lanjutan Campak Rubela di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 adalah 32,7% capaian ini masih belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 90,3%. Data dihitung berdasarkan data PWS yang dilaporkan oleh Puskesmas dan Kab/Kota pada tahun 2024, berikut adalah grafik rekapitulasi capaian persentase anak usia 18 - 24 bulan yang mendapatkan Imunisasi Lanjutan Campak Rubela :



Dari Grafik diatas menunjukkan bahwa Capaian Imunisasi anak usia 18 – 24 bulan yang mendapatkan Imunisasi Lanjutan Campak Rubella di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 belum ada Kabupaten/Kota yang mencapai target 90,3 % semua Kabupaten/Kota capaiannya masih rendah yaitu dibawah 60% Kota Palu (57,4%), Kab. Morowali (48,2%), Kab. Morowali Utara (38,3%), Kab. Parigi Moutong (33%), Kab. Banggai Kepulauan (30,5%), Kab. Tolitoli (28,9%), Kab. Poso (27,7%), Kab. Banggai (26,9%), Kab. Buol (26,5%), Kab. Tojo Unauna (25,7%), Kab. Banggai Laut (25,2%), Kab. Donggala (24,2%) dan Kab. Sigi (19,7%), berdasarkan data tersebut 13 Kab/Kota semua capaiannya masih rendah dan tidak ada Kab/Kota yang mencapai target yang ditentukan, hal ini karena masih terdapat permasalahan dari pelaksanaan Imunisasi Baduta lanjutan di Puskesmas dan Kab/Kota, adapun permasalahan tersebut adalah :

❖ **Permasalahan :**

1. Masih banyaknya orangtua yang tidak membawa balitanya untuk di imunisasi pada usia 12 bulan keatas karena masih menganggap imunisasi dasar itu hanya sampai campak di usia 9 bulan
2. Terdapat kekosongan vaksin DPT/HB/Hib dan campak di Pusat sehingga mempengaruhi kebutuhan vaksin di Provinsi, Kab/Kota dan Puskesmas.

3. Kurangnya koordinasi antara Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten dalam pelaksanaan program imunisasi.
4. Beberapa masyarakat tinggal jauh dari puskesmas, sehingga sulit untuk mengakses layanan imunisasi, keterbatasan transportasi umum di daerah pedesaan menghambat orang tua untuk membawa anak mereka ke puskesmas.

❖ **Upaya Pemecahan Masalah :**

1. Melakukan kampanye edukasi yang lebih intensif lagi mengenai pentingnya Imunisasi Lanjutan pada Baduta karena sekarang ada perubahan Paradigma dari Imunisasi Dasar Lengkap menjadi Imunisasi Rutin Lengkap yaitu anak /sasaran dikatakan lengkap jika imunisasinya sampai Imunisasi Lanjutan, Kampanye dan edukasi ini dilakukan melalui media sosial, penyuluhan langsung, dan melibatkan tokoh masyarakat atau agama.
2. Pengelola Imunisasi di Puskesmas dan Dinkes Kab/Kota membuat perencanaan kebutuhan vaksin dengan baik dan selalu berkoordinasi dengan Dinkes Provinsi terkait stok vaksin
3. Memperkuat koordinasi antara Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten dan masyarakat untuk memastikan pelaksanaan imunisasi berjalan dengan lancar dan terencana.
4. Peningkatan dan pemerataan jangkauan pelayanan, baik yang stasioner maupun yang menjangkau masyarakat di daerah sulit atau tidak terjangkau pelayanan

3.2 Realisasi Anggaran

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU APBD 2024	REALISASI			SISA ANGGARAN
			Keuangan (Rp)	%	FISIK (%)	
1	2	3	6	7	8	9
	DINAS KESEHATAN	236,066,971,430	219,816,377,155	93.12	99.67	16,250,594,275
1	SEKRETARIAT	177,437,460,301	162,132,683,052	91.37	99.99	15,304,777,249
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	176,522,460,773	161,242,967,642	91.34	100.00	15,279,493,131
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,163,442,000	1,154,049,000	99.19	100.00	9,393,000
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,043,442,000	1,034,075,000	99.10	100.00	9,367,000
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	120,000,000	119,974,000	99.98	100.00	26,000
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	168,655,768,101	153,437,022,321	90.98	100.00	15,218,745,780
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	163,172,564,401	147,973,817,675	90.69	100.00	15,198,746,726

	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4,986,804,800	4,967,362,130	99.61	100.00	19,442,670
	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	287,827,750	287,671,366	99.95	100.00	156,384
	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKP	111,795,500	111,795,500	100.00	100.00	-
	5	Pengelolaandan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	96,775,650	96,375,650	99.59	100.00	400,000
	3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	265,744,800	265,120,680	99.77	100.00	624,120
	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	76,544,800	76,544,800	100.00	100.00	-
	2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	189,200,000	188,575,880	99.67	100.00	624,120
	4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	624,146,000	622,172,974	99.68	100.00	1,973,026
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	222,330,000	220,700,000	99.27	100.00	1,630,000
	2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	121,461,000	121,182,918	99.77	100.00	278,082
	3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	280,355,000	280,290,056	99.98	100.00	64,944
	5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,086,490,995	1,084,436,200	99.81	100.00	2,054,795

	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,086,490,995	1,084,436,200	99.81	100.00	2,054,795
	6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,395,968,312	1,383,289,500	99.09	100.00	12,678,812
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	899,390,499	894,700,000	99.48	100.00	4,690,499
	2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					-
	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	496,577,813	488,589,500	98.39	100.00	7,988,313
	7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,969,756,850	1,948,458,824	98.92	100.00	21,298,026
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	794,656,850	777,491,746	97.84	100.00	17,165,104
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,175,100,000	1,170,967,078	99.65	100.00	4,132,922
	8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,361,143,715	1,348,418,143	99.07	100.00	12,725,572
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	441,000,000	431,601,905	97.87	100.00	9,398,095
	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	639,920,236	636,732,725	99.50	100.00	3,187,511

	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	280,223,479	280,083,513	99.95	100.00	139,966
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	914,999,528	889,715,410	97.24	51.00	25,284,118
	1 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	200,000,000	199,935,000	99.97	100.00	65,000
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	200,000,000	199,935,000	99.97	100.00	65,000
	2 Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	714,999,528	689,780,410	96.47	100.00	25,219,118
	1 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	714,999,528	689,780,410	96.47	100.00	25,219,118
	2 BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	3,282,656,555	3,199,327,826	97.46	100.00	83,328,729
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2,362,610,000	2,313,856,195	97.94	100.00	48,753,805
	1 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2,362,610,000	2,313,856,195	97.94	100.00	48,753,805
	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	395,671,700	387,483,350	97.93	100.00	8,188,350

	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	239,999,800	236,902,500	98.71	100.00	3,097,300
	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	159,999,850	158,274,900	98.92	100.00	1,724,950
	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	686,939,150	682,330,325	99.33	100.00	4,608,825
	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	160,000,000	159,110,000	99.44	100.00	890,000
	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	240,000,000	224,122,000	93.38	100.00	15,878,000
	7	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	359,999,800	346,303,200	96.20	100.00	13,696,600
	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	119,999,700	119,329,920	99.44	100.00	669,780
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	920,046,555	885,471,631	96.24	100.00	34,574,924
	1	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	384,878,300	368,737,956	95.81	100.00	16,140,344

	1 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	384,878,300	368,737,956	95.81	100.00	16,140,344
	2 Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	160,000,205	152,330,005	95.21	100.00	7,670,200
	1 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	160,000,205	152,330,005	95.21	100.00	7,670,200
	3 Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	375,168,050	364,403,670	97.13	100.00	10,764,380
	1 Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	375,168,050	364,403,670	97.13	100.00	10,764,380
3	BIDANG PELAYANAN KESEHATAN	44,724,119,002	44,314,222,266	99.08	100.00	409,896,736
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	44,724,119,002	44,314,222,266	99.08	100.00	409,896,736
	1 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	44,514,119,452	44,105,263,596	99.08	100.00	408,855,856

	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	190,632,900	190,574,400	99.97	100.00	58,500
	2	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	41,519,336,400	41,116,783,411	99.03	100.00	402,552,989
	3	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	2,344,228,750	2,341,670,650	99.89	100.00	2,558,100
	4	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	300,580,350	297,730,620	99.05	100.00	2,849,730
	5	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	159,341,052	158,504,515	99.48	100.00	836,537
	2	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	209,999,550	208,958,670	99.50	100.00	1,040,880
	1	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	209,999,550	208,958,670	99.50	100.00	1,040,880
4		BIDANG KEFARMASIAN, SARANA ALAT KESEHATAN DAN SDM KESEHATAN	5,321,520,950	5,075,550,733	95.38	100.00	245,970,217
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3,660,562,000	3,437,834,931	93.92	100.00	222,727,069
	1	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	3,660,562,000	3,437,834,931	93.92	100.00	222,727,069

	1	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	450,009,650	442,209,650	98.27	100.00	7,800,000
	2	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	3,210,552,350	2,995,625,281	93.31	100.00	214,927,069
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	954,909,850	943,817,702	98.84	100.00	11,092,148
	1	Kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	954,909,850	943,817,702	98.84	100.00	11,092,148
	1	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang Pak	954,909,850	943,817,702	98.84	100.00	11,092,148
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	706,049,100	693,898,100	98.28	100.00	12,151,000
	1	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	426,049,500	418,706,850	98.28	100.00	7,342,650
	1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	306,049,700	302,311,300	98.78	100.00	3,738,400
	2	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	119,999,800	116,395,550	97.00	100.00	3,604,250

	2 Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	279,999,600	275,191,250	98.28	100.00	4,808,350
	1 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	159,999,700	159,971,300	99.98	100.00	28,400
	2 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	119,999,900	115,219,950	96.02	100.00	4,779,950
5	BIDANG PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT, SURVEILANS DAN IMUNISASI	5,301,214,622	5,094,593,278	96.10	98.34	206,621,344
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	5,301,214,622	5,094,593,278	96.10	98.34	206,621,344
	1 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	5,301,214,622	5,094,593,278	96.10	98.34	206,621,344
	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1,504,875,000	1,337,494,114	88.88	90.06	167,380,886
	2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2,818,638,972	2,792,985,430	99.09	100.00	25,653,542
	3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	241,383,650	241,383,650	100.00	100.00	-

	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	219,130,500	219,130,500	100.00	100.00	-
	5	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	317,325,000	314,315,524	99.05	100.00	3,009,476
	6	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	199,861,500	189,284,060	94.71	100.00	10,577,440
	UPT LABORATORIUM KESEHATAN		3,678,600,000	3,655,451,413	99.37	100.00	23,148,587
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		2,434,760,250	2,419,910,008	99.39	100.00	14,850,242
	1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	42,600,000	42,600,000	100.00	100.00	-
	1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42,600,000	42,600,000	100.00	100.00	-
	2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	48,339,750	48,339,693	100.00	100.00	57
	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48,339,750	48,339,693	100.00	100.00	57
	3	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,908,418,400	1,903,174,510	99.73	100.00	5,243,890
	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,908,418,400	1,903,174,510	99.73	100.00	5,243,890
	4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	316,582,100	314,965,913	99.49	100.00	1,616,187

	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	316,582,100	314,965,913	99.49	100.00	1,616,187
	5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118,820,000	110,829,892	93.28	100.00	7,990,108
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52,320,000	49,388,150	94.40	100.00	2,931,850
	2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15,000,000	13,717,283	91.45	100.00	1,282,717
	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	51,500,000	47,724,459	92.67	100.00	3,775,541
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1,243,839,750	1,235,541,405	99.33	100.00	8,298,345
	1 Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1,243,839,750	1,235,541,405	99.33	100.00	8,298,345
	1 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1,243,839,750	1,235,541,405	99.33	100.00	8,298,345
	UPT BADAN PENDIDIKAN PELATIHAN KESEHATAN	2,511,084,939	2,495,965,310	99.40	100.00	15,119,629
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1,820,980,124	1,805,860,495	99.17	100.00	15,119,629
	1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	155,555,000	153,895,000	98.93	100.00	1,660,000

	1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	155,555,000	153,895,000	98.93	100.00	1,660,000
	2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	648,618,536	646,020,250	99.60	100.00	2,598,286
	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	648,618,536	646,020,250	99.60	100.00	2,598,286
	3	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	413,567,300	413,563,800	100.00	100.00	3,500
	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	413,567,300	413,563,800	100.00	100.00	3,500
	4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	278,559,288	268,227,150	96.29	100.00	10,332,138
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	278,559,288	268,227,150	96.29	100.00	10,332,138
	5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	324,680,000	324,154,295	99.84	100.00	525,705
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	91,000,000	90,516,295	99.47	100.00	483,705
	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33,600,000	33,600,000	100.00	100.00	-

	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200,080,000	200,038,000	99.98	100.00	42,000
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	690,104,815	690,104,815	100.00	100.00	-
	1 Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	690,104,815	690,104,815	100.00	100.00	-
	1 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	690,104,815	690,104,815	100.00	100.00	-
	UPT PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU	836,551,749	828,907,183	99.09	100.00	7,644,566
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	220,593,899	217,589,132	98.64	100.00	3,004,767
	1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33,160,000	30,600,000	92.28	100.00	2,560,000
	1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	33,160,000	30,600,000	92.28	100.00	2,560,000
	2 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	70,122,000	69,821,750	99.57	100.00	300,250
	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70,122,000	69,821,750	99.57	100.00	300,250
	3 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24,804,399	24,804,399	100.00	100.00	-

	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24,804,399	24,804,399	100.00	100.00	-
	4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,557,500	3,412,983	95.94	100.00	144,517
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3,557,500	3,412,983	95.94	100.00	144,517
	5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88,950,000	88,950,000	100.00	100.00	-
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53,950,000	53,950,000	100.00	100.00	-
	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35,000,000	35,000,000	100.00	100.00	-
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	615,957,850	611,318,051	99.25	100.00	4,639,799
	1	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	615,957,850	611,318,051	99.25	100.00	4,639,799
	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Berpotensi Bencana	139,538,950	139,380,304	99.89	100.00	158,646

	2	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	379,569,250	377,013,394	99.33	100.00	2,555,856
	3	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	96,849,650	94,924,353	98.01	100.00	1,925,297
	JUMLAH ANGGARAN DINAS KESEHATAN		243,093,208,118	226,796,701,061	93.30	99.92	16,296,507,057
	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA		245,181,337,295	193,736,762,493	79.02	76.00	51,444,574,802
	1	APBD	45,578,945,177	43,281,683,317	94.96	100.00	2,297,261,860
	2	BLUD	199,602,392,118	150,455,079,176	75.38	80.00	49,147,312,942
	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MADANI		130,581,110,270	76,785,644,664	58.80	60.00	53,795,465,606
	1	APBD	16,500,800,000	15,739,896,143	95.39	100.00	760,903,857
	2	BLUD	114,080,310,270	61,045,748,521	53.51	55.00	53,034,561,749
	TOTAL ANGGARAN KESEHATAN		618,855,655,683	497,319,108,218	80.36	65.00	121,536,547,465

3.3 Inovasi

Sereal Kelor

Konsep Dasar Sereal Kelor

a) Karakteristik Kelor

Kelor (*Moringa oleifera*) dikenal sebagai tanaman dengan nilai gizi tinggi yang berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan status gizi masyarakat. Daun kelor kaya akan nutrisi penting yang mencakup protein, vitamin, mineral, dan senyawa bioaktif, menjadikannya sumber pangan ideal untuk mengatasi masalah gizi, terutama di wilayah yang rawan bencana atau kekurangan gizi.

b) Kandungan Nutrisi Utama Daun Kelor

Protein:

Daun kelor kering mengandung sekitar 27 gram protein per 100 gram, yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan sayuran hijau. Kandungan ini juga meliputi 9 asam amino esensial, seperti lisin dan metionin, yang penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh.

(Sumber: FAO, Fuglie L.J., "The Miracle Tree", 2001)

Vitamin:

- Vitamin A (Beta-karoten): 6.78 mg per 100 gram daun segar, yang setara dengan sekitar 113% kebutuhan harian. Berperan dalam menjaga kesehatan mata dan kekebalan tubuh.
- Vitamin C: 51.7 mg per 100 gram daun segar, mencakup sekitar 57% kebutuhan harian, membantu meningkatkan kekebalan dan penyerapan zat besi.
- Vitamin E: 3.5 mg per 100 gram daun kering, berfungsi sebagai antioksidan untuk melindungi sel dari kerusakan.
- Vitamin B Kompleks:
 - B1 (Tiamin): 0.06 mg per 100 gram.
 - B2 (Riboflavin): 0.05 mg per 100 gram.
 - B3 (Niasin): 0.8 mg per 100 gram.

(Sumber: Penelitian lokal dan data FAO, 2001)

Mineral:

Daun kelor kaya akan kalsium (440 mg per 100 gram), kalium (259 mg per 100 gram), dan zat besi (7 mg per 100 gram). Zat ini penting untuk kesehatan tulang, fungsi otot, dan pembentukan darah.

Antioksidan dan Senyawa Bioaktif:

Mengandung flavonoid, polifenol, dan glukosinolat yang memiliki sifat anti-inflamasi, antioksidan, dan memperkuat sistem imun tubuh.

c) Manfaat Kelor

Kandungan nutrisi dalam kelor mendukung berbagai manfaat kesehatan, seperti:

- Mengatasi malnutrisi pada kelompok rentan, seperti anak-anak dan ibu hamil.
- Memperkuat sistem imun untuk melawan penyakit.
- Membantu memperbaiki status kesehatan masyarakat di wilayah terdampak bencana atau rawan pangan.



SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002024234233, 25 November 2024

Pencipta

Nama : AMSAL

Alamat : Jl. Akasia Raya No. 46 Perumnas Tinggede, Kab. Sigi, Marawola, Sigi, Sulawesi Tengah, 94362

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

Alamat : Jln. R.A. Kartini No 11, Palu Timur, Palu, Sulawesi Tengah 94111

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Kompilasi Ciptaan / Data

Judul Ciptaan : Inovasi Pangan Sereal Kelor [keloreal]

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 25 November 2024, di Palu

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000806665

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
n.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

IGNATIUS M.T. SILALAH
NIP. 196812301996031001

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

3.5 Penghargaan

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah menerima penghargaan

a) SAKIP AWARDS



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dapat di tarik kesimpulan bahwa :

- a. Tahun 2024 sebagai tahun pertama RPJMD Provinsi Sulawesi, dimana hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum belum memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian tersebut menggambarkan juga bahwa ada peningkatan dari tahun ke tahun, oleh karena situ komitmen keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari sistem pembangunan yang diharapkan.
- b. Hasil dari analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, bahwa semua indicator Kesehatan yang disusun telah menunjang capaian kinerja tujuan dan sasaran.
- c. Selama tahun 2024, Dinas Kesehatan telah mengembangkan inovasi dan menerima Penghargaan.

4.2 Saran/ Strategi kedepannya untuk meningkatkan kinerja

- a. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang berdaya saing.
- b. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana
- c. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi ibu dan anak.
- d. Meningkatkan penanggulangan stunting
- e. Menerapkan sistem perencanaan, pemrograman, pendanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi yang terpadu.
- f. Mengembangkan sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah yang tertib administrasi, efektif, efisien, dan rasional.
- g. Menerapkan standar pelayanan berkualitas dan berstandar internasional.



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan R.A.Kartini No. 11 Telp. (0451) 421070,421170,421028 Faksimili (0451) 421170 Palu
94111

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wayan Apriani, SKM,M.Epid

Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : dr. I Komang Adi Sujendra,Sp.PD

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperluhkanserta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperluhkan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 1 April 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROV. SULAWESI TENGAH



dr. I Komang Adi Sujendra,Sp.PD
NIP. 19650325 199003 1 014

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DINAS KESEHATAN
PROV. SULAWESI TENGAH

Wayan Apriani, SKM,M.Epid
NIP. 19700417 199312 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KINERJA

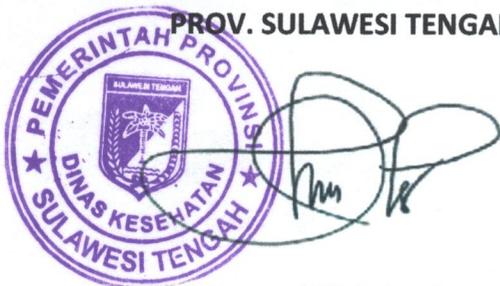
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Tata Kelola Reformasi Birokrasi General	Nilai RB General Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	80 poin
2	Terwujudnya penerapan SPBE Perangkat Daerah	INDEKS SPBE PERANGKAT DAERAH	3 Indeks Poin
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) PERANGKAT DAERAH	3 Indeks Poin
4	Meningkatnya pengawasan kearsipan internal perangkat daerah	TINGKAT DIGITALISASI ARSIP PERANGKAT DAERAH	75%
5	Meningkatnya penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	TLHP BPK DAN APIP PERANGKAT DAERAH	80%
6	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tepat Waktu	Persentase Pemenuhan Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Ketentuan	100%
7	Meningkatnya kualitas reformasi hukum perangkat daerah	Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah	80 poin
8	Meningkatnya Profesionalitas ASN	IP ASN Perangkat Daerah	60 Indeks Poin
9	Meningkatnya pemanfaatan layanan pengadaan barang & Jasa secara elektronik Perangkat Daerah	INDEKS TATA KELOLA PBJ PERANGKAT DAERAH	80 Indeks Poin
10	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Barang Milik Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	100%
11	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Barang Milik Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	100%
12	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang dan Aset Milik Daerah	(Persentase Asset dan Barang Milik Daerah yang Dipelihara)	100%
13	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Dinas Kesehatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80

14	Meningkatnya Kualitas Layanan SPM Bidang Kesehatan	Capaian SPM bidang Kesehatan	100%
15	Meningkatnya Kualitas Laporan Pemenuhan Pelayanan SPM (KLB dan Bencana) Provinsi	Persentase Pemenuhan Laporan Pelayanan 2 Indikator SPM Kesehatan (KLB dan Bencana) Sesuai Ketentuan	100%
16	Meningkat Kualitas Laporan Pemenuhan SPM 12 Indikator (Kab/Kota)	Persentase Pemenuhan Laporan Pelayanan 12 Indikator SPM Kesehatan Kab/Kota Sesuai Ketentuan	100%

Program	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintah	175.488.284.287	APBD

Palu, 1 April 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROV. SULAWESI TENGAH



Dr. I Komang Adi Sujendra, Sp.PD
 NIP. 19650325 199003 1 014

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DINAS KESEHATAN
PROV. SULAWESI TENGAH

Wayan Apriani, SKM, M.Epid
 NIP. 19700417 199312 2 001

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KESEHATAN DAERAH

Jl. R.A Kartini Nomor 11 Telp. (0451) 421070; 454646 Faksimili (0451) 454646
PALU 94111

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurlia Lahay,SKM

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Wayan Apriani, SKM,M.Epid

Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 1 April 2024

PIHAK KEDUA
Sekretaris Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Tengah



Wayan Apriani, SKM,M.Epid
19700417 199312 2 001

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

Nurlia Lahay,SKM
19751117 200502 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KINERJA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN Tepat Waktu	(Jumlah pegawai yang terbayarkan gaji dan tunjangannya) Orang	280 Pegawai
2	Terverifikasinya Dokumen Pertanggung Jawaban	(Persentase SPJ yang berhasil menjadi SPM) 100 Persentase	100%
3	Tersusunnya Laporan Keuangan sesuai Standar	(Jumlah Dokumen Laporan Keuangan)	2 Dokumen
4	Tersedianya administrasi keuangan	Persentase Dokumen	100%
5	Tersedianya Laporan Penutupan Kas	Jumlah Laporan	12 Laporan
6	Tersedianya Register Penutupan kas	Jumlah Laporan	12 Laporan
7	Tersedianya Laporan Bukti Kas Umum (Tunai dan Bank)	Jumlah Laporan	12 Laporan
8	Tersedianya Laporan Panjar	Jumlah Laporan	12 Laporan
9	Tersedianya Laporan Pajak	Jumlah Laporan	12 Laporan
10	Tersedianya Laporan SPT Tahunan	Jumlah Laporan	1 Laporan
11	Tersedianya Dokumen Pengelolaan SPT Masa	Jumlah Dokumen	36 Dokumen
12	Ditindaklanjutnya Hasil Rekomendasi Pemeriksaan BPK dan APIP	Persentasi Rekomendasi yang ditindaklanjuti	100%
13	Tersusunnya Laporan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Laporan
14	Tersusunnya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Aset Tetap	1 Laporan
15	Tersusunnya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Persediaan	1 Laporan

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	121,461,000	APBD
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4,957,680,000	APBD
3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	210,639,750	APBD
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKP	111,795,500	APBD
5.	Pengelolaandan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	96,775,650	APBD
6.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	76,544,800	APBD
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	154,244,000	APBD

Palu, 1 April 2024

**PIHAK KEDUA
PEJABAT ESELON 3**



Wayan Apriani, SKM, M.Epid
19700417 199312 2 001

**PIHAK PERTAMA
PEJABAT ESELON 4**

Nurlia Lahay, SKM
19751117 200502 2 006



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DINAS KESEHATAN DAERAH

Jl. R.A Kartini Nomor 11 Telp. (0451) 421070; 454646 Faksimili (0451) 454646
PALU 94111

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anton S. Lapanca,S.Sos
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Wayan Apriani, SKM,M.Epid
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 1 April 2024

PIHAK KEDUA

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum



Wayan Apriani, SKM,M.Epid
19700417 199312 2 001

PIHAK PERTAMA

Sekretaris Prov. Sulawesi Tengah

Anton S. Lapanca,S.Sos
19660801 199203 1 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KINERJA

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Aplikasi Surat Menyurat berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi Surat Menyurat yang tersedia	1 Aplikasi
2	Tersimpannya data perangkat daerah di pusat data pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Data yang tersimpan di Pusat Data Pemerintah Daerah	1 Dokumen
3	Tersedianya akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah Bidang yang dilayani dalam Penyediaan Internet yang berkualitas	5 Bidang
4	Terlayannya Permohonan Informasi Publik (PPID)	Jumlah Pelayanan Informasi publik	4 Laporan
5	Tindak Lanjut Pengaduan Melalui SPAN LAPOR	Jumlah Aduan yang ditindaklanjuti	4 Aduan
6	Diterbitkannya Publikasi melalui media sosial	(Jumlah Publikasi yang di terbitkan di media sosial)	36 publikasi
7	Terpenuhinya Layanan Publik dan Layanan Command Center	(Jumlah Pusat Layanan Command Center)1	1 Layanan
8	Tersedianya Jasa Pelayanan Listrik, Telepon, Internet dan Air	(Jumlah unit kerja yang terlayani jasa pelayanan listrik, telepon, internet dan air)	5 Unit
9	Tersedianya Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor	(Jumlah unit kerja yang terlayani jasa keamanan dan kebersihan kantor)	5 Unit
10	Terlayannya Penatausahaan Arsip dan Perpustakaan di Lingkungan Dinas Kesehatan	(Jumlah Bidang yang dilayani dalam Penatausahaan Arsip)	5 Bidang
11	Tersedianya Tempat Penyimpanan Arsip sesuai standar	Jumlah Gedung Penyimpanan Arsip sesuai standar	1 Gedung
12	Tersedianya Media Perangkat Elektronik Penyimpanan Arsip	Jumlah Media Perangkat Elektronik Penyimpanan Arsip	3 Media
13	Terdistribusinya Gaji dan Tunjangan ASN	(Jumlah pegawai yang terdistribusi gaji dan tunjangan) Orang	280 Pegawai
14	Terpenuhinya kewajiban pembayaran kegiatan di Dinas Kesehatan	Persentase SPM yang berhasil menjadi SP2D) 100 Persentase	100%
15	Tersusunnya Laporan Keuangan sesuai Standar	(Jumlah Dokumen Laporan Keuangan)	2 Dokumen
16	Tersusunnya Rancangan regulasi di Bidang Kesehatan	Jumlah Rancangan Regulasi bidang kesehatan yang di fasilitasi)	3 Rancangan
17	Terlayannya Pegawai dalam Konsultasi dan Pendampingan Hukum	Persentase Pendampingan Kasus Hukum	100%
18	Terpenuhinya Pakaian Dinas ASN dan Atributnya di Lingkungan Dinkes Prov.Sulteng	(Persentase Pemenuhan Pakaian Dinas ASN dan Atributnya)	100%
19	Terpenuhinya Pengadaan Barang/Jasa melalui Elektronik	Jumlah Pengadaan Barang/Jasa melalui Elektronik	80%
20	Terpenuhinya Komitmen Belanja PDN dan Nilai TKDN	Persentase Komitmen Belanja PDN dan Nilai TKDN dalam Aplikasi Perindagkop	25 %
21	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan)	10 Unit
22	Tersedianya Jasa Pelayanan Listrik, Telepon, Internet dan Air	(Jumlah unit kerja yang terlayani jasa pelayanan listrik, telepon, Internet dan air)	5 Unit
23	Tersedianya Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor	(Jumlah unit kerja yang terlayani jasa keamanan dan kebersihan kantor)	5 Unit
24	Terbitnya Publikasi melalui media sosial	Jumlah Publikasi yang di terbitkan di media sosial)	1

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	121,461,000	APBD
2.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	120,143,000	APBD

Palu, 1 April 2024

PIHAK KEDUA

Sekretaris Prov. Sulawesi Tengah



Wayan Apriani
Wayan Apriani, SKM, M.Epid
19700417 199312 2 001

PIHAK PERTAMA

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Anton A. Lapanca, S.Sos
19660801 199203 1 012



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KESEHATAN

JL. R.A KARTINI NO. 11 Telp (0451) 421170 – 422343 – 421070 FAKSIMILI (0451) 454646
PALU 94111

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fransesca D. Rasubala, SKM, MAP
Jabatan : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat,
Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : dr. I Komang Adi Sujendra, Sp.PD
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 01 April 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH

dr. I Komang Adi Sujendra, Sp.PD
NIP. 19650325 199003 1 014

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG KESEHATAN
MASYARAKAT

Fransesca D. Rasubala, SKM, MAP
NIP. 19670216 199003 2 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KINERJA**

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas kesehatan Keluarga	Persentase kab/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan keluarga	77%
2.	Menurunnya Prevalensi Balita Stunting di Sulawesi Tengah	Prevalensi Balita Stunting	26%
3.	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam bidang Kesehatan	Persentase Kabupaten/Kota dengan minimal 80% Posyandu Aktif.	53%
		Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan Kebijakan GERMAS	46%
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pelayanan Promosi Kesehatan	100%
5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kesehatan lingkungan	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan program STBM	69%
		Persentase Desa yang melaksanakan Penggerakan SBS	9,2 %
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kesehatan lingkungan	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan program STBM	69%
		Persentase Desa yang melaksanakan Penggerakan SBS	9,2 %
7.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kesehatan, Olahraga dan Haji	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan program Kesehatan Kerja, Olahraga dan Haji	84%

APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
1.	Kegiatan penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi	
	Pengelolaan pelayanan promosi Kesehatan	Rp. 159.999.900
	Pengelolaan pelayanan Kesehatan lingkungan	Rp 240.000.000
	Pengelolaan pelayanan Kesehatan kerja dan olahraga	Rp 140.000.000
	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Haji	Rp 120,000.000

	Pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu dan anak	Rp 395.671.490
	Pengelolaan pelayanan Kesehatan usia produktif	Rp. 239.999.790
	Pengelolaan pelayanan Kesehatan usia lanjut	Rp. 159.999.850
	Pengelolaan pelayanan Kesehatan gizi Masyarakat	Rp. 686.939.150
	Total	Rp. 2.142.610.180
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
1.	Kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sector tingkat daerah provinsi	
	Peningkatan upaya advokasi Kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sector tingkat daerah provinsi	Rp 280.000.150
2.	Kegiatan pelaksanaan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka promotive preventif tingkat daerah provinsi	
	Penyelenggaraan promosi Kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat	Rp. 160.000.200
3.	Kegiatan pengembangan dan pelaksanaan upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah provinsi	Rp. 160.000.000
	Total	Rp. 760.000.250

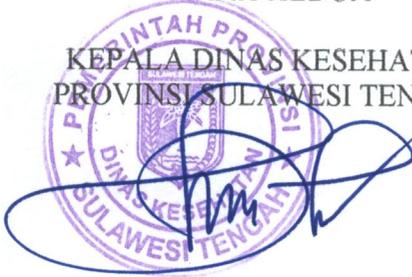
No	PROGRAM	Anggaran (Rp)
		APBN
	PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT	
1.	Seksi Promosi Kesehatan	Rp. 618.873.000
2.	Seksi Kesehatan lingkungan, Kesehatan kerja dan olahraga	
	Program Kesehatan lingkungan	Rp.502.775.000
	Program Kesehatan kerja dan olahraga	Rp.35.700.000
	Program Kesehatan haji	Rp.38.050.000
3.	Seksi Kesehatan keluarga dan gizi	

Program gizi	Rp.616.031.000
Program Kesehatan ibu dan anak	Rp.245.267.000
Total	Rp. 2.056.696.000

Palu, 01 April 2024

PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



dr. I Komang Adi Sujendra, Sp.PD
NIP. 19650325 199003 1 014

PIHAK PERTAMA

KEPALA BIDANG KESEHATAN
MASYARAKAT

Fransesca D. Rasubala, SKM.,M.P
NIP.19670216 199003 2 004



PEMERINTAH DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KESEHATAN

JALAN. R.A. KARTINI NO. 11 TELEPON (0451) 421170 – 422343 – 421070 FAXIMILI (0451) 454646
PALU 94111

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budiman AR, SKM
Jabatan : Kepala Seksi Kesling Kesjaor

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Fransesca D Rasubala, SKM.,MAP
Jabatan : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 1 April 2024

PIHAK KEDUA
PEJABAT ESELON 3

Fransesca D Rasubala, SKM.,MAP
NIP 19670216 199003 2 004

PIHAK PERTAMA
PEJABAT ESELON 4

Budiman AR, SKM
NIP 19750621 199503 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencanaan, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan dan supervisi terkait kebijakan pelaksanaan kabupaten/kota sehat	Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan perencanaan, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan dan supervise terkait kebijakan pelaksanaan kabupaten/kota sehat	11 Kab/Kota
2	Pendidikan dan pelatihan TPP yang memenuhi standar	Jumlah TPP yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai standar	70%
3	Pemberian bimbingan dan supervisi terkait pelaksanaan pemenuhan TFU sesuai standar	Jumlah TFU yang mendapatkan pemberian bimbingan dan supervisi sesuai standar	75%
4	Perencanaan, pengawasan dan Monitoring terkait pelaksanaan pemenuhan Sarana Air Minum sesuai standar	Jumlah sarana air minum yang dilakukan perencanaan, pengawasan dan monitoring terkait pelaksanaan pemenuhan Sarana Air Minum sesuai standar	75%
5	Perencanaan, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan dan supervisi terkait pelaksanaan Stop Buang Air Sembarangan di Desa/Kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan perencanaan, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan dan supervise terkait pelaksanaan Stop Buang Air Sembarangan di Desa/Kelurahan	75%
6	Perencanaan, pengawasan dan monitoring terkait RS yang menyelenggarakan kesehatan lingkungan	Jumlah RS yang mendapatkan perencanaan, pengawasan dan monitoring terkait penyelenggaraan kesehatan lingkungan	60%
7	Perencanaan, pengawasan serta Monitoring, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait RS dan Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar	Jumlah RS dan Puskesmas yang mendapatkan Perencanaan, pengawasan serta Monitoring, pemberian bimbingan, supervise dan konsultasi terkait pengelolaan limbah medis sesuai standar	40%

8	Perencanaan, sosialisasi, pemberian bimbingan, penyusunan pedoman dan supervisi terkait Kabupaten/kota yang menyelenggarakan adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan lingkungan	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Perencanaan, sosialisasi, pemberian bimbingan, penyusunan pedoman dan supervise terkait penyelenggaraan adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan lingkungan	30%
9	Perencanaan, sosialisasi, koordinasi dan pembinaan terkait pelaksanaan kesehatan kerja di Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yang melakukan perencanaan, sosialisasi, koordinasi dan pembinaan terkait pelaksanaan kesehatan kerja di Kab/Kota	11 Kab/Kota
10	Perencanaan, sosialisasi, koordinasi dan pembinaan terkait pelaksanaan skrining kesehatan di tempat kerja	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan skrining kesehatan bagi pekerja	90%
11	Perencanaan, sosialisasi, koordinasi dan pembinaan terkait peningkatan aktivitas fisik di puskesmas	Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan aktivitas fisik	90%
12	Pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi dan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan program kesehatan haji	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan program kesehatan haji	84%
13	Pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi dan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan program kesehatan haji	Jumlah penetapan status isthithoah calon Jemaah haji	2097 CJH

UNIT KINERJA

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Kesehatan Lingkungan Sub Kegiatan : Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Rp 240.000.000 Rp 502.775.000	APBD APBN
2. Kesehatan Kerja dan Olahraga Sub Kegiatan : Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan Olahraga di tempat kerja	Rp 160.000.000 Rp 35.700.000	APBD APBN
3. Kesehatan Haji Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Rp 120.000.000 Rp 38.050.000	APBD APBN

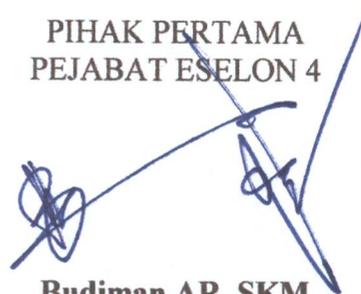
Palu, 1 April 2024

PIHAK KEDUA
PEJABAT ESELON 3



Fransesca D Rasubala, SKM.,MAP
NIP 19670216 199003 2 004

PIHAK PERTAMA
PEJABAT ESELON 4



Budiman AR, SKM
NIP 19750621 199503 1 003



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KESEHATAN

JL. R.A KARTINI NO. 11 Telp (0451) 421170 – 422343 – 421070 FAKSIMILI (0451) 454646

P A L U 94111

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fahri, SKM
Jabatan : Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Fransesca D.Rasubala, SKM.,M.A.P
Jabatan : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperluhkanserta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 1 April 2024

PIHAK KEDUA

**KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULTENG**

**Fransesca D.Rasubala, SKM.,M.A.P
NIP. 19670216 199003 2 004**

PIHAK PERTAMA

**KEPALA SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULTENG**

**Fahri, SKM
NIP.19800814 200902 1 001**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
UNIT KINERJA**

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas kesehatan Keluarga	Persentase kab/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan keluarga	77%
2.	Menurunnya Prevalensi Balita Stunting di Sulawesi Tengah	Prevalensi Balita Stunting	26%
3.	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam bidang Kesehatan	Persentase Kabupaten/Kota dengan minimal 80% Posyandu Aktif.	53%
		Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan Kebijakan GERMAS	46%
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Promosi Kesehatan	Presentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pelayanan Promosi Kesehatan	100%
5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kesehatan lingkungan	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan program STBM	69%
		Persentase Desa yang melaksanakan Penggerakan SBS	9,2 %
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kesehatan lingkungan	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan program STBM	69%
		Persentase Desa yang melaksanakan Penggerakan SBS	9,2 %
7.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kesehatan, Olahraga dan Haji	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan program Kesehatan Kerja, Olahraga dan Haji	84%

APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
1.	Kegiatan penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi	
	Pengelolaan pelayanan promosi Kesehatan	Rp. 159.999.900
	Pengelolaan pelayanan Kesehatan lingkungan	Rp 240.000.000
	Pengelolaan pelayanan Kesehatan kerja dan olahraga	Rp 140.000.000
	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Haji	Rp 120,000.000
	Pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu dan anak	Rp 395.671.490

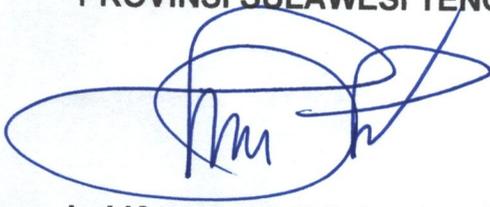
	Pengelolaan pelayanan Kesehatan usia produktif	Rp. 239.999.790
	Pengelolaan pelayanan Kesehatan usia lanjut	Rp. 159.999.850
	Pengelolaan pelayanan Kesehatan gizi masyarakat	Rp. 686.939.150
Total		Rp. 2.142.610.180
11	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
1.	Kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sector tingkat daerah provinsi	
	Peningkatan upaya advokasi Kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sector tingkat daerah provinsi	Rp 280.000.150
2.	Kegiatan pelaksanaan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) prilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka promotive preventif tingkat daerah provinsi	
	Penyelenggaraan promosi Kesehatan dan prilaku hidup bersih dan sehat	Rp. 160.000.200
3.	Kegiatan pengembangan dan pelaksanaan upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah provinsi	Rp. 160.000.000
Total		Rp. 760.000.250

No	PROGRAM	Anggaran (Rp)
		APBN
	PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT	
1.	Seksi promosi Kesehatan	Rp. 618.873.000
2.	Seksi Kesehatan lingkungan, Kesehatan kerja dan olahraga	
	Program Kesehatan lingkungan	Rp.502.775.000
	Program Kesehatan kerja dan olahraga	Rp.35.700.000
	Program Kesehatan haji	Rp.38.050.000
3.	Seksi Kesehatan keluarga dan gizi	
	Program gizi	Rp.616.031.000
	Program Kesehatan ibu dan anak	Rp.245.267.000
Total		Rp. 2.056.696.000

Palu, 1 April 2024

PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



dr. I Komang Adi Sujendra, Sp.PD
NIP. 19650325 199003 1 014

PIHAK PERTAMA

KEPALA BIDANG KESEHATAN
MASYARAKAT



Fransesca D. Rasubala, SKM.,M.A.P
NIP.19800814 200902 1 001



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KESEHATAN**

JL. R.A KARTINI NO. 11 Telp (0451) 421170 – 422343 – 421070 FAKSIMILI (0451) 454646
PALU 94111

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Jumriani
Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : dr. I Komang Adi Sujendra, Sp.PD
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 01 April 2024

PIHAK KEDUA

**KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULTENG**

dr. I Komang Adi Sujendra, Sp.PD
Nip. 19650325 199003 1 014

PIHAK PERTAMA

**KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT**

dr. Jumriani
NIP. 19730914 200312 2 002

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

NO	SASARAN INDIKATOR/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Layanan Deteksi Dini Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular	Persentase kab/kota yang melakukan deteksi dini faktor resiko PTM	100%
2.	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan ODMK dan NAPZA	(Persentase Kab/kota yang melaksanakan deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan penyalahgunaan napza)	50%
3.	Meningkatnya Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization (UCI)</i>	85,63%
4.			
5.	Meningkatnya capaian imunisasi dasar lengkap bayi usia <12 bulan	capaian imunisasi dasar lengkap bayi usia <12 bulan	85%
6.	Meningkatnya imunisasi pada bayi usia 18 - 24 bulan	capaian imunisasi Baduta Lengkap bayi usia 18 - 24 bulan	95%
7.	Meningkatnya imunisasi pada anak usia sekolah dasar	Capaian imunisasi anak usia sekolah dasar	95%
8.	Meningkatnya skrining pada wanita usia subur	capaian status T2+ pada wanita usia subur	80%
9.	Meningkatnya Pelayanan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat pada saat KLB	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk yang terdampak dan berisiko pada saat KLB	100%
10.	Terlaksananya pembinaan pengelolaan pelayanan penyakit infeksi emerging	Perentase Kab/kota yang di lakukan pembinaan penyakit infeksi emerging	69%
11.	Terlaksananya pembinaan surveilans kesehatan berbasis masyarakat	Perentase Kab/kota yang di lakukan pembinaan surveilans kesehatan masyarakat	46%
12.		Non Polio AFP rate	60
13.		Discarded Rate Campak-Rubella	142
14.	Meningkatnya penemuan kasus TBC	Persentase penemuan capaian kasus TBC	2%
15.	Meningkatnya ketersediaan layanan bagi kelompok beresiko.	Jumlah kasus HIV yang di temukan dan di tindaklanjuti pada kelompok berisiko	700 Org

16	Meningkatnya Penanggulangan Penemuan Penyakit Kusta	Cakupan Penemuan Kasus Baru Kusta	15%
17.	Meningkatnya Tatalaksana Penanganan Penderita ISPA di Kab/Kota	Presentase Penemuan Pneumonia balita Kab/Kota	75%
18.	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan dan Penatalaksanaan kasus Hepatitis B sesuai standart	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan deteksi dini Hepatitis B	100%
19.	Meningkatnya Penatalaksanaan Kasus Diare Sesuai Standar	Persentase Kabupaten Kota Yang Melaksanakan Pelayanan Kasus Diare Sesuai Standar	100% dari kasus diare
20.	Tercapainya Eliminasi Malaria di Kab/Kota	Persentase Kab/Kota Yang Mencapai Eliminasi Malaria	69%
21.	Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit DBD	Persentase kabupaten/Kota yang Inden Rate < 10 per 100.000 penduduk	95%
22.	Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit filariasis dan kecacingan	(Persentase Kab/Kota yang mencapai eliminasi Filariasis)	69,23%
23.	Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian zoonosis (rabies)	Persentase Kasus GHPR yang ditangani sesuai standar	100%
24.	Terlaksananya Upaya Pengendalian Fokus Keong	1. Prevalensi schistosomiasis < 0 2. Infection rate keong < 0 3. Infection rate tikus < 0	2 Kabupaten Poso dan Sigi (28 Desa)
25.	Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian vektor	Persentase Kab/Kota yang melaporkan pengendalian Vektor terpadu	70%
26	Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian frambusia	Persentase Kab/Kota Eradikasi (bebas) frambusia	23%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	
		APBD	APBN
1.	Pengelolaan pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Rp.1,504,875,000	
2.	Program upaya pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Rp.1,808,777,416	
3.	Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)	Rp. 110,514,000	
4.	Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan kecanduan NAPZA	Rp. 100,000,150	
5.	Pengelolaan surveilans kesehatan	Rp. 297,385,000	
6.	Invesstigasi lanjutankejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal oleh kabupaten/kota	Rp. 199,861,500	
7.	Pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular (Hibah AIDS)	Rp. 300.000.000	
	Jumlah	Rp.4,321,413,066	

Palu, 01 April 2024

PIHAK KEDUA

**KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULTENG**



dr. I Komang Adi Sujendra, Sp.PD
Nip. 19650325 199003 1 014

PIHAK PERTAMA

**KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT**



dr. Jumriani
Nip. 19730914 200312 2 002



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KESEHATAN DAERAH

Jl. R.A Kartini Nomor 11 Telp. (0451) 421070; 454646 Faksimili (0451) 454646
PALU 94111

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. Moh. Ikbal

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Pencegahan Penyakit

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : dr. Jumriani

Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

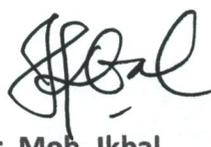
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 01 April 2024

PIHAK KEDUA
**KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
DAN PENCEGAHAN PENYAKIT**


dr. Jumriani
19730914 200312 2 002

PIHAK PERTAMA
**KEPALA SEKSI PENGENDALIAN
DAN PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR**


dr. Moh. Ikbal
19741229 201412 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KINERJA

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pemantauan berkala Penemuan Penderita Kusta	1. Jumlah penderita yang ditemukan dan dipantau	300 Orang
2	Tersusunnya Laporan Distribusi Obat Kusta Per Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Distribusi Obat Kusta yang disusun	13 Laporan
3	Terlaksananya On the job training cluster puskesmas	2. Jumlah orang yang dilakukan on the job training	50 Orang
4	Terlaksananya Pembinaan Tatalaksana Kasus Kusta	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan pembinaan	13 Kab.Kota
5	Terlaksananya Pendampingan pemberian obat pencegahan kusta	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan pendampingan	13 Kab.Kota
6	Pendampingan Skrining umur < 15 tahun di Kab./Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan pendampingan skrining kusta di usia < 15 tahun	13 Kab.Kota
7	Terbinanya Kabupaten Kota terkait Tatalaksana Kasus Pneumonia Balita	Jumlah Kabupaten Kota yang terbina	13 Kab.Kota
8	Terlaksananya Penyusunan Laporan Program ISPA	Jumlah Laporan tahunan ISPA	1 Laporan
9	Terlaksananya Pengalokasian Logistik Program ISPA (ARI soundtimer, pulse oximeter)	Jumlah Laporan pengalokasian Logistik Program ISPA	1 Laporan
10	Tersedianya data evaluasi capaian indikator program ISPA kab/kota	Jumlah laporan evaluasi capaian indikator program ISPA kab/kota	12 laporan
11	Terlaksananya pembinaan teknis program ISPA	OJT Tatalaksana Program ISPA, Monev	13 Kab./Kota
12	Pendampingan Deteksi dini Hepatitis B dan atau C (DDHBC) pada ibu hamil di 13 Kab/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang di dampingi melakanakan Deteksi dini Hepatitis B dan atau C (DDHBC) pada ibu hamil	13 Laporan
13	Terlaksananya penyusunan laporan program hepatitis	Jumlah laporan tahunan hepatitis1	1 Laporan
14	Teralokasiannya logistik program Hepatitis (RDT HBsAg, RDT anti HBS dan HBIG) untuk populasi beresiko (nakes/nasis ke Kab/Kota	13 Kab/kota mendapatkan logistik program Hepatitis1	1 Laporan
15	Terlaksananya pembinaan teknis program hepatitis	OJT manajemen dan tatalaksana pembinaan program, MONEV1	13 Kab.Kota
16	Terlaksananya penyaluran zinc dan oralit	Jumlah kab/kota yang mendapatkan penyaluran zinc dan oralit	13 Kab.Kota

17	Terlaksananya Monev tata laksana kasus diare sesuai standar	Jumlah kab/kota yang melaksanakan tata laksana yang sesuai standar	13 Kab.Kota
18	Terlaksananya Survey Vektor Malaria di Kabupaten / Kota	Laporan Hasil Survey Vektor Malaria	13 Laporan
19	Terlaksananya Assesment Eliminasi Malaria	Jumlah Kab/Kota yang di eliminasi Malaria	7 Kab
20	Terlaksananya Penyelidikan Epidemiologi 1-2-5 Malaria	Laporan Hasil Penyelidikan Epidemiologi 1-2-5 Malaria	7 Laporan
21	Terlaksananya Pencatatan dan Pelaporan e-Sismal yang berkualitas	Jumlah Dokumen Pencatatan dan Pelaporan e-Sismal yang berkualitas	1 Dokumen
22	Terlaksananya Pemberantasan Sarang Nyamuk Melalui Fogging Fokus	Jumlah Dukungan Fogging Terhadap Kasus DBD	13 Kali Fogging
23	Terlaksananya pelaporan kegiatan arbovirosis/DBD	Pengumpulan data kegiatan DBD	13 Kab.Kota
24	Terlaksananya pembinaan program pengendalian arbovirosis/DBD	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian penyakit arbovirosis/DBD	13 Kab.Kota
25	Terlaksananya fasilitasi monitoring assignment pencapaian IR DBD	Jumlah Kab/Kota yang di monitoring terkait assement IR DBD	13 Kab.Kota
26	Terlaksananya pengendalian vektor penyakit DBD melalui survei jentik	Pelaksanaan survei jentik	13 Kab.Kota
27	Terlaksananya pengendalian vektor melalui fogging focus	pelaksanaan fogging focus	24 Locus
28	Terlaksananya Pendistribusian bahan Abate program DBD	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pendistribusian logistik Abate	13 Kab.Kota
29	Terlaksananya Survey Darah Jari Oleh Tim di 3 Lokasi Yang Belum Eliminasi Filariasis	Jumlah Kab / Kota yang dilakukan Survey Darah Jari	Laporan
30	Terlaksananya Pelaporan Filariasis dan kecacingan	Jumlah Laporan	Laporan
31	Terlaksananya pembinaan program pengendalian arbovirosis/DBD	Jumlah Instrumen Monev	Instrumen
32	Terlaksananya Pengelolaan Pendistribusian Tablet dan sirup Abdenazol dan DEC	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan obat Tablet Albendazol dan DEC	9 Kab.Kota
33	Terlaksananya Pendampingan dan Ferifikasi Kasus Filariasis	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pendampingan Verifikasi kasus filariasis	13 Kab.Kota
34	Terlaksananya Tata Laksana Manajemen Kasus Kronis	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Tata Laksana Manajemen Kasus Kronis	9 Kab.Kota

35	Terlaksananya penanganan kasus gigitan hewan penular rabies	Persentase Kasus GHPR yang ditanganidan dilaporkan	100
36	Terlaksananya pelaporan GHPR dan kasus Rabies	Jumlah laporan	13 Kab.Kota
37	Terlaksananya pendampingan kewaspadaan dini terhadap peningkatan kasus dan KLB Rabies di kab/kota	Rabies center yang dibentuk	8 Kab.
38	Terlaksananya pendampingan dan Verifikasi Rumor kasus Rabies	Jumlah kab/kota yang endemis rabies	13 Kab.Kota
39	Terlaksananya penyebaran informasi dengan pengembangan media KIE	Tersedianya media KIE	Media KIE
40	terlaksananya OJT tatalaksana kasus GHPR dan tatalaksana kasus Rabies	Pengelola Rabies / petugas Rabies center	13 Kab.Kota
41	Terlaksananya Pengobatan Schistosomiasis melalui Pengobatan Massal.	Presentase Pengobatan penderita Schistosomiasis di wilayah Lindu, Napu dan Bada	90%
42	Terlaksananya Pelaporan Schistosomiasis	Jumlah Kab/Kota yang melaporkan schistosomiasis	2 kab
43	Terlaksananya Pemantauan Fokus keong	Jumlah Fokus Keong yang diamati	132 Fokus
44	Terlaksananya Penyemprotan Fokus Keong	Jumlah Fokus keong Positif yang di interfensi	85 Fokus
45	Terlaksananya Pengobatan masal POPM Schistosomiasis	Prosesntase Jumlah orang yang di Obati	90
46	Terlaksananya pembinaan pengendalian vector	Jumlah instrumen kegiatan	1 Instrumen
47	Terlaksananya OJT silantor dan indikator kinerja kegiatan (IKK)	Jumlah orang yang dilakukan on the job training	40 Orang
48	Terlaksananya survei vektor dan binatang pembawa penyakit	Jumlah lokasi survei	120 Lokasi
49	Terlaksananya pendampingan pengendalian vektor secara fisik kimia biologi	Jumlah pendampingan pengendalian vektor	13 Kab. Kota
50	Terlaksananya pemetaan daerah lokus vektor dan binatang pembawa penyakit	Jumlah lokasi yang dipetakan	10 Lokasi
51	Terlaksananya uji resistensi vektor terhadap insektisida	jumlah lokasi kegiatan	10 Lokus
52	Terlaksananya survei Leptospirosis	Jumlah fokus yang di survei	10 Lokasi
53	Terlaksananya Skrining untuk memastikan tidak adanya kasus penularan frambusia	Jumlah Kab/Kota Yang dilakukan Zeroo Kasus.	3 Kab.
54	Terlaksananya pelaporan program Frambusia	Jumlah Kab/Kota Yang Melaporkan Zeroo Kasus.	13 kab.Kota

55	Terlaksananya pendistribusian RDT Frambusia	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan logistik frambusian	6 Kab.
56	Terlaksananya Assesment eradikasi Frambusia	Terbentuknya Tim Eradikasi Frambusia	2 Kab
57	Terlaksananya pembentukan tim eradikasi Frambusia	Jumlah pendampingan tim eradikasi Frambusia	2 Tim

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2,108,777,416	APBD

Palu, 01 April 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
DAN PENCEGAHAN PENYAKIT



dr. Jumriani
19730914 200312 2 002

PIHAK PERTAMA
KEPALA SEKSI PENGENDALIAN
DAN PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR



dr. Moh. Ikbal
197412292014121001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KESEHATAN DAERAH

Jl. R.A Kartini Nomor 11 Telp. (0451) 421070; 454646 Faksimili (0451) 454646
PALU 94111

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Evi Hinele, SKM

Jabatan : Kepala Seksi Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Napza

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : dr. Jumriani

Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 01 April 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
DAN PENCEGAHAN PENYAKIT

dr. Jumriani
19730914 200312 2 002

PIHAK PERTAMA
KEPALA SEKSI PTM, KESWA DAN NAPZA
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Evi Hinele, SKM
19730825 199303 2 004

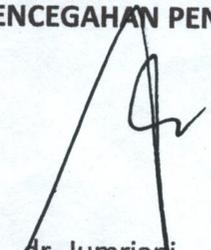
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KINERJA

No (1)	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
	Terdampinginya Kab/Kota dalam Skrining PTM Prioritas	1. Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Pendampingan Skrining PTM Prioritas	13 Kab/Kota
	Tersosialisasinya konseling Upaya Berhenti Merokok (UBM) bagi Petugas Puskesmas	Jumlah Petugas Puskesmas yang ditingkatkan kapasitasnya dalam konseling Upaya Berhenti Merokok (UBM)	34 orang
	Terevaluasinya Kab/Kota terkait implementasi kawasan tanpa rokok ditingkat kecamatan dan desa	2. Jumlah Kab/kota yang dievaluasi terkait implementasi kawasan tanpa rokok ditingkat kecamatan dan desa	8 kabupaten
	Tersosialisasinya dashboard e-monev KTR pada petugas Puskesmas	Jumlah petugas puskesmas yang ditingkatkan pengetahuannya tentang dashboard e-monev KTR	105 orang
	Cakupan merokok penduduk usia 10-18thn	Persentase merokok penduduk usia 10-18thn	0,30%
	Terevaluasinya Puskesmas yang melaksanakan pelayanan terpadu (PANDU) PTM	Jumlah Puskesmas yang dievaluasi terkait pelayanan terpadu (PANDU) PTM	50 Puskesmas
	Terbimbingnya petugas Puskesmas terkait skrining Kesehatan jiwa melalui Aplikasi SIMKESWA dan SIJIWA	Jumlah petugas Puskesmas yang dibimbing tentang Aplikasi SIMKESWA dan SIJIWA	150 orang
	Terbimbingnya petugas Puskesmas terkait skrining NAPZA melalui Aplikasi SINAPZA dan SELARAS	Jumlah petugas Puskesmas yang dibimbing tentang Aplikasi SINAPZA dan SELARAS	150 orang
	Tersusunnya Laporan Program ISPA	Jumlah Laporan tahunan ISPA	1 Laporan
	Terdistribusinya Logistik Program ISPA (pulse oximeter) di Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yang terdistribusi Logistik Program ISPA	6 Kab/Kota
	Terevaluasinya capaian indikator program ISPA kab/kota	Jumlah laporan evaluasi capaian indikator program ISPA kab/kota	12 Laporan
	Terbinanya Petugas Pengelola Program ISPA di Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Puskesmas	Jumlah Petugas Pengelola Program yang terbina	28 Petugas
	Terbinanya Kabupaten Kota terkait Tatalaksana Kasus Pneumonia Balita	Jumlah Kabupaten Kota yang terbina	13 kab/kota

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Rp. 632.958.000	APBD
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Rp. 110.514.000	APBD
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Kecanduan NAPZA	Rp. 100.000.150	APBD
4	Pelaksanaan Penilaian Implementasi KTR 7 Tahunan	Rp. 150.440.000	APBN
5	Pelaksanaan Fasilitas Monev Supervisi Pencegahan dan Pengendalian PTM	Rp. 99.630.000	APBN

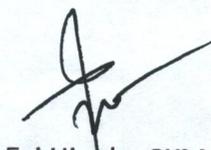
Palu, , 01 April 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
DAN PENCEGAHAN PENYAKIT


Dr. Jumriani

19730914 200312 2 002

PIHAK PERTAMA
KEPALA SEKSI PTM, KESWA DAN NAPZA
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI
TENGAH


Evi Hinele, SKM

19730825 199303 2 004



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan R.A.Kartini No. 11 Telp. (0451) 421070,421170,421028 Faksimili (0451) 421170 Palu 94111

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hestiwati, SKM, M.Kes

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : dr. I Komang Adi Sujendra, Sp.PD

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperluhkanserta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperluhkan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 01 April 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

dr. I Komang Adi Sujendra, Sp.PD
NIP. 19650325 199003 1 014

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

Hestiwati, SKM, M.Kes
NIP. 19780522 200804 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KINERJA

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	
2	Meningkatnya akses dan kualitas layanan rujukan	Persentase RS yang Terakreditasi	100%
		Jumlah Rumah Sakit yang mengembangkan layanan prioritas	10 RS
3	Meningkatnya akses dan kualitas layanan Primer	Persentase FKTP yang terakreditasi	100%
		Persentase Puskesmas yang menerapkan ILP	10%
4	Meningkatnya akses dan kualitas fasyankes lainnya	Persentase faskes lainnya yang terakreditasi	100%
		Jumlah RS yang memiliki BDRS/UTD	12 RS
5	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Persentase fasyankes yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	60%
6	Meningkatnya Pembiayaan Jaminan Kesehatan	Persentase penduduk yang mendapatkan jaminan Kesehatan	>95%
		Jumlah Kab/Kota yang memiliki dokumen DHA	4 lokasi

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan , UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp. 42.467.354.468,-	APBD
2. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Rp. 159.999.750,-	
Sub Kegiatan		
1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Rp. 123,483,700,-	

- | | |
|--|----------------------|
| 2. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Rp. 40.159.999.950,- |
| 3. Pembinaan pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan | Rp. 1,864,529, 850,- |
| 4. Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas | Rp. 160,000.000,- |
| 5. Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik | Rp. 159,340.968,- |
| 6. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Rp. 159,999,750,- |

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



dr. I Komang Adi Sujendra, Sp.PD
NIP. 19650325 199003 1 014

Palu, 01 April 2024
PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN



Hestiwati, SKM, M.Kes
NIP. 19780522 200804 2 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan.R.A Kartini Nomor 11 Telepon (0451) 421170,421070 Palu 94111

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fatma A. Deu.SKM.,M.Si
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Hestiwati, SKM.,M,Kes
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperluhkanserta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperluhkan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 1 April 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG
PELAYANAN KESEHATAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH

Hestiwati, SKM.,M.Kes
NIP. 19780522 200804 2 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA SEKSI PELAYANAN
KESEHATAN RUJUKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Fatma, A. Deu, SKM.,M.Si
NIP.19720324 199703 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 UNIT KINERJA

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersusunnya dokumen Perencanaan program kerja pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah dokumen perencanaan/program kerja pelayanan kesehatan rujukan yang dibuat	1 Dokumen
		Jumlah instrumen monitoring dan evaluasi kesiapan akreditasi RS Pratama	1 Instrumen
		Jumlah instrumen monitoring dan evaluasi perizinan berusaha yang dibuat	1 Instrumen
		Jumlah RS yang dilakukan pendampingan persiapan akreditasi RS	6 RS
		Jumlah Pertemuan Koordinasi Teknis Program Peningkatan Mutu Pelayanan FKRTL yang dilakukan	1 Kali
		Jumlah RS yang dilakukan pemantauan pengukuran indikator nasional mutu RS	40 RS
		Jumlah RS yang dilakukan monitoring dan evaluasi hasil perencanaan perbaikan strategis (PPS) pasca akreditasi RS	34 RS
		Jumlah RS yang dilakukan monitoring dan evaluasi persiapan visitasi penilaian kesesuaian perizinan berusaha RS	2 RS
		Jumlah RS yang dilakukan visitasi penilaian kesesuaian perizinan berusaha RS	2 RS
		Jumlah RS yang dilakukan monitoring dan evaluasi penerapan BLUD termasuk capaian SPM RS	17 RS
2.	Tersusunnya Instrumen pemantauan Penyelenggaraan Layanan Penyakit Prioritas di Rumah Sakit	Jumlah instrumen pemantauan program pengembangan layanan prioritas yang dibuat	9 Instrumen
3.	Terevaluasinya Penyelenggaraan Layanan Penyakit Prioritas di Rumah Sakit	Jumlah RS yang dilakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program pengembangan layanan prioritas	10 RS
4.	Terdatanya Kesiapan Penyelenggaraan Layanan Penyakit Prioritas di Rumah Sakit	Jumlah RS yang dilakukan mapping kesiapan program pengembangan layanan prioritas	10 RS
5.	Tersusunnya Instrumen Pemantauan dan evaluasi Rumah Sakit PONEK	Jumlah instrumen pemantauan dan evaluasi Rumah Sakit PONEK yang dibuat (1 instrument)	1 Instrumen
6.	Tersusunnya Instrumen Pemantauan dan evaluasi Penerapan BLUD Rumah Sakit	Jumlah instrumen monitoring dan evaluasi penerapan BLUD yang dibuat	1 Instrumen

7.	Tersusunnya instrumen monitoring dan evaluasi penerapan Telemedicine di Rumah Sakit	Jumlah instrumen monitoring dan evaluasi penerapan Telemedicine yang dibuat (1 instrument)	1 Instrumen
8.	Tersusunnya instrumen monitoring dan evaluasi penerapan SISRUTE	Jumlah instrumen monitoring dan evaluasi penerapan SISRUTE yang dibuat	1 Instrumen
9.	Tersusunnya instrumen monitoring dan evaluasi data RS Online dan SIRS	Jumlah instrumen monitoring dan evaluasi data RS Online dan SIRS yang dibuat	1 Instrumen
10.	Tersusunnya instrumen monitoring dan evaluasi data RME	Jumlah instrumen monitoring dan evaluasi data RME yang dibuat	1 Instrumen
11.	Terevaluasinya Rumah Sakit PONEK	Jumlah Rumah Sakit PONEK yang dilakukan monitoring evaluasi	40 Rumah Sakit
		Jumlah instrumen monitoring dan evaluasi kesiapan akreditasi RS Pratama	1 Instrumen
		Jumlah instrumen monitoring dan evaluasi perizinan berusaha yang dibuat	1 Instrumen
		Jumlah RS yang dilakukan pendampingan persiapan akreditasi RS	6 RS
		Jumlah Pertemuan Koordinasi Teknis Program Peningkatan Mutu Pelayanan FKRTL yang dilakukan	1 Kali
		Jumlah RS yang dilakukan pemantauan pengukuran indikator nasional mutu RS	40 RS
		Jumlah RS yang dilakukan monitoring dan evaluasi hasil perencanaan perbaikan strategis (PPS) pasca akreditasi RS	34 RS
		Jumlah RS yang dilakukan monitoring dan evaluasi persiapan visitasi penilaian kesesuaian perizinan berusaha RS	2 RS
		Jumlah RS yang dilakukan visitasi penilaian kesesuaian perizinan berusaha RS	2 RS
		Jumlah RS yang dilakukan monitoring dan evaluasi penerapan BLUD termasuk capaian SPM RS	17 RS
12.	Tersusunnya Instrumen pemantauan Penyelenggaraan Layanan Penyakit Prioritas di Rumah Sakit	Jumlah instrumen pemantauan program pengembangan layanan prioritas yang dibuat	9 Instrumen
13.	Terevaluasinya Penyelenggaraan Layanan Penyakit Prioritas di Rumah Sakit	Jumlah RS yang dilakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program pengembangan layanan prioritas	10 RS
14.	Terdatanya Kesiapan Penyelenggaraan Layanan Penyakit Prioritas di Rumah Sakit	Jumlah RS yang dilakukan mapping kesiapan program pengembangan layanan prioritas	10 RS
15.	Tersusunnya Instrumen Pemantauan dan evaluasi Rumah Sakit PONEK	Jumlah instrumen pemantauan dan evaluasi Rumah Sakit PONEK yang dibuat (1 instrument)	1 Instrumen
16.	Tersusunnya Instrumen Pemantauan dan evaluasi Penerapan BLUD Rumah Sakit	Jumlah instrumen monitoring dan evaluasi penerapan BLUD yang dibuat	1 Instrumen

17.	Tersusunnya instrumen monitoring dan evaluasi penerapan Telemedicine di Rumah Sakit	Jumlah instrumen monitoring dan evaluasi penerapan Telemedicine yang dibuat (1 instrument)	1 Instrumen
18.	Tersusunnya instrumen monitoring dan evaluasi penerapan SISRUTE	Jumlah instrumen monitoring dan evaluasi penerapan SISRUTE yang dibuat	1 Instrumen
19.	Tersusunnya instrumen monitoring dan evaluasi data RS Online dan SIRS	Jumlah instrumen monitoring dan evaluasi data RS Online dan SIRS yang dibuat	1 Instrumen
20.	Tersusunnya instrumen monitoring dan evaluasi data RME	Jumlah instrumen monitoring dan evaluasi data RME yang dibuat	1 Instrumen
21.	Terevaluasinya Rumah Sakit PONEK	Jumlah Rumah Sakit PONEK yang dilakukan monitoring evaluasi	40 Rumah Sakit
		Jumlah RS yang dilakukan monitoring dan evaluasi penerapan RME	40 RS
		Jumlah RS yang dilakukan mapping kesiapan penerapan RME	40 RS
		Jumlah RS yang dilakukan monitoring dan evaluasi penerapan telemedicine	5 RS
		Jumlah RS yang dilakukan mapping kesiapan penetapan lokus penerapan telemedicine	2 RS
		Jumlah RS yang dilakukan pendampingan dalam penyusunan profil RS	40 RS
		Jumlah RS yang dilakukan monitoring dan evaluasi penerapan telemedicine	5 Rs
		Jumlah Kabupaten yang difasilitasi implementasi telemedicine	2 Kabupaten
		Jumlah Pertemuan Koordinasi Teknis Penyelenggaraan SISRUTE yang dilaksanakan	1 Kali
		Jumlah RS yang dilakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SISRUTE	40 RS
		Jumlah RS yang dilakukan monitoring dan evaluasi data SIRS dan RS Online	40 RS
22.	Terbinanya Fasilitas Kesehatan lainnya dalam pemenuhan standar mutu pelayanan/akreditasi	Jumlah instrumen monitoring dan evaluasi persiapan akreditasi laboratorium	1 Instrument
		Jumlah Laboratorium yang dilakukan pendampingan persiapan akreditasi	3 Laboratorium
		Jumlah Laboratorium yang dilakukan monitoring dan evaluasi pengukuran indikator nasional mutu	3 Laboratorium
		Jumlah Laboratorium yang dilakukan visitasi penilaian kesesuaian perizinan berusaha	1 Laboratorium
23.	Tersusunnya Instrumen Pemantauan dan Evaluasi KRIS JKN	Jumlah instrumen pemantauan dan evaluasi KRIS JKN yang dibuat	1 Instrumen

24.	Terevaluasinya penerapan KRIS di Rumah Sakit	Jumlah RS yang dilakukan monitoring dan evaluasi penerapan KRIS	40 RS
25.	Tertanganinya Permasalahan Klinis di Rumah Sakit	Persentase Dokumen Permasalahan Klinis yang ditindak lanjuti	100%
26.	Terpetekannya Kesiapan Penerapan KRIS di RS	Jumlah RS yang dilakukan mapping kesiapan penerapan KRIS	40 RS
27.	Tersinkronisasinya Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional antar Stakeholder	Jumlah Rekomendasi Sinkronisasi	4 Rekomendasi
28.	Terpenuhinya Premi Penerima Bantuan luran	Jumlah Penerima Bantuan luran yang dibayarkan oleh pemerintah daerah	1.156.366 Jiwa
29.	Terpenuhinya Premi Penerima Bantuan luran BPJS Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah yang berhak	Jumlah Pekerja Bukan Penerima Upah yang dibayarkan oleh pemerintah daerah	27.000 jiwa
		Jumlah kab/Kota yang dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program jaminan kesehatan	13 Kab/Kota
		Tersosialisasinya Program Kerja Tim Pertimbangan Klinis bagi Pengelola Program JKN di RS dan Puskesmas	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang mendapatkan sosialisasi
		Jumlah dokumen bahan evaluasi hasil perhitungan DHA yang dibuat	3 Dokumen
		Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi penyusunan dokumen DHA	3 Kabupaten
30.	Tersusunnya laporan program jaminan kesehatan	Jumlah dokumen laporan program jaminan kesehatan yang dibuat	1 Dokumen

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
	Pemenuhan upaya Kesehatan program dan upaya Kesehatan masyarakat	a. Penyediaan jaminan Kesehatan masyarakat	RP. 40,159,999,950
		b. Pengelolaan rujukan dan rujuk balik	RP. 159,340.968
		Penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan Kesehatan Tk. Daerah Provinsi	
		a. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan	RP. 159,999,750
TOTAL			Rp. 40,479,340,668

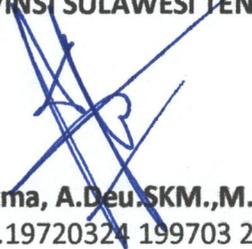
Palu, 1 April 2024

**PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG
PELAYANAN KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**Hestiawati, SKM., M.Kes
NIP. 19780522 200804 2 001**

**PIHAK PERTAMA
KEPALA SEKSI PELAYANAN
KESEHATAN DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**Fatma, A. Deu. SKM., M.Si
NIP. 19720324 199703 2 005**



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan.R.A Kartini Nomor 11 Telepon (0451) 421170,421070 Palu 94111

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Misnawati, SST.,M.Kes
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Hestiwati, SKM.,M,Kes
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperluhkanserta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperluhkan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 1 April 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG
PELAYANAN KESEHATAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH

Hestiwati, SKM.,M.Kes
NIP. 19780522 200804 2 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA SEKSI PRIMER DINAS
KESEHATAN PROVINSI SULAWESI
TENGAH

Misnawati, SST.M.,Kes
NIP.19781101 200502 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 UNIT KINERJA

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
	Terbinanya FKTP dalam pemenuhan standar mutu pelayanan /Akreditasi	Jumlah Peserta pertemuan percepatan survei akreditasi Puskesmas	34 Peserta	
		Jumlah Puskesmas yang dilakukan monitoring Pasca Pelaksanaan Survei Akreditasi	16 Puskesmas	
		Jumlah Peserta pertemuan percepatan Rekam Medis Elektronik Puskesmas	49 Peserta	
		Jumlah Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas yang di monitoring sampai bulan Mei 2024 melalui Aplikasi Data Fasyankes Online (DFO)	33 Puskesmas	
		Jumlah Pelaksanaan Akreditasi Klinik yang di monitoring melalui Aplikasi Data Fasyankes Online (DFO)	67 Klinik	
		Jumlah rekap laporan Indikator Nasional Mutu (INM) dan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) Puskesmas Per Kabupaten/Kota	218 Puskesmas	
		Jumlah rekap laporan Indikator Nasional Mutu (INM) dan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) Klinik Per Kabupaten/Kota	113 Klinik	
		Jumlah rekap laporan Indikator Nasional Mutu (INM) TPMD dan TPMDG Per Kabupaten/Kota	100 TPMd/TPMDG	
		Jumlah Feed Back Laporan INM dan IKP Puskesmas ke Kabupaten/Kota Tahun 2024	6 Dokumen	
		Jumlah Feed Back Laporan INM dan IKP Klinik ke Kabupaten/Kota	4 Dokumen	
		Jumlah Feed Back Laporan INM TPMD dan TPMDG ke Kabupaten/Kota	4 Dokumen	
		Jumlah Penerapan RME (Rekam medik Eelektronik) di FKTP yang di monitoring melalui Aplikasi Data Fasyankes Online (DFO)	12 Dokumen	
		Teregistrasinya Klinik di Provinsi Sulawesi Tengah	Terlaksananya Rapat Koordinasi Klinik Pratama	25 Peserta
			Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan sosialisasi registrasi Klinik	13 Kab/Kota
	Jumlah Klinik yang melakukan registrasi di aplikasi registrasi Fasyankes di Kab/Kota		11 Klinik	
	Jumlah Klinik yang dilakukan monitoring dan evaluasi di Kab/ Kota		13 Kab/Kota	

	3. Teregistrasinya Tempat Praktik Mandiri (TPM) Tenaga Kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan sosialisasi registrasi Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Bidan	13 Kab/Kota		
		Jumlah Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Bidan yang melakukan Registrasi di Aplikasi Registrasi Fasyankes	20 TPM		
		Jumlah Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Bidan yang dilakukan monitoring dan evaluasi di Kab/Kota	13 Kab/Kota		
	4. Meningkatnya Tata Kelola Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Pelaksanaan verifikasi registrasi online puskesmas	8 Kab		
		Pertemuan Monitoring evaluasi pelayanan rujuk balik	40 Peserta		
		Jumlah Puskesmas yang melaporkan kasus rujuk balik	218 PKM		
		Jumlah puskesmas yang mengupdate keadaan puskesmas sesuai persyaratan puskesmas melalui aplikasi registrasi puskesmas	218 PKM		
		Jumlah puskesmas yang dilakukan pemantauan hasil updating data pada aplikasi registrasi puskesmas	218 PKM		
		Jumlah Puskesmas yang menjad lokus Telemedicine	5 PKM		
		Jumlah Kabupaten/kota yang melaporkan data sistem informasi puskesmas sesuai format	13 Kab/kota		
		Jumlah Puskesmas yang dilakukan Monitoring BLUD di Kabupaten/Kota	13 Kab/kota		
		Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan pendampingan Penerapan BLUD	5 Kabupaten		
		Terlaksananya rapat koordinasi BLUD Puskesmas	34 Peserta		
		Jumlah Puskesmas yang dimonitoring Pasca penetapan BLUD di Kabupaten/Kota	28 Puskesmas		
		Jumlah Puskemas yang dilakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Rujukan Non Spesialistik di Kab/Kota	218 PKM		
		Jumlah Kab/ Kota yang melakukan Koordinasi Data Rujukan Non Spesialistik (RNS) dengan BPJS	13 Kab/kota		
			5. Teritegrasinya Pelayanan Primer (ILP) di Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang menerapkan ILP	20 Puskesmas
				Jumlah Puskesmas yang mengisi data pemetaan pustu (Kecamatan/Desa) untuk penerapan ILP	218 PKM
Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan sosialisasi ILP	13 Kab/kota				

	6. Terpenuhiya Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah kegiatan domontrasi kesehatan Gigi dan Mulut	100 siswa SD
		Jumlah Puskesmas yang melaporkan data cakupan GIMUL yang Optimal	218 Puskesmas
		Jumlah puskesmas yang dipantau data GIMUL melalui aplikasi SIP	218 Puskesmas
		Jumlah Kabupaten yang tersosialisasi dan teradvokasi untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) di daerah terpencil dan sangat terpencil sesuai standar.	1 Kabupaten
		Jumlah pendampingan PKB yang dilaksanakan di daerah terpencil dan sangat terpencil sesuai standar	4 Kali
		Evaluasi kegiatan pelaksanaan PKB selama 1 tahun	1 Puskesmas
	7. Termonitoringnya Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga	Jumlah Puskesmas yang melakukan Pengimputan Data dan intervensi keluarga, Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dalam Aplikasi Keluarga Sehat versi 2.0	51 Puskesmas
		Jumlah laporan Kunjungan Keluarga, Indeks Keluarga Sehat (IKS) dan Capaian Indikator Keluarga Sehat Per Kabupaten/Kota	6 Dokumen
		Jumlah Feed Back Laporan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) ke Kabupaten/Kota	6 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1.	Pembina pelaksana upaya pelayanan kesehatan	Rp. 364,529,850	APBD
2.	Verifikasi dan penilaian Kelayakan puskesmas untuk registrasi puskesmas	Rp. 160,000,000	APBD
TOTAL		Rp. 524,529,850	

Palu, 1 April 2024

**PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG
PELAYANAN KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Hestiawati, SKM.,M.Kes
NIP. 19780522 200804 2 001

**PIHAK PERTAMA
KEPALA SEKSI PRIMER KESEHATAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH**



Misnawati, SST.M.,Kes
NIP.19781101 200502 2 005



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS KESEHATAN

JL. R.A KARTINI NO. 11 Telp (0451) 421170 – 422343 – 421070 FAKSIMILI (0451) 454646
PALU 94111

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Meyke M. Wongkar, S.Farm, Apt

Jabatan : Kepala Seksi Kefarmasian

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : dr. I Komang Adi Sujendra,Sp.PD

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperluhkanserta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 1 April 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



dr. I Komang Adi Sujendra,Sp.PD
NIP. 19650325 199003 1 014

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG KEFARMASIAN, ALKES & SDMK
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Meyke M. Wongkar, S.Farm, Apt
NIP : 19690519 199403 2 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KINERJA

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Ketersediaan Obat dan Vaksin serta Mutu Pelayanan Kefarmasian	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	95%
2	Tersediaan obat dan vaksin di kabupaten/kota	Persentase Kab/Kota dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	90 %
3	Meningkatnya mutu pelayanan kefarmasian sesuai standar	Persentase Fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	70%
4	Meningkatnya Kualitas sediaan Alat Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Dasar	Persentase Fasilitas Kesehatan Dasar Yang memenuhi sarana, Prasarana, Dan Alat Kesehatan Sesuai Standar	90%
5	Meningkatnya Ketersediaan SDM Kesehatan dengan Kompetensi Sesuai Standar	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompensinya Melalui Pelatihan Tehnis	200 Orang
6	Terlaksananya Upaya Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah SDM Fungsional Kesehatan yang tersertifikasi Uji Kompetensi	500 Orang
7	Meningkatnya Dokumen Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	Persentase Kabupaten/Kota yang memenuhi dokumen perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	100 %

Program & Kegiatan	Anggaran	Keterangan Sumber Dana	
		APBD	APBN
Proram Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	3.360.522.000	APBD	-
1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana, Prasarana dan Alkes untuk UKP rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	3.360.522.000	APBD	-
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	320.000.000	APBD	-
1. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	320.000.000	APBD	-
Program Pelayanan Kesehatan JKN	138.645.000	-	APBN
1. Kegiatan Penguatan Pelayanan Kesehatan di Provinsi (Kefarmasian)	138.645.000	-	APBN

Palu, 1 April 2024



PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dr. Komang Adi Sujendra, Sp.PD
NIP. 19650325 199003 1 014

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG KEFARMASIAN, ALKES & SDM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Meyke M. Wongkar, S.Farm, Apt
NIP : 19690519 199403 2 010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KINERJA**

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas sediaan Alat Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Dasar	Persentase Fasilitas Kesehatan Dasar Yang memenuhi sarana, Prasarana, Dan Alat Kesehatan Sesuai Standar	90 %
2	terlaksananya Peningkatan Kualitas sediaan Alat Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Dasar	Persentase Fasilitas Kesehatan Dasar Yang Ditingkatkan Kualitas sediaan Alat Kesehatan	90%

Program & Kegiatan	Anggaran	Keterangan Sumber Dana	
Proram Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	289.999.800	APBD	-
1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM dalam rangka penilaian kesesuaian perizinan di Bidang Pengawasan Alat Kesehatan	87.330.000	-	APBN
2. Kegiatan Fasilitasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam pemenuhan data sarana prasarana dan alat kesehatan (SPA) Puskesmas dan Klinik Pratama Sesuai Standar	144.368.000	-	APBN

Palu, 1 April 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



dr. Komang Adi Sujendra, Sp.PD
NIP. 19650325 199003 1 014

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG KEFARMASIAN, ALKES & SDMK
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Meyke M. Wongkar, S.Farm, Apt
NIP : 19690519 199403 2 010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KINERJA**

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Ketersediaan SDM Kesehatan dengan Kompetensi Sesuai Standar	1. Persentase Puskesmas dengan Dokter	100 %
		2. Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Nakes sesuai standar	100%
		3. Persentase RSUD Kab/Kota yang memiliki 4 Dokter spesialis dan 3 dokter spesialis lainnya.	
		4. Persentase RSUD Kab/Kota yang memiliki 4 Dokter spesialis dan 3 dokter spesialis lainnya	750 Orang
2	Meningkatnya Kompetensi dan Sistem Pendidikan Pelatihan SDM Kesehatan	1. Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan teknis kesehatan, fungsional kesehatan, manajemen kesehatan	750 orang
		2. Meningkatnya kompetensi SDM Kesehatan melalui pendidikan lanjutan	200 orang
		3. Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat uji kompetensi	100%

Program & Kegiatan	Anggaran	Keterangan Sumber Biaya	
		APBD	APBN
Proram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	559.998.700	APBD	-
1. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	279.999.500	APBD	-
2. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	279.999.200	APBD	-

Palu, 1 April 2024

PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



dr. Komang Adi Sujendra, Sp.PD
NIP: 19650325 199003 1 014

PIHAK PERTAMA

KEPALA BIDANG KEFARMASIAN, ALKES & SDM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Meyke M. Wongkat, S.Farm, Apt
NIP : 19690519 199403 2 010



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS KESEHATAN

JL. R.A KARTINI NO. 11 Telp (0451) 421170 – 422343 – 421070 FAKSIMILI (0451) 454646
PALU 94111

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asmanur AR, S.Farm, Apt

Jabatan : Kepala Seksi Kefarmasian

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Meyke M. Wongkar, S.Farm, M.Si, Apt

Jabatan : Kepala Bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan SDM

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperluhkan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 1 April 2024

PIHAK PERTAMA
KEPALA SEKSI KEFARMASIAN

Asmanur AR, S.Farm, Apt
NIP. 19870817 201101 2 015

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG KEFARMASIAN, ALKES & SDM



Meyke M. Wongkar, S.Farm, M.Si, Apt
NIP. 19690519 199403 2 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KINERJA

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terbinanya Puskesmas mengenai Pemenuhan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial di 13 Kab/Kota	Jumlah puskesmas yang difasilitasi ketersediaan obat dan vaksin esensial	218 puskesmas
2	Terbinanya Dinas Kesehatan Kab/Kota mengenai Pemenuhan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial di 13 Kab/Kota	Jumlah kab/kota yang difasilitasi ketersediaan obat dan vaksin esensial	13 kab/kota
3	Terevaluasinya ketersediaan obat IFK di 13 kab/kota	Jumlah IFK dan Puskesmas yang dimonitoring ketersediaan obat dan vaksin	100 sarana
4	Tersusunnya perencanaan kebutuhan obat PKD, Obat Program dan BMHP	Jumlah Dokumen perencanaan kebutuhan obat PKD, obat Program dan BMHP	31 dokumen
5	Tersusunnya Laporan Penerimaan obat PKD, Obat Program dan BMHP	Jumlah Dokumen penerimaan obat PKD, obat Program dan BMHP	212 dokumen
6	Tersusunnya Dokumen Penyimpanan obat PKD, Obat Program dan BMHP	Jumlah Dokumen penyimpanan obat PKD, obat Program dan BMHP	299 dokumen
7	Tersusunnya Dokumen Pengeluaran/Distribusi obat PKD, Obat Program dan BMHP	Jumlah Dokumen pengeluaran/distribusi obat PKD, obat Program dan BMHP	2190 dokumen
8	Tersedianya dokumen penghapusan obat PKD, obat program dan BMHP	Jumlah dokumen penghapusan obat PKD, obat program dan BMHP	1 dokumen
9	Repacking/pengemasan kembali obat PKD, Obat Program dan BMHP	Jumlah kegiatan repacking	2190 paket
10	Terdistribusinya obat dan BMHP	Jumlah Kab/Kota yang terdistribusi obat program sesuai alokasi	13 kab/kota
11	Terevaluasinya pengisian form penilaian IFK yang sesuai standar di Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yang dimonitoring melakukan pengisian form penilaian kesesuaian standar di IFK	13 kab/kota
12	Tersosialisasinya CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik) di kab/kota	Jumlah kab/kota yang mendapatkan sosialisasi CDOB	13 kab/kota
13	Termonitoringnya sarana PBF	Jumlah PBF cabang dan pusat yang di monev	25 sarana
14	Terawasinya perizinan PBF	Jumlah PBF cabang yang memenuhi ketentuan perizinan	25 sarana
15	Terverifikasinya perizinan PBF cabang	Jumlah PBF cabang yang terverifikasi melalui sistem OSS	10 sarana
16	Tersedianya rekomendasi izin bagi PBF cabang baru	Jumlah rekomendasi izin yang terbit	5 rekomendasi
17	Tersedianya laporan kegiatan distribusi obat di PBF cabang	Jumlah PBF cabang yang melaporkan kegiatan distribusi obatnya dalam aplikasi e-report PBF	25 sarana
18	Tersedianya rekomendasi izin UKOT	Jumlah rekomendasi izin UKOT yang terbit	1 rekomendasi
19	Terawasinya penggunaan narkotika psikotropika pada unit layanan	Jumlah Surat Pesanan yang di legalisir	3.600 lembar

20	Tersosialisasinya aplikasi SIMONA	Jumlah kab/kota yang tersoliasiasi aplikasi SIMONA	13 kab/kota
21	Terevaluasinya pelayanan kefarmasian sesuai standar di PKM	Jumlah puskesmas yang memenuhi standar pelayanan kefarmasian	109 puskesmas
22	Terevaluasinya pelayanan kefarmasian sesuai standar di RS	Jumlah rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan kefarmasian	20 rumah sakit
23	Termonitoringnya pelayanan kefarmasian di fasyankes	Jumlah Fasyankes yang dilakukan monitoring	52 Faskes
24	Tersedianya data kefarmasian secara elektronik	Jumlah data yang diupdate dan diverifikasi dalam aplikasi SIMADA	4 data
25	Tersedianya data unit layanan yang menerapkan SIPNAP	Jumlah data unit layanan yang menerapkan SIPNAP	677 data
26	Tersedianya data laporan mutasi obat dan BMHP melalui aplikasi e-logistik	Jumlah data laporan mutasi obat dan BMHP melalui aplikasi e-logistik	2.570 data
27	Tersedianya data laporan mutasi obat dan BMHP melalui SIMPAN	Jumlah data laporan mutasi obat dan BMHP melalui SIMPAN	2.403 data
28	Tersedianya data laporan mutasi vaksin melalui SMILE	Jumlah data laporan mutasi vaksin melalui SMILE	192 data
29	Tersedianya laporan ketersediaan obat dan vaksin Esensial melalui SELENA	Jumlah laporan ketersediaan obat dan vaksin Esensial melalui SELENA	12 laporan
30	Tersedianya laporan pelayanan kefarmasian melalui SIMONA	Jumlah laporan pelayanan kefarmasian melalui SIMONA	12 laporan
31	Tersedianya Laporan perencanaan obat PKD dan Program melalui E-MONEV	Jumlah Laporan perencanaan obat PKD dan Program melalui E-MONEV	31 laporan
32	Tersedianya data laporan mutasi obat HIV-Aids melalui SIHA 2.0	Jumlah data laporan mutasi obat HIV-Aids melalui SIHA 2.0	310 data
33	Tersedianya data laporan mutasi obat TB melalui SITB	Jumlah data laporan mutasi obat TB melalui SITB	391 data

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alkes untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tk. Daerah Provinsi	Rp. 3.360.522.000,-	APBD
Sub Kegiatan		
2. Distribusi Alkes, Obat, BHP, BMHP, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Rp. 450.009.650,-	
3. Pengadaan Obat, BHP, BMHP, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Rp. 2.910.512.350,-	

Kegiatan

1. Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang PAK Rp. 320.000.000,-

Sub Kegiatan

2. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Rp. 320.000.000,-

Palu, 1 April 2024

PIHAK PERTAMA
KEPALA SEKSI KEFARMASIAN



Asmanur AR, S.Farm, Apt
NIP. 19870817 201101 2 015

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG KEFARMASIAN, ALKES DAN SDM



Meyke M. Wongkar, S.Farm, M.Si, Apt
NIP. 19690519 199403 2 010



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KESEHATAN

JL. R.A. KARTINI No. 11 TELP. (0451) 421170 - 422343 - 421070 FAKSIMILI (0451) 454646
PALU 94111

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Valen Ruterlin T, S.Si., M.Farm., Apt
Jabatan : Kepala Seksi Alat Kesehatan dan PKRT

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Meyke M Wongkar, S.Farm., M.Si., Apt
Jabatan : Kepala Bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan SDM

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 1 April 2024

PIHAK KEDUA
PEJABAT ESELON 3



Meyke M. Wongkar, S.Farm., M.Si., Apt
19690519 199403 2 010

PIHAK PERTAMA
PEJABAT ESELON 4

Valen Ruterlin T., S.Si., M.Farm., Apt
19750521 200903 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KINERJA**

Sasaran Kegiatan (1)	Sub Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
Meningkatnya Kualitas sediaan Alat Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Dasar	Tersosialisasinya pemenuhan Prasarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai standar di Fasilitas Kesehatan Dasar	Jumlah Faskes Dasar (Puskesmas) yang mendapat sosialisasi pemenuhan Prasarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai Standar	196 Puskesmas
Meningkatnya Kualitas sediaan Alat Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Dasar	Terlaksananya pendampingan Akreditasi standar mutu Sarana, Prasarana dan Alkes di Fasilitas Kesehatan Dasar (Puskesmas)	Jumlah Faskes Dasar (Puskesmas) yang mendapat pendampingan Akreditasi standar mutu Sarana, Prasarana dan Alkes	196 Puskesmas
Meningkatnya Kualitas sediaan Alat Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Dasar	Tersosialisasinya pemenuhan Prasarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai standar di Fasilitas Kesehatan Lanjutan (Rumah Sakit)	Jumlah Faskes Lanjutan (RS) yang mendapat sosialisasi pemenuhan Prasarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai Standar	36 RS
Meningkatnya Kualitas sediaan Alat Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Dasar	Terlaksananya pendampingan Akreditasi standar mutu Sarana, Prasarana dan Alkes di Fasilitas Kesehatan Lanjutan (RS)	Jumlah Faskes Lanjutan (RS) yang mendapat pendampingan Akreditasi standar mutu Sarana, Prasarana dan Alkes	36 RS
Meningkatnya Kualitas sediaan Alat Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Dasar	Tersosialisasinya Perizinan Berusaha pada Lembaga Penyalur Alat kesehatan Cabang sesuai Standar	Jumlah Lembaga Penyalur Alat kesehatan Cabang yang mendapatkan Pengakuan dan Perizinan Berusaha	8 PAK C
Meningkatnya Kualitas sediaan Alat Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Syarat Perizinan CDAKB pada Lembaga Penyalur Alat kesehatan Cabang sesuai Ketentuan	Jumlah Penyalur Alat Kesehatan cabang Yang memenuhi persyaratan Peizinan CDAKB dan sesuai ketentuan PerMenkes	7 PAK C
Meningkatnya Kualitas sediaan Alat Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Dasar	Terlaksananya Bimbingan Teknis Persyaratan Izin dan Pengawasan Penyalur Alat Kesehatan Cabang sesuai Ketentuan di Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yang Mendapat Bimbingan Teknis Persyaratan Izin dan Pengawasan Penyalur Alat Kesehatan Cabang sesuai Ketentuan	9 KAB/KOTA

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	289.999.800	APBD

Palu, 1 April 2024

**PIHAK KEDUA
PEJABAT ESELON 3**



Meyke M. Wongkar, S.Farm., M.Si., Apt
19690519 199403 2 010

**PIHAK PERTAMA
PEJABAT ESELON 4**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'V' followed by a cursive flourish.

Valen Ruterlin T., S.Si., M.Farm., Apt
19750521 200903 2 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan.R.A Kartini Nomor 11 Telepon (0451) 421170,421070 Palu 94111

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : dr. Ryzqa
Jabatan : Kepala UPT. Laboratium Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : dr. I Komang Adi Sujendra, Sp.PD
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA** selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 1 April 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


dr. I Komang Adi Sujendra, Sp.PD
NIP. 19650325 199003 1014

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPT. LABORATORIUM KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


dr. Ryzqa
NIP. 19871122 2014021 1003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KINERJA**

NO	SASARAN INDIKATOR / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Pelayanan Laboratorium Kesehatan sesuai standar	(Persentase Permohonan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Yang Terlayani Sesuai Standar)	100%
2.	<u>Meningkatnya Mutu Laboratorium Kesehatan</u>	(Persentase Layanan Laboratorium kesehatan yang Terakreditasi)	100%
		Persentase Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 1 Kab/Kota yang meningkat mutu pelayanannya	18.35%
3.	Terlayaninya kebutuhan penunjang UPT Laboratorium Kesehatan	(Persentase terlayaninya kebutuhan penunjang UPT Laboratorium kesehatan)	100%
4.	Terpeliharanya barang milik daerah	(Persentase terpeliharanya barang milik daerah)	100%
5	Meningkatnya kualitas Penunjang / Administrasi Umum	(Persentase Unit Kerja Yang dilayani Keperluan Administrasi Umumnya)	100%

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET
1.	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Rp. 2.419.915.750	APBD
2.	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Rp. 480.684.250	APBD

Palu, 1 April 2024

**PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



dr. I Komang Adi Sujendra, Sp.PD
NIP.19650325 199003 1014

**PIHAK PERTAMA
KEPALA UPT. LABORATORIUM KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



dr. Ryzqa
NIP.19871122 2014021 1003



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KESEHATAN
UPT. LABORATORIUM KESEHATAN

JL. UNDATA NO. 27 E Telp (0451) 422423 FAKSIMILI (0451) 454482
PALU 94111

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
UPT. LABORATORIUM KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Afuad, SKM.,M.Kes
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPT. Laboratorium Kesehatan Prov. Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : dr. Ryzqa
Jabatan : Kepala UPT. Laboratorium Kesehatan Prov. Sulawesi Tengah

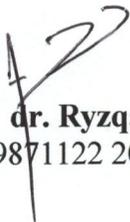
Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 1 April 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT. LABORATORIUM KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


dr. Ryzqa
NIP. 19871122 201402 1 003

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
UPT. LABORATORIUM KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Afuad, SKM.,M.,Kes
NIP. 19680701 199303 1 006

**PERJANJIAN KINERJA UPT. LABORATORIUM KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

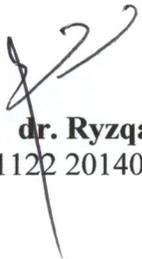
NO	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	Terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon, air di lingkup labkes	(Jumlah bulan pemenuhan layanan listrik, telepon, dan air)	12 bulan
2.	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	(Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang berfungsi dengan baik	9 unit kendaraan
3.	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Penduku Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang terpelihara	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Penduku Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4.	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor)	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi. - Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah - Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah - Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 42,440,000 Rp. 20,320,000 Rp. 313,581,850 Rp. 101,975,500
JUMLAH		Rp. 478,317,351

Palu, 1 April 2024

**PIHAK KEDUA
KEPALA UPT. LABORATORIUM KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB. BAGIAN TATA USAHA
UPT. LABORATORIUM KESEHATAN**


dr. Ryzqa
NIP. 19871122 201402 1 003


Afuad, SKM., M.Kes
NIP. 19680701 199303 1 006



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KESEHATAN
UPT. LABORATORIUM KESEHATAN

JL. UNDATA NO. 27 E Telp (0451) 422423 FAKSIMILI (0451) 454482
P A L U 94111

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
UPT. LABORATORIUM KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anik Wijayanti, S.ST
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan dan Mutu UPT. Laboratorium Kesehatan
Prov. Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : dr. Ryzqa
Jabatan : Kepala UPT. Laboratorium Kesehatan Prov. Sulawesi Tengah

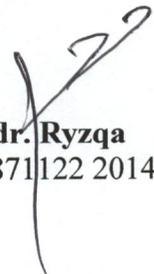
Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

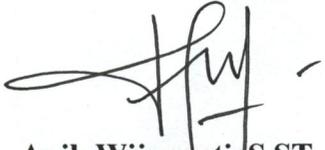
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 1 April 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT. LABORATORIUM KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


dr. Ryzqa
NIP. 19871122 201402 1 003

PIHAK PERTAMA
KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN MUTU
UPT. LABORATORIUM KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Anik Wijayanti, S.ST
NIP. 19770205 200003 2003

**PERJANJIAN KINERJA UPT. LABORATORIUM KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

NO	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlayannya permohonan pemeriksaan Laboratorium Kimia dan Kesehatan Lingkungan sesuai standar	Jumlah sampel pemeriksaan Laboratorium Kimia dan Kesehatan Lingkungan yang diperiksa sesuai standar	780 Sampel (Jumlah sampel rerata dalam 1 tahun)
2.	Terlayannya Permohonan Pemeriksaan Laboratorium Biomolekuler	Persentase sampel pemeriksaan Laboratorium Biomolekuler yang diperiksa sesuai standar	100%
3.	Terlayannya Permohonan Pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi	Jumlah sampel pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi yang diperiksa sesuai standar	975 Sampel (Jumlah sampel rerata dalam 1 tahun)
4.	Terlayannya permohonan pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik	Jumlah sampel pemeriksaan Laboratorium Patolog klinik yang diperiksa sesuai standar	4.550 Sampel (Jumlah sampel rerata dalam 1 tahun)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi. - Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah - Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42.440.000 20.320.000
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	480,684,250
JUMLAH		Rp. 543,444,250

Palu, 1 April 2024

**PIHAK KEDUA
KEPALA UPT. LABORATORIUM
KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PIHAK PERTAMA
KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN MUTU
UPT. LABORATORIUM KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


dr. Ryzqa
NIP. 19871122 201402 1 003


Anik Wijayanti, SST
NIP. 19770205 200003 2003



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KESEHATAN**

UPT. LABORATORIUM KESEHATAN

JL. UNDATA NO. 27 E Telp (0451) 422423 FAKSIMILI (0451) 454482

P A L U 94111

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
UPT. LABORATORIUM KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yen mulyati, S.ST
Jabatan : Kepala Seksi Pengujian
UPT. Laboratorium Kesehatan Prov. Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : dr. Ryzqa
Jabatan : Kepala UPT. Laboratorium Kesehatan Prov. Sulawesi Tengah

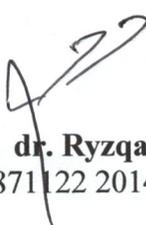
Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 1 April 2024

**PIHAK KEDUA
KEPALA UPT. LABORATORIUM KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


dr. Ryzqa
NIP. 19871122 201402 1 003

**PIHAK PERTAMA
KEPALA SEKSI PENGUJIAN
UPT. LABORATORIUM KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


Yen mulyati, S.ST
NIP. 19720106 199803 2 004

**PERJANJIAN KINERJA UPT. LABORATORIUM KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

NO	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terkalibrasinya Peralatan Laboratorium UPT Labkes	Jumlah sarana dan prasarana alat Laboratroiium UPT Labkes yang di kalibrasi.	20 Unit Alat
2.	Tersusunnya Dokumen Persyaratan Akreditasi Laboratorium Kesehatan	Jumlah dokumen penilaian mutu dan pengembangan sesuai standar akreditasi	1 Dokumen
3.	Terbinanya Laboratorium Kesehatan masrakat tingkat 1 Kabupaten/Kota Terkait Mutu Pelayanan	Jumlah laboratorium Kesehatan masrakat tingkat 1 kab/kota yang mendapatkan bimtek terkait mutu pelayanan	40 Unit Labkesmas tingkat 1

	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 480,684,250
	- Penerbitan izin rumah sakit kelas B fasilitas pelayanan Kesehatan tigtak daerah provinsi	Rp. 480.684.250
JUMLAH		Rp. 480,684,250

Palu. 1 April 2024

**PIHAK KEDUA
KEPALA UPT. LABORATORIUM KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


dr. Ryzqa
NIP. 19871122 201402 1 003

**PIHAK PERTAMA
KEPALA SEKSI PENGUJIAN
UPT. LABORATORIUM KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


Yen mulyati, S.ST
NIP. 19720106 199803 2 004



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TENGAH DINAS KESEHATAN

Jalan R.A Kartini No. Telp (0451) 421070 Faksimili (0451) 454646 Palu 94111

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fadlun, SKM.,M.AP
Jabatan : Kepala UPT Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : dr. I Komang Adi Sujendra, Sp.PD
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah diterapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Palu, Januari 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

dr. I Komang Adi Sujendra, Sp.PD
NIP. 19650325 199003 1 014

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPT BALAI PENDIDIKAN
PELATIHAN KESEHATAN

Fadlun, SKM.,M.AP
NIP. 19730723 199303 2 007

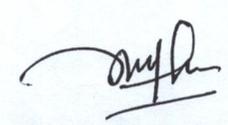
**PERJANJIAN KINERJA UPT BALAI PENDIDIKAN PELATIHAN KESEHATAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

NO	SASARAN INDIKATOR/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Bapelkes	1. Persentase Ketersediaan dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan Standar Kompetensi	56%
		2. Persentase Penyusunan Pemetaan Kompetensi	1%
		3. Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan Tahun 2024	5%
		4. Persentase Pelatihan yang dilaksanakan sesuai Kalender Pelatihan/Rencana Pelatihan tahun 2024	100%
		4. Persentase Pelatihan yang dilaksanakan sesuai Kalender Pelatihan/Rencana Pelatihan tahun 2024	100%
		5. Persentase Pegawai Bapelkes yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi	73%
2.	Terlaksananya kebutuhan penunjang UPT Bapelkes	Presentase terlaksana kebutuhan penunjang UPT Bapelkes	
3.	Terpeliharanya Barang milik Daerah	Presentase terpeliharanya barang milik Daerah	
4.	Terpenuhinya Penunjang perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 522,565,145
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 55,560,000
	Jumlah	Rp 578,125,145

Palu, Januari 2024


**Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Tengah**
dr. I Komang Adi Sujendra, Sp. PD
 NIP. 19650325 199003 1 014

**Kepala UPT Balai Pendidikan
Pelatihan Kesehatan**

Fadlun, SKM., M.AP
 NIP. 19730723 199303 2 007



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TENGAH DINAS KESEHATAN

Jalan R.A Kartini No. Telp (0451) 421070 Faksimili (0451) 454646 Palu 94111

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eriwahyuningtias, SKM.,M.AP
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Mutu
UPT Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Fadlun, SKM.,M.AP
Jabatan : Kepala UPT Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah diterapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Palu, Januari 2024

PIHAK KEDUA
Kepala UPT Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

PIHAK PERTAMA
Kepala Seksi Pengendalian Mutu
UPT Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan

Fadlun, SKM.,M.AP
NIP. 19730723 199303 2 007

Eriwahyuningtias, SKM.,M.AP
NIP. 19710116 199101 2 001

PERJANJIAN KINERJA
SEKSI PENGENDALIAN MUTU
UPT BALAI PENDIDIKAN PELATIHAN KESEHATAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024

NO	SASARAN INDIKATOR/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terevaluasinya penerapan sistem pengendalian mutu	Jumlah Laporan audit internal (2 laporan)	2 Laporan
2.	Terlaksananya Perjanjian Kerjasama Pelatihan sesuai ketentuan	Jumlah Instansi mitra kerjasama yang melaksanakan registrasi tepat waktu	..13.. Mitra
3	Terevaluasinya penyelenggaraan Pelatihan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi pasca pelatihan	..13.. Dokumen

Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

1. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber daya Manusia Kesehatan

Palu, Januari 2024

PIHAK KEDUA

Kepala UPT Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

Fadlun, SKM., M.AP
NIP. 19730723 199303 2 007

PIHAK PERTAMA

Kepala Seksi Pengendalian Mutu
UPT Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan

Eriwahyuningtias, SKM., M.AP
NIP. 19710116 199101 2 001



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TENGAH DINAS KESEHATAN

Jalan R.A Kartini No. Telp (0451) 421070 Faksimili (0451) 454646 Palu 94111

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anna Fitriana, S.IP., M.Si
Jabatan : Kepala Seksi Penyelenggara Kediklatan
UPT Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Fadlun, SKM.,M.AP
Jabatan : Kepala UPT Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah diterapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Palu, Januari 2024

PIHAK KEDUA
Kepala UPT Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

PIHAK PERTAMA
Kepala Seksi Penyelenggara Kediklatan
UPT Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan

Fadlun, SKM.,M.AP
NIP. 19730723 199303 2 007

Anna Fitriana, S.IP., M.Si
NIP. 19860608 200701 2 001

PERJANJIAN KINERJA
SEKSI PENYELENGGARAAN KEDIKLATAN
UPT BALAI PENDIDIKAN PELATIHAN KESEHATAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Kompetensi Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Pengembang Kompetensi Bapelkes	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Kegiatan Pengembangan Kompetensi	32 Orang
2	Tersusunnya Dokumen Pemetaan Kompetensi/TNA	Jumlah Dokumen Pemetaan Pelatihan Se- Provinsi Sulawesi Tengah	6 Dokumen pemetaan pelatihan
3	Terlatihnya SDM Kesehatan	Jumlah Peserta Pelatihan	1.714 Orang
4	Terlaksananya Pelatihan SDM Kesehatan sesuai Kalender Pelatihan	Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan sesuai dengan Kalender Pelatihan	74 Pelatihan
5	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Kegiatan Pengembangan Kompetensi	30 Orang

Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

1. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber daya Manusia Kesehatan

Palu, Januari 2024

PIHAK KEDUA

Kepala UPT Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

PIHAK PERTAMA

Kepala Seksi Penyelenggara Kediklatan
UPT Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan



Fadlun, SKM., M.AP
NIP. 19730723 199303 2 007



Anna Fitriana, S.IP., M.Si
NIP. 19860608 200701 2 001



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TENGAH DINAS KESEHATAN

Jalan R.A Kartini No. Telp (0451) 421070 Faksimili (0451) 454646 Palu 94111

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Rafiah, SP
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPT Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Fadlun, SKM.,M.AP
Jabatan : Kepala UPT Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan

Selaku atasan langsung PI PERTAMA selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah diterapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Palu, Januari 2024

PIHAK KEDUA
Kepala UPT Balai Pendidikan Pelatihan
Kesehatan Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Tengah

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPT Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan

Fadlun, SKM.,M.AP
NIP. 19730723 199303 2 007

Siti Rafiah, SP
NIP. 19770727 200012 2 003

PERJANJIAN KINERJA
SUB BAGIAN TATA USAHA
UPT BALAI PENDIDIKAN PELATIHAN KESEHATAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024

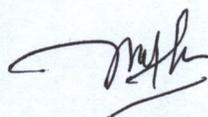
NO	SASARAN INDIKATOR/SUB KEGIATAN	INDKATOR KINERJA	Target
1.	Terpenuhinya kebutuhan listrik, Internet di Lingkup UPT Bapelkes	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik, Internet	12 Bulan
2.	Terpeliharanya Kendaraan dinas operasional	(Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang berfungsi dengan baik)	Unit
3.	Terpeliharanya Peralatan Kantor UPT Bapelkes	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara	20 Unit
4.	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket
5.	Terpenuhinya Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Tepat Waktu	Jumlah Penerima Honorarium Pengelola Keuangan Tepat Waktu	5 Orang/Bulan
6.	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang Diadakan	0 Unit

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Administrasi KeuangaN Perangkat Daerah	Rp. 55.560.000
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 74.254.812
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah DaerahLapangan	Rp.
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 394,650,333
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 53.680.000
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.
	b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.
	c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.
	Jumlah	Rp. 578.125.145

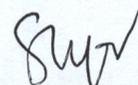
Palu, Januari 2024

PIHAK KEDUA
Kepala UPT Balai Pendidikan
Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Tengah

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPT Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan



Fadlun, SKM., M.AP
NIP. 19721215 199303 2 007



Siti Rafiah, SP
NIP. 19770727 200012 2 003



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KESEHATAN

JL. R.A KARTINI NO. 11 Telp (0451) 421170 – 422343 – 421070 FAKSIMILI (0451) 454646
PALU 94111

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Daeng Dani, SKM.,M.Kes
Jabatan : Kepala UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : dr. I Komang Adi Sujendra, Sp.PD
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 01 April 2024

PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULTENG

dr. I Komang Adi Sujendra, Sp.PD
Nip. 19650325 199003 1 014

PIHAK PERTAMA

KEPALA UPT. PUSAT PELAYANAN
KESELAMATAN TERPADU

Daeng Dani, SKM.,M.Kes
NIP. 19681024 199303 2 008

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

NO	SASARAN INDIKATOR/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terpenuhinya Workshop Tim EMT Kab/Kota	Jumlah peserta Workshop Tim EMT	20 Orang
2.	Terpenuhinya Pertemuan Peningkatan Kapasitas Manajemen Krisis Kesehatan dan TCK-EMT Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Peserta Pertemuan Peningkatan Kapasitas Manajemen Krisis Kesehatan dan TCK-EMT	60 Orang
3.	Ternilainya Kesiapan Kab/Kota dalam Pembentukan EMT	Jumlah Assessment yang dilaksanakan	1 Kabupaten
4.	Terbentuknya TIM EMT di Kab/Kota melalui Penetapan SK Kepala Dinas Kab/Kota	Jumlah TIM EMT di Kab/Kota melalui penetapan SK Kepala Dinas Kab/Kota	5 Tim Kabupaten
5.	Terdaftaranya Tim EMT pada Tenaga Cadangan Kesehatan dalam Penanganan Krisis Kesehatan di Kab/Kota	Jumlah Tim EMT yang terdaftar pada Tenaga Cadangan Kesehatan dalam Penanganan Krisis Kesehatan di Kab/Kota	8 Kab/Kota
6.	Tersosialisasinya Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan bagi pengelola krisis kesehatan	Jumlah pengelola krisis kesehatan yang mendapat sosialisasi Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan	30 Orang
7.	Tersosialisasinya Bantuan Hidup Dasar (BHD) bagi Masyarakat Umum	Jumlah Peserta Sosialisasi	15 Orang
8.	Terlayaninya Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) bagi Masyarakat Umum	Presentase permintaan pelayanan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Masyarakat yang dilayani	100%
9.	Terlayaninya Pelayanan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) pada Kegiatan Pemerintah Provinsi dan Kegiatan Daerah Lainnya	Presentase permintaan Pelayanan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) bagi Kegiatan Pemerintah Provinsi dan Kegiatan Daerah Lainnya	100%

10.	Terlayannya Kebutuhan Pendampingan Kesehatan Lapangan Bagi Pimpinan Daerah dan Tamu Daerah setingkat Menteri	Presentase permintaan pelayanan Pendampingan Kesehatan Bagi Pimpinan Daerah dan Tamu Daerah Setingkat Menteri	100%
11.	Terpenuhinya kebutuhan listrik, alat Listrik dan Telepon Kantor UPT P2KT	(Jumlah laporan layanan listrik, telepon, dan air)	12 Laporan
12.	Terpemeliharanya kendaraan dinas Jabatan dan operasional	(Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang berfungsi dengan baik)	5 unit
13.	Terpeliharanya Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan kantor yang dipelihara	23 Unit
14.	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	
		APBD	APBN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp.272.653.899	
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp.212.678.600	Rp.147.056.000
3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp. 121.717.250	
	Jumlah	Rp.607,029,749	Rp.147.056.000-

Palu, 01 April 2024

PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULTENG

dr. I Komang Adi Sujendra, Sp.PD
Nip. 19650325 199003 1 014

PIHAK PERTAMA

KEPALA UPT. PUSAT PELAYANAN
KESELAMATAN TERPADU

Daeng Dani, SKM.,M.Kes
Nip. 19681024 199303 2 008



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS KESEHATAN

JL. R.A KARTINI NO. 11 Telp (0451) 421170 – 422343 – 421070 FAKSIMILI (0451) 454646
P A L U 94111

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jellyta H.E Bofe, SKM.,M.Si.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Daeng Dani, SKM.,M.Kes
Jabatan : Kepala UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 01 April 2024

PIHAK KEDUA:
Kepala UPT. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

Daeng Dani, SKM.,M.Kes
NIP. 19681024199303 2008

PIHAK PERTAMA:
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPT. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu

Jellyta H.E.Bofe .SKM.M.Si
NIP. 19670729199203 2003

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024

NO	SASARAN INDIKATOR/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terpenuhinya kebutuhan listrik, alat Listrik dan Telepon Kantor UPT P2KT	(Jumlah laporan layanan listrik, telepon, dan air)	12 Laporan
2.	Terpemeliharanya kendaraan dinas Jabatan dan operasional	(Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang berfungsi dengan baik)	5 unit
3.	Terpeliharanya Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan kantor yang dipelihara	23 Unit
4.	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	
		APBD	APBN
	Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		
	<i>Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah . Dan Administrasi Umum Perangkat daerah</i>	Rp. 272,633,899	
JUMLAH		Rp. 272,633,899	

Palu, 01 April 2024

PIHAK KEDUA:
Kepala UPT. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah



Daeng Dani, SKM.,M.Kes
NIP. 19681024199303 2008

PIHAK PERTAMA:
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPT. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu



Jellyta H.E.Bofe, SKM.,M.Si
NIP. 19670729199203 2003



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DINAS KESEHATAN

JL. R.A KARTINI NO. 11 Telp (0451) 421170 – 422343 – 421070 FAKSIMILI (0451) 454646

P A L U 94111

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Nasir, SKM.,M.AP
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Krisis Kesehatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Daeng Dani, SKM.,M.Kes
Jabatan : Kepala UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 01 April 2024

PIHAK KEDUA

**Kepala UPT. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah**

**Daeng Dani, SKM.,M.Kes
NIP. 19681024 199303 2 008**

PIHAK PERTAMA

**Kepala Seksi Penanganan Krisis Kesehatan
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah**

**Muhammad Nasir, SKM.,M.AP
NIP. 19830109 200502 1 003**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

UNIT KINERJA

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Ketersediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (PSGDT)	Jumlah Kab/Kota yang memiliki tenaga terlatih dalam penanganan Kagawatdaruratan.	15 orang
2.	Meningkatnya Pelayanan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Persentase Pelayanan Sistem Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) yang dilayani	100 %

APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
1.	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Rp. 121.717.250
	Total	Rp. 121.717.250

Palu, 01 April 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Kepala UPT. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

Kepala Seksi Penanganan Krisis Kesehatan
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah



Daeng Dani, SKM.,M.Kes
NIP. 19681024 199303 2 008



Muhammad Nasir, SKM.,M.AP
NIP. 19830109 200502 1 003



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KESEHATAN**

JL. R.A KARTINI NO. 11 Telp (0451) 421170 – 422343 – 421070 FAKSIMILI (0451) 454646
PALU 94111

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitriani, SKM
Jabatan : Kepala Seksi Kewaspadaan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Daeng Dani .SKM..M.Kes
Jabatan : Kepala UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 01 April 2024

PIHAK KEDUA:
KEPALA UPT P2KT DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Daeng Dani .SKM..M.Kes
NIP. 19681024199303 2008

PIHAK PERTAMA:
KEPALA SEKSI KEWASPADAAN
UPT P2KT

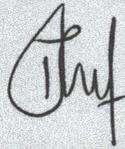
Fitriani, SKM
NIP. 19800806 200012 2 001

**PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

NO	SASARAN INDIKATOR/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terpenuhinya Workshop Tim EMT Kab/Kota	Jumlah peserta Workshop Tim EMT	20 Orang
2.	Ternilainya Kesiapan Kab/Kota dalam Pembentukan EMT	Jumlah Assessment yang dilaksanakan	1 Kabupaten
3.	Terbentuknya TIM EMT di Kab/Kota melalui Penetapan SK Kepala Dinas Kab/Kota	Jumlah TIM EMT di Kab/Kota melalui penetapan SK Kepala Dinas Kab/Kota	5 Tim Kabupaten
4.	Terdaftarinya Tim EMT pada Tenaga Cadangan Kesehatan dalam Penanganan Krisis Kesehatan di Kab/Kota	Jumlah Tim EMT yang terdaftar pada Tenaga Cadangan Kesehatan dalam Penanganan Krisis Kesehatan di Kab/Kota	8 Kab/Kota
5.	Tersosialisasinya Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan bagi pengelola krisis kesehatan	Jumlah pengelola krisis kesehatan yang mendapat sosialisasi Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan	30 Orang
6.	Terpenuhinya Pertemuan Peningkatan Kapasitas Manajemen Krisis Kesehatan dan TCK-EMT Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Peserta Pertemuan Peningkatan Kapasitas Manajemen Krisis Kesehatan dan TCK-EMT	60 Orang

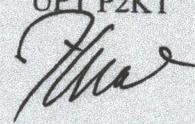
No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	
		APBD	APBN
	Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		
	<i>Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah . Dan Administrasi Umum Perangkat daerah</i>	Rp.212.678.600	147.-056.000

PIHAK KEDUA:
KEPALA UPT P2KT DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Daeng Dani .SKM.M.Kes
NIP. 19681024199303 2008

Palu, 01 April 2024
PIHAK PERTAMA:
KEPALA SEKSI KEWASPADAAN
UPT P2KT



Fitriani, SKM
NIP. 19800806 200012 2 001